

STRATEGI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN *GREEN CITY*

(Studi Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang
Pertamanan dan PJU Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Skripsi pada Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya

Bryan Maulana
NIM.105030600111014



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2015**

MOTTO

“The pain of discipline is far less
than the pain of regret”
–Sarah Bombell



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ii

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk
mewujudkan Green City (Studi Pada Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu)

Disusun oleh : Bryan Maulana

NIM : 105030600111014

Fakultas : Ilmu Administrasi

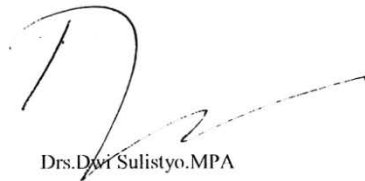
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan

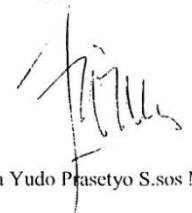
Malang 27 Februari 2015

Komisi Pembimbing

Ketua


Drs. Dwi Sulistyono, MPA

Anggota


Wima Yudo Prasetyo S.sos M.AP

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Maret 2015
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Bryan Maulana
NIM : 105030600111014
Judul : Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mewujudkan Green City (Studi Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu)

dan dinyatakan lulus

Malang, 17 Maret 2015

Ketua

Majelis Penguji

Anggota 1

Drs. Dwi Sulistyono, MPA
NIP. 195905291984031002

Wima Yudo Prasetyo S.sos M.AP
NIP. 197905232006041002

Anggota 2

Anggota 3

Dr. Siti Rochmah, M.Si
NIP. 195703131986012001

Dr. Rivanto, M.Hum
NIP. 196004301986011001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat dan keselamatan selama menuntut ilmu di Kota Malang ini.

*Kupersembahkan karyaku kepada Ibu, Bapak
Yang telah merawatku dari kecil sampai sekarang,
Serta adiku yang telah membuat
aku sadar akan tanggungjawab.
Dan Kepada BudeNur yang telah member tumpangan
selama kuliah 4,5 tahun dimalang, Intan Permata Sari dan
Saudaraku yang ada di Malang yang selalu berbagi
pengalaman hidup selama ini,
Serta ,
teman-teman Perencanaan pembangunan 2010 bersama
kalian merupakan pengalaman tidak akan terlupakan.*

PERNYATAAN ORISINALITAS

iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2000, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 29 Januari 2015



Bryan Maulana
105030600111014

RINGKASAN

Bryan Maulana, 2015. Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mewujudkan *Green City* (Studi Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu), Drs. Dwi Sulisty MPA, Wima Yudo Prasetyo S.sos M.AP, 155 Hal + xiv.

Kota Batu sebagai kota wisata, dikembangkan ke arah kawasan kota ekowisata. Oleh karena itu penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik di kota Batu adalah hal yang penting dan dapat dijadikan sebagai model penataan dan pengelolaan lingkungan kota. Berkembang pesatnya hotel dan wahana objek wisata buatan membuat kota Batu, merubah lahan-lahan terbuka yang menjadi resapan atau hutan beralih fungsi menjadi pemukiman dan gedung bertingkat. Akibatnya kerusakan ekosistem lingkungan di kota Batu menjadi masalah utama kota Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis strategi yang dimiliki Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik sehingga terwujudnya kota hijau.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui kondisi di lapangan, dengan cara mengumpulkan data dari BAPPEDA dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu dan mewawancarai 8 narasumber yang terdiri dari 1 orang BAPPEDA, 3 orang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan 4 orang warga masyarakat yang tinggal sekitar taman dan jalur hijau.

Temuan dari penelitian, pemerintah Kota Batu mempunyai program P2HK (Program Pembangunan Kota Hijau) melalui BAPPEDA dan dikerjakan oleh tim swakelola untuk melakukan rencana kerja pengembangan dan perluasan kawasan ruang terbuka hijau yang harus dikerjakan tahun 2012 sampai 2020. Sedangkan dalam strategi pengelolaan ruang terbuka hijau publik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu belum berjalan dengan baik dalam melibatkan masyarakat kota Batu dan pihak swasta untuk optimalisasi ruang terbuka hijau publik. Sedangkan faktor sumber daya manusia di dalam proses pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan faktor pendukung utama dalam keberhasilan mewujudkan kota hijau. Selanjutnya saran untuk masukan pemerintah Kota Batu dalam pengelolaan ruang terbuka hijau harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan meningkatkan anggaran pembangunan ruang terbuka hijau sehingga menambah jumlah keberadaan ruang terbuka hijau sehingga dapat mewujudkan *Green City*.

Kata kunci: strategi, ruang terbuka hijau publik, kota hijau

SUMMARY

Bryan Maulana, 2015. Strategy of Public Green Space Management to Achieve Green City (Study at Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan and PJU Batu City), Drs. Dwi Sulistyono. MPA, Wima Yudo Prasetyo S.sos M.AP, 155 pages + xiv.

Batu city as a tourism city, developed towards ecotourism urban area. Therefore, structuring and management of its public green urban space is important and it can be a model of proper urban environment structuring and management. The rapid growth of hotel and tourism objects in Batu city makes the city is transforming its green open space into human settlements and buildings. As a result, damage of the city's ecosystem becomes a main issue in Batu City. The purpose of this study is to describe and to analyze the strategies of Dinas Cipta Karya and Tata Ruang bidang Pertamanan and PJU of Batu City in managing public green space to achieve a green city.

The method of this research is qualitative approach. Data are collected from Dinas Cipta Karya and Tata Ruang and BAPPEDA of Batu City. The 8 interviewed sources consisting of 1 informant from BAPPEDA, 3 informants from Dinas Cipta Karya and Tata Ruang and 4 people who live around the parks and green lines.

The result of this research is that the government of Batu City has a program called P2HK (Green City Development Program) which conducted by BAPPEDA and actualized by a team consisting of various parties to develop and spread open green space area from 2012 to 2020. The other result, strategy of Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu in managing and optimizing the function of open green space is not going well. It is showed in the low participation of Batu City community and private sector. Human resources in this process is vital as a supporting factor toward green city. The recommendation of this research is the government of Batu City must improve the quality of human resources whether it is the city apparatus or the community in managing open green space and to improve development budget for open green space in order to create more functional green area.

Keywords : strategy, public green open spaces, green city

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Startegi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mewujudkan *Green City*" (Studi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu).**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
3. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si Koordinator Minat Perencanaan Pembangunan.

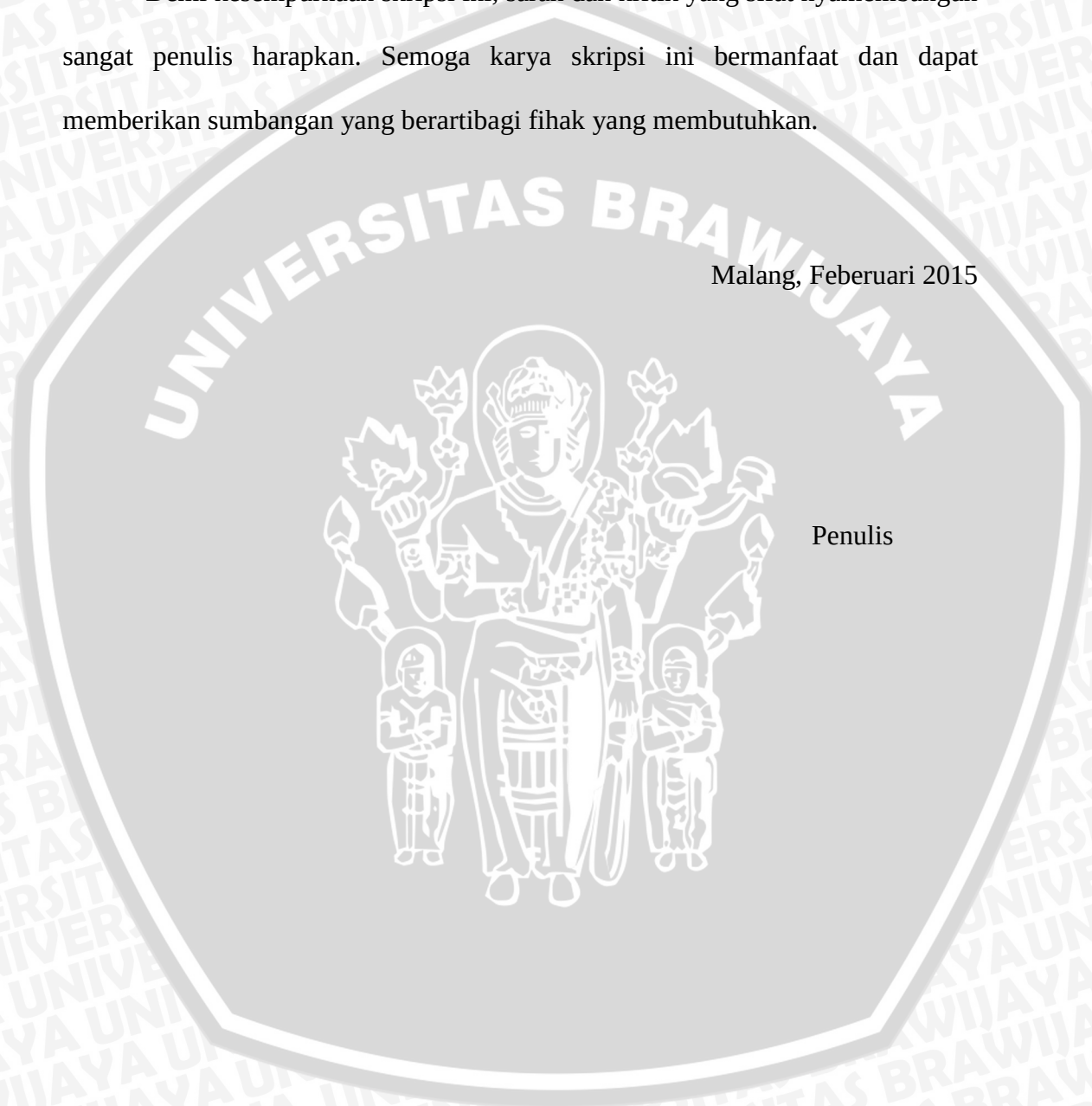
4. Bapak Drs Dwi Sulistyو. MPA selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan membantu selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Wima Yudo Prasetyو S.sos. M.AP selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan membantu selama proses penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tua saya yaitu Bapak H.Basuni Imron, Ibu Cholimah dan Bude Nur yang telah memberikan tumpangan rumah Sumpil Gang 3 selama kuliah di Malang.
8. Kepada adikku Auliya Rizki dan Intan Permata Sari yang selalu membuatku sadar akan tanggung jawab.
9. Kepada Bapak Surya selaku Bidang Sarana dan Prasarana BAPPEDA kota Batu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan.
10. Kepada Bapak Matali selaku Kepala Bidang Pertamanan dan PJU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan.
11. Bapak Didit selaku staf ahli Bidang Pertamanan dan PJU Dinas Cipta Karya Tata Ruang yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan.
12. Kepada teman-teman Perencanaan Pembangunan yang selama ini banyak memberikan banyak pengalaman tak terlupakan bersama kalian.
13. Kepada saudara-saudara yang tinggal di Malang selama 4 tahun ini kalian sudah menemani tinggal di rumah numpang Sumpil gang 3.

14. Kepada teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifat nyamembangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berartibagi fihak yang membutuhkan.

Malang, Feberuari 2015

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	2
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	3
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	4
HALAMAN PERSEMBAHAN	5
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	6
RINGKASAN	7
SUMMARY	8
KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI.....	12
DAFTAR TABEL	15
DAFTAR GAMBAR.....	16
DAFTAR LAMPIRAN	17
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	18
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian	28
D. Kontribusi Penelitian	29
E. Sistematika Pembahasan	29
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep dan Pengertian Strategi.....	31
1. Tingkat-tingkat Strategi	32
2. Tipe-tipe Strategi.....	34
3. Menejemen Strategi	35
4. Tahap-tahap Manajemen Strategi	36
5. Analisis SWOT	38
B. Administrasi Pembangunan.....	43
C. Perencanaan Pembangunan	45
1. Perencanaan.....	45
2. Pembagunan	47
3. Konsepsi Perencanaan Pembangunan	49
D. Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau	49
1. Pengertian Ruang	49

2. Pengertian Ruang Terbuka	50
3. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	50
4. Peran, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau	53
5. Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau	54
6. Wewenang dan Pengolahan Ruang Terbuka Hijau	64
7. Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	66
E. Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan ..	69
1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	70
F. Green City	71

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	75
B. Fokus Penelitian	76
C. Lokasi dan Situs Penelitian	77
D. Jenis dan Sumber Data	78
E. Teknik Pengumpulan Data	80
F. Instrumen Penelitian	81
G. Analisa Data	81

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan situs Penelitian	84
1. Gambaran Umum Kota Batu	84
a. Kota Batu Sebagai Kota Sentra Pariwisata	89
b. Berbasis Pertanian	90
c. Pemerintah yang Kreatif, Inovatif dan Bersih	90
2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu	91
a. Visi-Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu	92
b. Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Batu	93
c. Bidang-Bidang Kegiatan BAPPEDA Kota Batu	94
3. Gambaran Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu	95
a. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas	95
b. Tugas dan Fungsi Bidang Cipta Karya	96
c. Tugas dan Fungsi Bidang Tata Ruang	98
d. Tugas dan Fungsi Bidang Kebersihan	99
e. Tugas dan Fungsi Bidang Pertamanan dan Kebersihan dan PJU	101
f. Tugas dan Fungsi UPT Pemadam Kebakaran	102
4. Gambaran Umum Dinas Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU	103
a. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU)	103
b. Tujuan Pembangunan Bidang Pertamanan dan PJU	105
c. Sasaran Pembangunan Bidang Pertamanan dan PJU	105
d. Visi Bidang Pertamanan dan PJU	106

- e. Misi Bidang Pertamanan dan PJU..... 106
- f. Kondisi Bidang Pertamanan dan PJU 106

B. Penyajian Data

1. **Strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mewujudkan *Green City*..... 108**
 1. Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Batu 108
 2. Program Pembangunan Kota Hijau (P2HK) sebagai upaya mewujudkan *Green City*..... 113
 3. Strategi Pengelolaan RTH Taman dan Jalur Hijau untuk mewujudkan *Green City*..... 119
 4. Analisis SWOT strategi pengelolaan RTH taman dan jalur hijau di Kota Batu 123
 5. Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Batu 128
2. **Faktor pendukung dan penghambat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu dalam startegi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 131**
 - a. Faktor Pendukung 131
 - b. Faktor Penghambat..... 133

C. Pembahasan

1. **Strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mewujudkan *Green City*..... 136**
 - a. Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Batu 136
 - b. Program Pembangunan Kota Hijau (P2HK) sebagai upaya mewujudkan *Green City*..... 141
 - c. Strategi Pengelolaan RTH Taman dan Jalur Hijau untuk mewujudkan *Green City* 143
 - d. Analisis SWOT strategi pengelolaan RTH taman dan jalur hijau di Kota Batu 155
 - e. Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Batu..... 162
2. **Faktor pendukung dan penghambat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu dalam startegi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 164**
 - a. Faktor Pendukung 164
 - b. Faktor Penghambat..... 166

BAB V PEMBAHASAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 168
- B. Saran 171

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Perkembangan Hotel dan Akomodasi lainnya di Kota Batu Tahun 2010 – 2013	23
1.2 Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di kota Batu 2010-2014.....	92
1.3 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik 2010-2014	94
1.4 Tahapan Program Pengembangan Kota Hijau di Kota Batu Tahun 2014	96
1.5 Tujuan dan Manfaat keikutsertaan Kota Batu dalam P2KH Tahun 2014.....	123
1.6 Persoalan dan Potensi RTH Kota Batu Tahun 2014.....	134
2.7 Tabel matriks analisis swot pengelolaan RTH publik kota Batu	144



Daftar Gambar

Gambar 1.1 8 Atribut Program Pengembangan Kota Hijau Di Kota Batu93

Gambar 1.2 Usaha membangun RTH kota Batu Tahun 2014 155



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Jumlah
Halaman		
1	Daftar Nama Narasumber	1
2	Pedoman Wawancara	2
3	Surat BAKESBANGPOL Kota Batu	1
4	Surat Keterangan Riset Fakultas Ilmu Administarsi	1
5	Foto Dokumentasi	2



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh Negara dalam mengatur masyarakat dibidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik menuju kearah pembangunan yang lebih maju, sedangkan menurut (Tjokroamidjojo 1981:49) administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi suatu usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif dan mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan. Secara lebih spesifik, administrasi pembangunan berfungsi merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan (ke arah modernisasi, pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi), dan melaksanakannya secara efektif dengan pendekatan yang multidisiplin, jadi seluruh usaha yang dilakukan negara untuk kepentingan masyarakat dan memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Negara selalu berusaha untuk melakukan pembangunan yang menyeluruh terhadap aspek kehidupan masyarakat dan bangsa demi tuntutan zaman yang

semakin modern dan selalu berkembang di segala bidang. Pembangunan sering dirumuskan sebagai perubahan yang terencana dari situasi nasional satu ke situasi nasional lain yang dinilai lebih tinggi, pada hakikatnya bersifat *time specific: situated in time and place (pembangunan yang melihat situasi dan tempat)* (Katz & Goulet dalam Suryono, 2004:21). Pendapat ini juga didukung dengan (Siagian, 2003:3) yang mendefinisikan pembangunan sebagai usaha/rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Usaha yang dilakukan Negara sebelum melaksanakan pembangunan ialah dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan sendiri merupakan suatu proses yang berkesinambungan dengan melibatkan pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Sedangkan menurut (Tarigan 2005:1) definisi yang sangat sederhana mengenai perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dilakukannya perencanaan sebenarnya untuk mengatasi masalah jangka waktu mencapai sasaran dan dalam mekanismenya dapat dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.

Perkembangan masyarakat yang demikian cepat terutama didukung oleh kemampuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi, maka pembangunan telah sampai pada taraf budaya yang menganggap bahwa dirinya mampu menguasai dan memanipulasi alam lingkungan untuk kepentingan diri sendiri maupun golongannya. Pembangunan merupakan upaya manusia mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tujuan

meningkatkan taraf hidupnya. Pembangunan sendiri pada hakekatnya merupakan campur tangan manusia terhadap lingkungan, oleh sebab itu dalam pembangunan selalu terkait antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Sejalan dengan meningkatnya laju pembangunan di berbagai wilayah yang tidak memperhatikan prinsip kaidah keseimbangan alam dan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan, berpotensi besar mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia, dan pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu terjadinya perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) akan mempengaruhi kondisi lingkungan di Indonesia. Fenomena pemanasan bumi, degradasi kualitas lingkungan dan bencana lingkungan telah membangkitkan kesadaran dan tindakan bersama akan pentingnya menjaga keberlanjutan air bersih dan udara sehat di kota. Kota dengan berbagai aktivitasnya memerlukan udara sejuk, yang dapat terpenuhi, jika tersedia areal untuk hutan kota, ruang terbuka dan taman kota serta dilakukan penghijauan di pekarangan permukiman dan perkantoran. Akan tetapi, banyak kota yang hanya mengejar bangunan fisik sehingga menjadi gersang karena yang tumbuh adalah pohon-pohon tembok atau beton (Manik, 2009).

Kota sebagai pusat peradaban kehidupan dan kebudayaan manusia terus berbenah diri menuju kota hijau (*green city*). Hijau yang dimaksud disini adalah konsep kehidupan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya adalah membangun ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan (Joga dan Ismaun, 2011). Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai penyeimbang ekosistem kota, baik itu sistem

hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. RTH harus dipandang sebagai elemen strategis dalam perencanaan lingkungan, bukan sebagai sisa dari pengembangan lingkungan, tetapi lebih sebagai area konservasi untuk melindungi keseimbangan alam dan ekosistem (Jaya, 2000).

Karena ulah manusia yang tidak peduli dengan lingkungan khususnya di wilayah perkotaan, maka pemerintah harus membuat strategi pengelolaan ruang terbuka hijau yang bermanfaat dan terimplmentasi dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Sesuai dengan definisi Ruang Terbuka Hijau dalam (Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1) menyebutkan

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Selain itu dalam Peraturan Menteri No. 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan, Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau.

Berbagai fungsi yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau adalah (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan

untuk kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota. Untuk mendapatkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional dan estetik dalam suatu sistem perkotaan maka luas minimal, pola dan struktur, serta bentuk dan distribusinya harus menjadi pertimbangan dalam membangun dan mengembangkannya. Dari uraian fungsi sekaligus manfaat Ruang Terbuka Hijau di atas, akan sangat berguna sekali jika pengadaan Ruang Terbuka Hijau benar-benar dapat terlaksana. Sebelum semua lahan tanah benar-benar berubah menjadi bangunan-bangunan bertingkat (mall, hotel atau ruko) yang akan menyebabkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan fungsi dan manfaat yang sangat dibutuhkan warga setempat semakin berkurang, hingga akhirnya tidak ada lagi lahan untuk pengadaan Ruang Terbuka Hijau tersebut, dan masyarakat yang akan menerima dampaknya. Hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah agar serius dalam menata kotanya dengan mempelajari dan mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan baik dan menjadi satu kesatuan dan sejajar dengan perkembangan kota.

Komponen-komponen pengaturan yang harus diperhatikan dalam penyediaan dan pengelolaan RTH adalah pengaturan teknis dan pengaturan penyelenggaraan. Pengaturan teknis meliputi bentuk-bentuk, standar kebutuhan, dan alokasi lahan RTH kota. Pengaturan penyelenggaraan meliputi pengelolaan RTH (perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian), kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat (Fahrentino:2003). Komponen-komponen tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar dalam keberadaan Ruang Terbuka Hijau.

Pedoman dan arah pembangunan dan penataan kota secara terinci dan sistematis sebenarnya sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tapi tidak jarang dalam kesesuaian lahan, banyak sekali ditemukan pelanggaran peruntukan lahan. Kota Batu sebagai kota wisata, dikembangkan kearah kawasan kota ekowisata. Oleh karena itu penataan, pengelolaan, dan pengembangan ruang kota Batu adalah merupakan hal yang penting dan dapat dijadikan sebagai model penataan, pengelolaan, dan pengembangan lingkungan kota yang baik. Berkembang pesatnya hotel dan wahana wisata buatan membuat kota Batu, merubah lahan-lahan terbuka yang menjadi resapan atau hutan beralih fungsi menjadi pemukiman dan gedung bertingkat.

Di kota Batu dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan, terutama untuk pembangunan hotel, tempat wisata dan perekonomian modern. Perkembangan banyaknya akomodasi hotel dirinci menurut kecamatan dari tahun 2010 – 2013.

Table 3.1 Perkembangan Hotel dan Akomodasi lainnya di Kota Batu Tahun 2010 - 2013

No	Kecamatan	Hotel dan Akomodasi Lainnya			
		2010	2011	2012	2013
1	Batu	385	395	398	404
2	Junrejo	8	11	14	18
3	Bumuaji	18	38	44	49
Jumlah		411	444	456	471

Sumber BPS Kota Batu 2014

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan usaha pariwisata di kota Batu telah meningkatkan jumlah pemukiman, perkantoran, hotel, villa dan lain sebagainya.

Di Tahun 2013 jumlah hotel dan akomodasi lain di kota Batu berjumlah 471 hotel atau villa dari tahun sebelumnya (2010) sebanyak 411 hotel atau villa terjadi peningkatan sebesar 60 hotel atau villa. peningkatan pembangunan hotel dan villa terbanyak empat tahun terakhir yaitu ditahun 2011, secara signifikan terdapat di kecamatan Bumiaji.

Kota Batu berada diambang kerusakan ekologis yang kritis akibat perusakan dan penjarahan ekologi. Apalagi, selama ini kebijakan Pemkot Batu cenderung mengarah ke *eco destructive* (merusak lingkungan) diantaranya mengizinkan berdirinya hotel dan wisata di kawasan perlindungan dan bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota Batu tahun 2010-2030. Salah satu kebijakan Pemkot Batu yang sama sekali tidak pro-lingkungan adalah pemberian izin pembangunan Jambuluwuk Resort di jalan raya Pujon, sebab bangunan tersebut berdiri di atas bukit yang seharusnya menjadi daerah konservasi karena di bawahnya terdapat sumber mata air dan lokasi wisata Songgoritidan berada dikemiringan sekitar 40 derajat yang sangat berpotensi menimbulkan tanah longsor dan menimbulkan bahaya bagi warga Kota Batu. Dan yang terbaru adalah pemberian izin pembangunan Hotel Rayja yang berlokasi di atas sumber air Gemulo Kecamatan Bumiaji. Meski sudah berkali-kali ditentang oleh warga karena sumber air Gemulo digunakan sebagai irigasi lahan pertanian dan sumber kehidupan warga sekitar, proses perizinannya tetap berjalan.

Pada masa lalu dan sekarang, pembangunan kota Batu cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan bertumbuhan banyak dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan wisata, serta sarana dan prasarana kota lainnya seiring

dengan pertumbuhan penduduk kota. Hal ini merupakan salah satu bukti kurang dihargainya eksistensi Ruang Terbuka Hijau yang sering di korbakan, padahal sebenarnya bernilai ekologis dan ekonomis tinggi, bagi terwujudnya lingkungan kota yang sehat, secara fisik maupun psikologis. Pada akhirnya, lingkungan perkotaan hanya berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi.

Salah satu cara mengelolah ruang terbuka hijau yang baik adalah dengan melaksanakan penataan ruang terbuka hijau dengan mengkordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Selaras dengan amanat (Undang-Undang Penataan Ruang pasal 3), perlu diwujudkan suatu bentuk pengembangan kawasan perkotaan yang menharmonisasikan lingkungan alamiah dan lingkungan buatan dengan upaya untuk membangkitkan kepedulian masyarakat dan mewujudkan keberlangungan tata kehidupan kota, antara lain dapat dibentuk dengan mewujudkan *Green City*/Kota Hijau.

Green City merupakan salah satu konsep pendekatan perencanaan kota yang berkelanjutan. *Green City* juga dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan suatu kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait atau *stakeholders*. (Direktorat jendral penataan ruang kementerian pekerjaan umum, 2012).

Misi kota hijau sebenarnya tidak hanya sekedar ‘menghijaukan’ kota. Lebih dari itu, kota hijau dengan visinya yang lebih luas dan komprehensif, yaitu Kota yang Ramah Lingkungan, memiliki misi antara lain memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan Mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan baik secara lingkungan, sosial dan ekonomi secara seimbang”(Imam S. Ernawi: 2012)

Untuk mencapai itu semua maka pihak dan instansi terkait khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU memerlukan strategi untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam pembangunan harus sesuai dengan penataan ruang dan fungsi-fungsi yang utama dari Ruang Terbuka Hijau itu sendiri dan dalam pengelolaannya tidak disalahgunakan dan tetap terjaga kelestarian dari Ruang Terbuka Hijau yang sudah terbangun. Menurut (Sedarmayanti 2004:220), strategi merupakan penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran organisasi, penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya, penting untuk melaksanakan sasaran ini. Strategi merupakan sekumpulan pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan dan cara dari suatu kegiatan. Melihat begitu pentingnya sebuah strategi bagi suatu organisasi publik maka, strategi adalah upaya pengembangan keunggulan organisasi atau institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk pencapaian tujuan atau sasaran organisasi.

Strategi dibutuhkan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan tuntutan pasar secara keseluruhan. Rumusan strategi menyinggung

masalah penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi (*resource deployment*) dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya (Tangkilisan, 2005:253).

Dalam rencana strategis ruang terbuka hijau, tidak harus berbentuk hanya unsur vegetatif (pohon-pohon) saja, namun dapat dimasukkan di dalamnya berupa sarana kegiatan untuk aktivitas pendukung yang lain yang disertai elemen-elemen bagaimana menarik warga kota agar beraktivitas di sana, tidak hanya dari sisi ekologis, namun juga dari sisi sosial budaya dan arsitektural atau estetika. Dominasi unsur vegetatif adalah bagian utama yang perlu diperhatikan dan ditekankan yang membedakan dengan perencanaan ruang terbuka yang lain sehingga dapat menstimulasi kesadaran warga kota akan pentingnya ruang terbuka hijau yang secara langsung dapat memberikan tingkat kenyamanan lebih di perkotaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengambil judul mengenai **“STRATEGI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GREEN CITY (STUDI PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG BIDANG PERTAMANAN DAN PUJ KOTA BATU)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mewujudkan *Green City*?
2. Faktor penghambat dan pendukung apa sajakah yang dihadapi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu dalam startegi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap Strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu ini dilakukan atas dasar rasa ingin tahu peneliti terhadap strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kota Batu bidang Pertamanan dan PJU dalam mewujudkan *Green City*. Secara khusus tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis rencana strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu dalam mengelolah Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mewujudkan *Green City*.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung apa saja yang dihadapi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu dalam strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mewujudkan *Green City*.

D. Kontribusi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, penelitian yang dilakukan penulis terhadap Strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap seluruh pihak-pihak yang terkait. Manfaat tersebut adalah:

1. Sebagai media pengembangan teori dan konsep model Strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik dalam pengembangan pembangunan perkotaan.
2. Untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemerintah daerah kota Batu dalam :
 - a. Strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Batu
 - b. Bahan pembelajaran maupun landasan pemikiran berkenaan dengan strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

E. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam membuat sistematika penulisan skripsi ini, disusun dalam 5 Bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab ini mengemukakan latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan skripsi yang berjudul: Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mewujudkan *Green City*. (Studi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu)

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini mengemukakan dan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai dasar dalam penulisan skripsi.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini mengemukakan tentang jenis penelitian, dalam hal ini membahas tentang cara kerja yang dilakukan oleh peneliti dalam mengambil data yang termuat dalam jenis penelitian, fokus penelitian, situs penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisa data.

Bab IV Penyajian data dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari penyajian data-data dari hasil penelitian antara lain gambaran umum lokasi penelitian, data fokus penelitian data-data dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut di analisa dan di intrepretasikan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai

bahan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Batu dalam Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep dan Pengertian Strategi

Strategi adalah turunan dari bahasa Yunani yaitu *Strat* gos yang artinya adalah komandan perang dalam jaman tersebut, adapun pada pengertian saat ini strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditunjuk untuk mencapai tujuan tertentu yang umumnya adalah keberhasilan. Strategi merupakan penerjemahan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam struktur organisasi.

Menurut Sedarmayanti (2004:220), Strategi merupakan penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran organisasi, penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya, penting untuk melaksanakan sasaran ini. Strategi merupakan sekumpulan pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan dan cara dari suatu kegiatan. Pengertian-pengertian strategi diatas menunjukkan ada hal yang menarik, yaitu adanya penyesuaian keputusan strategi dengan lingkungan, baik yang berupa ancaman maupun peluang. Hal tersebut menggambarkan bahwa

strategi adalah proses yang dinamis, berarti strategi merupakan tindakan untuk menghadapi kondisi lingkungan yang berubah dan berbeda serta merupakan cara untuk menciptakan peluang dan menghadapi ancaman. Strategi dibutuhkan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan tuntutan pasar secara keberseluruhan. Rumusan strategi menyinggung masalah penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi (*resource deployment*) dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya (Tangkilisan, 2005:253).

Berkaitan dengan penjelasan-penjelasan pengertian tentang strategi yang telah diuraikan, maka secara operasional strategi bisa berarti suatu tindakan untuk menggunakan potensi sumber daya organisasi secara maksimal untuk mencapai tujuan demi memanfaatkan dan menyesuaikan dengan lingkungan baik berupa peluang maupun ancaman serta tindakan-tindakan itu mampu berpengaruh terhadap sikap masyarakat (konsumen) agar berperilaku seperti yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi.

1. Tingkat-tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan (Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins, 1985) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu: enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan functional strategy.

a) Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti

kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b) Corporate Strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit. Apakah misi universitas yang utama? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu? Apakah misi utamadirektorat jenderal ini, direktorat jenderal itu? Apakah misi badan ini, badan itu? Begitu seterusnya.

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru dijawab bisa fatal. Misalnya, kalau jawaban terhadap misi universitas ialah terjun kedalam dunia bisnis agar menjadi kaya maka akibatnya bisa menjadi buruk, baik terhadap anak didiknya, terhadap pemerintah, maupun terhadap bangsa dan negaranya. Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan keputusan-keputusan strategik dan perencanaan strategik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

c) Business Strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

d) Functional Strategy

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi functional yaitu:

- a. Strategi functional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- b. Strategi functional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating.
- c. Strategi isu, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah (J. Salusu 1996:101).

2. Tipe - tipe Strategi

Menurut (Rangkuti, 2000:6-7) pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 tipe strategi yaitu :

a. Strategi Manajemen

Meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya : strategi pengembangan produk, penetapan harga, akuisisi, pengembangan pasar, dan sebagainya.

b. Strategi Investasi

Merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi, dan sebagainya.

c. Strategi Bisnis

Sering juga disebut sebagai strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi – fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi dan sebagainya.

3. Manajemen Strategi

Istilah perencanaan strategi pertama kali muncul pada 1950-an dan menjadi sangat populer antara pertengahan 1960-an dan pertengahan 1970-an. Menurut (Fred R. David, 2010:5) Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan – keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana disiratkan oleh definisi ini, manajemen strategi berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan / akuntansi, produksi / operasi, penelitian dan pengembangan, serta system informasi computer untuk mencapai keberhasilan organisasional. Terkadang istilah manajemen strategi digunakan untuk merujuk pada perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Tujuan dari manajemen strategi adalah untuk mengeksplorasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok ; perencanaan jangka panjang, sebaliknya, berusaha untuk

mengoptimalkan tren – tren dewasa ini untuk esok. Menurut (Haryadi, Bambang,2003:3) strategi manajemen adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai – nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi.

Menurut John A Pearce II dan Richard B. Robinson yang dikutip dalam buku (Tunggal Amin Widjaja,2004:2) manajemen strategi adalah kumpulan keputusan dan tindakan yang merupakan hasil dari formulasi dan implementasi, rencana yang didesain untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Komponen penting dalam manajemen strategi adalah sebagai berikut

- a) Analisis lingkungan bisnis untuk mendeteksi peluang dan ancaman bisnis.
- b) Analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan.
- c) Strategi bisnis yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan.
- d) Misi perusahaan.

4. Tahap – tahap Manajemen Strategi

Menurut (Fred R. David,2010:6), proses manajemen strategi terdiri atas 3 tahapan yaitu sebagai berikut :

a. Perumusan Strategi

Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi – strategi alternative, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Keputusan perumusan strategi mendorong suatu organisasi untuk komit pada produk, pasar, sumber daya, dan teknologi

spesifik selama kurun waktu yang lama. Perumusan strategi menentukan keunggulan kompetitif jangka panjang.

b. Penerapan Strategi

Penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi – strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur organisasional yang efektif, pengerahan ulang upaya – upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan system informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Penerapan strategi biasa disebut sebagai “tahap aksi” dari manajemen strategi. Penerapan strategi yang berhasil bergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih merupakan seni daripada pengetahuan. Strategi yang dirumuskan bila tidak diterapkan dengan baik maka strategi tersebut tidak ada gunanya.

c. Penilaian Strategi

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Manajer harus tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik; penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan datang karena berbagai faktor eksternal dan internal terus menerus berubah. 3 aktivitas paling mendasar dari penilaian strategi adalah sebagai berikut :

- a) Peninjauan ulang faktor – faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini.
- b) Pengukuran kinerja.
- c) Pengambilan langkah korektif.
- d) Penilaian strategi diperlukan karena apa yang berhasil saat ini tidak selalu berhasil nanti. Keberhasilan senantiasa menciptakan persoalan baru dan berbeda; organisasi yang mudah berpuas diri akan mengalami kegagalan.

5. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats*).

Analisa SWOT adalah suatu metoda penyusunan strategi perusahaan atau organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal. Ruang lingkup bisnis tunggal tersebut dapat berupa domestik maupun multinasional. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) menurut (Jogiyanto, 2005:46) analisis SWOT memiliki arti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut saya lampirkan pengertiannya menurut salah satu pakar SWOT Indonesia, yaitu (Fredy Ranguti, 2000). Kurang lebih seperti ini :

“Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman”.

Petunjuk umum yang sering diberikan untuk perumusan adalah :

- 1) Memanfaatkan kesempatan dan kekuatan (O dan S). Analisis ini diharapkan membuahkan rencana jangka panjang.

2) Atasi atau kurangi ancaman dan kelemahan (T dan W). Analisa ini lebih condong menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana perbaikan (*short-term improvement plan*).

Tahap awal proses penetapan strategi adalah menaksir kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki organisasi. Analisa SWOT memungkinkan organisasi memformulasikan dan mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan dan tujuan organisasi, dalam analisa SWOT informasi dikumpulkan dan dianalisa. Hasil analisa dapat menyebabkan dilakukan perubahan pada misi, tujuan, kebijaksanaan, atau strategi yang sedang berjalan. Dalam penetapan sebuah strategi diperlukan juga analisis lingkungan strategis, menurut (Tangkilisan, 2005:258-260) tujuan dari analisis lingkungan strategis tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh-pengaruh kunci serta pemilihan strategi yang sesuai dengan tantangan yang datangnya dari lingkungan baik itu lingkungan internal maupun eksternal.

Kekuatan/kelemahan internal, digabungkan dengan peluang/ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan. Berikut ini merupakan penjelasan dari SWOT (David, Fred R., 2006:47) yaitu :

1. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Kekuatan adalah

kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran dapat merugikan sumber dari kelemahan perusahaan.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan – kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan.

4. Ancaman (Threats)

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan gangguan utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan.

Menurut (Rangkuti 2006), Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis.

Berikut ini adalah keterangan dari matriks SWOT diatas :

- Strategi SO (Strength and Oppurtunity). Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar – besarnya.
- Strategi ST (Strength and Threats). Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- Strategi WO (Weakness and Oppurtunity). Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- Strategi WT (Weakness and Threats). Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman

Analisis SWOT dapat digunakan dengan berbagai cara untuk meningkatkan analisis dalam usaha penetapan strategi. Umumnya yang sering digunakan adalah sebagai kerangka / panduan sistematis dalam diskusi untuk membahas kondisi alternatif dasar yang mungkin menjadi pertimbangan perusahaan. Menurut (Ferrel dan Harline, 2005), fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman).

Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan.

Menurut Wechsler dan Backoff sebagaimana dikutip oleh (Heene,2010:6) bahwa penerapan strategi organisasi publik pada akhirnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Kepemimpinan
- b. Kapasitas dari organisasi
- c. Kesepakatan internal mengenai wewenang yang berlaku
- d. Ruang kebebasan yang tersedia melalui pelimpahan pengendalian oleh atasan
- e. Bonafiditas dari sumber-sumber keuangan alternative
- f. Keragaman akan wewenang
- g. Perkembangan dalam teknologi jasa

2. Faktor Eksternal

- a. Sarana yang tersedia
- b. Persyaratan yang diminta para stakeholders
- c. Pengaruh dari berbagai agenda politik
- d. Dukungan publik terhadap organisasi dan aktivitasnya
- e. Alokasi anggaran yang dikendalikan atasan
- f. Perimbangan kekuatan politik
- g. Badan hukum dalam organisasi

Dalam penetapan sebuah strategi diperlukan analisis lingkungan strategis, menurut (Tangkilisan,2005:258-260) tujuan dari analisis lingkungan strategis tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh-pengaruh kunci serta pemilihan

strategi yang sesuai dengan tantangan yang datanginya dari lingkungan baik itu lingkungan internal maupun eksternal.

Sedangkan menurut Rangkuti sebagaimana dikutip oleh (Tangkilisan, 2005:259-260) dalam analisis lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal tersebut dengan menggunakan analisis model SWOT. Penjelasan mengenai analisis SWOT dan kedua lingkungan tersebut sebagai berikut:

1. Lingkungan internal

Lingkungan internal adalah analisis organisasi secara internal dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*) dari satuan organisasi yang ada. Dengan demikian, proses analisis lingkungan internal merupakan proses yang sangat penting dan tidak dapat disepelekan, karena dengan analisis lingkungan internal akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada. Faktor-faktor yang tercakup dalam lingkungan internal adalah sumber daya, strategi yang saat ini digunakan dan kinerja

2. Lingkungan eksternal

Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang merupakan kekuatan yang berada di luar organisasi, dimana organisasi tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya, namun perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi institusi dalam suatu hubungan timbal balik. Terdapat dua faktor di lingkungan eksternal, yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Lingkungan eksternal suatu institusi atau organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap pencapaian

misi yang disepakati. Pengaruhnya yang cukup kuat menyebabkan perlunya perhatian yang serius terhadap dimensi atau aspek yang terkandung di dalamnya meskipun berada diluar organisasi. Adapun faktor-faktor yang ada dalam lingkungan eksternal tersebut adalah aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi.

B. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan adalah bagian dari perspektif dalam ilmu-ilmu sosial yang membahas pembangunan. Lahirnya administrasi pembangunan bersamaan dengan kemunculan paradigma (perspektif) pembangunan dalam ilmu sosial secara umum sejak dekade 1950-an. Administrasi Pembangunan menggunakan dua fungsi yaitu Pembangunan Administrasi dan Administrasi Pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa dan pembangunan sosial.

Menurut (Bintoro Tjokroamidjojo, 1981:49) administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi suatu usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif dan mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan. Secara lebih spesifik, administrasi pembangunan berfungsi merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan (ke arah modernisasi, pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi), dan melaksanakannya secara efektif dengan pendekatan yang multidisiplin.

Selain dalam menetapkan kebijakan (Bintoro Tjokroamidjojo,1995:59) juga berpendapat mengenai pentingnya program, suatu kebijaksanaan atau *policy* perlu didukung oleh program-program pembangunan kongkrit daripada program-program atau proyek pembangunan tersebut dalam project plan yang dituang dalam project form.

Setelah melaksanakan program tidak ketinggalan suatu organisasi melakukan evaluasi, menurut (Bintoro Tjokroamidjojo,1995:196) evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dianalisis dan pelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang kan datang

Administrasi Pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengatur masyarakat dibidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Administrator pembangunan mempunyai kaitan dengan memandu perubahan yang dimaksud.

C. Perencanaan Pembangunan

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan - tak akan dapat berjalan.

Definisi perencanaan dikemukakan oleh (Erly Suandy,2001:2) Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan

operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Bagi seorang perencana, hubungan antara teori dan praktek adalah sangat penting, sebab perencanaan tidak seperti ilmu murni pada dasarnya perencanaan adalah kegiatan preskriptif, bukan deskriptif. Tujuan seorang perencana bukanlah untuk menguraikan apa yang ada di dunia ini tetap untuk mengusulkan cara-cara bagaimana keadaan tersebut bisa diubah.

Ada beberapa pengertian perencanaan yang dikemukakan oleh para ahli, menurut (Tarigan,2005:1) definisi yang sangat sederhana mengenai perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan itu sendiri memerlukan suatu pengakuan rasional dan sosial: ia “harus dibenarkan sebagai suatu penerapan cara pengambilan keputusan yang rasional pada masalah-masalah sosial.” Karena perencanaan adalah suatu aktivitas yang mempengaruhi masyarakat dan menyangkut nilai-nilai manusia, maka teori perencanaan tidak dapat mengabaikan ideologi.

Perencanaan yang merupakan suatu proses yang terus menerus selalu menekankan tidak saja pada produk melainkan pada proses penilaian atas sukses tidaknya suatu kegiatan diukur baik dari proses maupun dari outputnya. sebagian perencana lebih konsern pada output. proses yang baik belum tentu menjamin output yang baik dan demikian juga sebaliknya. sebagai suatu proses, perencanaan terkait erat dengan siklus manajemen.

Monitoring berkaitan erat dengan perencanaan, yang pada hakekatnya bahwa terdapat hubungan timbal balik antara perencanaan dan pengawasan.

Jadi, jika tanpa perencanaan, pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan. Perencanaan ditujukan untuk menetapkan program-program yang sesuai, terpadu dan jelas sasarannya, sedangkan pengawasan dimaksudkan untuk mengatur agar semua kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana, intruksi dan prinsip yang telah ditentukan. Berikut ini adalah pengertian pengawasan (*controlling*) yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli :

Menurut (Handoko,1999 : 25) : “ Pengawasan (*Controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.” Berdasarkan uraian tentang definisi pengawasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan serangkaian aktivitas manajemen yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja berlangsung lancar dan sesuai dengan rencana atau standar yang ditetapkan. Banyak faktor yang mengharuskan dilaksanakan pengawasan dalam suatu perusahaan, antara lain tidak luputnya karyawan dari kesalahan dalam bekerja dan perlunya pimpinan mendelegasikan wewenangnya.

2. Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan juga sering diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. (Siagian,2003:4) mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka

pembinaan bangsa (*nation building*).Pembangunan sering dirumuskan sebagai perubahan yang terencana dari situasi nasional satu ke situasi nasional lain yang dinilai lebih tinggi, pada hakikatnya bersifat *time specific:situadated in time and place (pembangunan yang melihat situasi dan tempat)*(Katz & Goulet dalam Suryono 2004:21)

Pembangunan bangsa adalah bagian integral dari pembangunan nasional suatu negara.Pembangunan setiap negara berkembang bersifat multi dimensional, yakni pembangunan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional seperti politik,ekonomi, dan sosial budaya. (Bryant dan White,1982) menyebutkan bahwa.pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk memengaruhi masa depannya dan memiliki lima implikasi utama, meliputi :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai, dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuannya (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Dengan demikian ide pokok pembangunan menurut Siagian, bahwa pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah kepada modernitas; modernitas dicapai melalui pembangunan multidimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah

ditentukan. Dalam pembangunan juga memiliki tantangan seperti yang diungkapkan (Bryson, 2007: 227-228) ada empat tantangan yang perlu dihadapi dalam pembangunan yaitu:

- a. Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen.
- b. Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi good currency.
- c. Masalah struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan.
- d. Masalah institusional adalah pelaksanaan kepemimpinan transformatif.

3. Konsepsi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan menurut Waterston dalam (Bintoro Tjokroamidjojo, 1987 : 12) adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan sebagai alternatif dari berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan mengikuti, supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Proses perencanaan merupakan suatu prosedur dan tahapan dari perencanaan itu dilaksanakan. Secara hierarki, prosedur perencanaan itu dilakukan atas dasar prinsip *Top-Down Planning*, yaitu proses perencanaan yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi suatu organisasi kemudian atas dasar keputusan tersebut dibuat suatu perencanaan di tingkat yang lebih rendah. Prinsip lainnya adalah lawan dari prinsip di atas yaitu *Bottom-Up Planning* yang merupakan perencanaan yang awalnya dilakukan di tingkat yang paling rendah dan selanjutnya disusun rencana organisasi di atasnya sampai dengan tingkat pusat atas dasar rencana dari bawah.

Menurut (Riyadi dan Bratakusumah, 2004 : 7), perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai : Suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan

digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik”.

D. Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian Ruang

Ruang adalah yang berbatas atau terlingkung oleh bidang. Ruang secara konstan melingkupi keberadaan kita. Sebuah bidang yang mendapat perluasan dengan perbedaan arah dari arah asalnya pun dapat dikatakan sebagai ruang. Sedangkan menurut (Budiharjo, 1991:91) ruang tidak dapat dipisahkan dari manusia baik secara psikologis maupun emosional. Hal ini dikarenakan manusia selalu berada dalam ruang, bergerak, menghayati dan berfikir, dan juga membuat ruang untuk menciptakan dunianya. Dengan kata lain segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak bisa lepas oleh ruang.

2. Pengertian Ruang Terbuka

Ruang Terbuka berbeda dengan istilah ruang luar (*exterior space*), yang ada di sekitar bangunan dan merupakan kebalikan ruang dalam (*interior space*) di dalam bangunan. Definisi ruang luar, adalah ruang terbuka yang sengaja dirancang secara khusus untuk kegiatan tertentu, dan digunakan secara intensif, seperti halaman sekolah, lapangan olahraga, termasuk plaza (*piazza*) atau *square*. Ruang terbuka dapat dipahami sebagai ruang atau lahan yang belum dibangun atau sebagian besar belum dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi; konservasi lahan dan sumber daya alam lainnya; atau keperluan sejarah dan keindahan (Green, 1959:19)

3. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Secara definitif, Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota. Menurut (Joga dan Ismaun, 2011:92), RTH merupakan suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang menjadi ciri RTH di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya. Berdasarkan pada klasifikasi RTH maka dalam penelitian ini RTH yang akan diteliti adalah jenis RTH binaan, yang dibangun oleh pemerintah kota Batu berupa taman kota dan jalur hijau untuk mencukupi kebutuhan RTH kota di masing-masing wilayah yang ada di Kota Batu. RTH dapat dibedakan dalam berbagai jenis dan bentuk, seperti RTH pekarangan/halaman, RTH pertanian, RTH kehutanan, RTH pertamanan, RTH olahraga, RTH pemakaman, dan jenis RTH lainnya. Bentuk RTH dibedakan menjadi dua yaitu RTH berbentuk area hijau dan RTH berbentuk jalur hijau (Joga dan Ismaun, 2011:103-104)

Fungsi lain dari ruang terbuka hijau adalah sebagai paru-paru kota (Jaya, 2000) mengungkapkan mengenai fungsi ruang terbuka hijau (RTH) sebagai

penyeimbang ekosistem kota, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. RTH harus dipandang sebagai elemen strategis dalam perencanaan lingkungan, bukan sebagai sisa dari pengembangan lingkungan, tetapi lebih sebagai area konservasi untuk melindungi keseimbangan alam dan ekosistem. Pengertian Ruang Terbuka Hijau dalam (Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1) menyebutkan

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakarnan umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Selain itu dalam Peraturan Menteri No. 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan, Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk areamemanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau.

Seperti yang diungkapkan (Fahrentino:2003) Komponen-komponen pengaturan yang harus diperhatikan dalam penyediaan dan pengelolaan RTH adalah pengaturan teknis dan pengaturan penyelenggaraan. Pengaturan teknis meliputi bentuk-bentuk, standar kebutuhan, dan alokasi lahan RTH kota. Pengaturan penyelenggaraan meliputi pengelolaan RTH (perencanaan,

pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian), kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat

Adapun Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi yang sangat penting bagi ekosistem sama halnya yang diungkapkan Joga dan Ismaun (2011:98-101) RTH sebagai infrastruktur hijau memiliki fungsi beragam diantaranya adalah konservasi tanah dan air, ameliorasi iklim, pengendali pencemaran, habitat satwa dan konservasi plasma nutfah, sarana rekreasi dan wisata, sarana pendidikan dan penyuluhan, pengendali tata ruang kota, estetika

Adanya faktor pendukung dalam ketersediaan Ruang Terbuka sangat penting (Rosdiana, 2013:25-26) mengungkapkan unsur-unsur esensial dalam faktor pendukung yaitu SDM dan kelembagaan yang berperan dalam keberhasilan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik unsur SDM yang berperan ada empat unsur kelompok sasaran yaitu:

- a. Unsur masyarakat merupakan unsur utama atau unsur penggerak
- b. Unsur birokrat, para birokrat harus mampu mereposisi dirinya sebagai eksekutor pembangunan
- c. Unsur swasta, para perusahaan diperguruan harus mau berperan dalam mendukung Program Pembangunan Kota Hijau.
- d. Unsur pendukung, unsur pendukung ini terdiri dari: para cerdik pandai, pemuka masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, universitas dan LSM.

4. Peran, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan, dengan tujuan sebagai berikut :

- a. meningkatkan lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan
- b. menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat

Pentingnya ruang terbuka hijau, dapat kita lihat dari fungsi dan manfaat yang dapat diambil darinya. Secara umum Ruang Terbuka Hijau mempunyai atau memiliki fungsi utama (intrinsik) yakni fungsi ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Berdasarkan definisi dan fungsinya, peran RTH sangat esensial dalam membangun suatu kota sehat. Keberadaan suatu RTH sebagai ruang terbuka yang bebas dan dilengkapi dengan elemen-elemen “hijau” seperti pepohonan dapat meningkatkan kesehatan warga kota, baik secara jasmani (fisik) maupun rohani (jiwa).

Penyediaan RTH di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan RTH juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya RTH. Berbagai jenis RTH dapat dilakukan di lahan privat milik masyarakat atau swasta. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya peran RTH inilah yang juga penting dalam membangun kota sehat. Sosialisasi mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH di tingkat masyarakat perlu dilakukan. Selain itu, pembentukan dan pelestarian komunitas hijau juga penting dalam rangka membangun gaya hidup sehat di masyarakat. Dukungan dari pemerintah dapat dilakukan

melalui penyelenggaraan kegiatan sosial dan kebijakan lokal yang mendorong, di antaranya adalah adanya insentif bagi masyarakat/swasta yang menyediakan RTH di halaman/lahan miliknya sendiri.

5. Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau

Jenis-jenis ruang terbuka Hijau berdasarkan Permendagri No.1 Tahun 2007

adalah :

a. Taman kota

Taman kota merupakan ruang di dalam kota yang ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunaannya. Selain itu, taman kota difungsikan sebagai paru-paru 24 kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, dan habitat berbagai flora dan fauna. Apabila terjadi suatu bencana, maka taman kota dapat difungsikan sebagai tempat posko pengungsian. Pepohonan yang ada dalam taman kota dapat memberikan manfaat keindahan, penangkal angin, dan penyaring cahaya matahari. Taman kota berperan sebagai sarana pengembangan budaya kota, pendidikan, dan pusat kegiatan kemasyarakatan.

b. Taman wisata alam

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan ini dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jeni tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

c. Taman rekreasi

Taman rekreasi merupakan tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas. Kegiatan rekreasi dibedakan menjadi 25 kegiatan yang bersifat aktif dan pasif. Kegiatan yang cukup aktif seperti piknik, olah raga, permainan, dan sebagainya melalui penyediaan sarana-sarana permainan.

d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman

Taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi terbatas/masyarakat sekitar. Taman ini mempunyai fungsi sebagai paru-paru kota (sirkulasi udara dan penyinaran), peredam kebisingan, menambah keindahan visual, area interaksi, rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan kenyamanan lingkungan.

e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial

Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi terbatas/pengunjung. Taman ini terletak di beberapa kawasan institusi, misalnya pendidikan dan kantor-kantor. Institusi tersebut membutuhkan RTH pekarangan untuk tempat upacara, olah raga, area parkir, sirkulasi udara, keindahan dan kenyamanan waktu istirahat belajar atau bekerja.

f. Taman hutan raya

Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Kawasan taman hutan raya dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

g. Hutan kota

Dalam membangun sebuah hutan kota terdapat dua pendekatan yang dapat dipakai. Pendekatan pertama, hutan kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja. Pada bagian ini, hutan kota merupakan bagian dari suatu kota. Penentuan luasnya pun dapat berdasarkan :

- 1) Prosentase, yaitu luasan hutan kota ditentukan dengan menghitungnya dari luasan kota.
- 2) Perhitungan per kapita, yaitu luasan hutan kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduknya.
- 3) Berdasarkan isu utama yang muncu. Misalnya untuk menghitung luasan hutan kota pada suatu kota dapat dihitung berdasarkan tujuan pemenuhan kebutuhan akan oksigen, air, dan kebutuhan lainnya.

Pendekatan kedua, semua areal yang ada di suatu kota pada dasarnya adalah areal untuk hutan kota. Pada pendekatan ini, komponen yang ada di kota seperti pemukiman, perkantoran, dan industri dipandang sebagai suatu *enklave* (bagian) yang ada dalam suatu hutan kota. Berdasarkan PP No. 63 Tahun 2002, hutan kota didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Persentase

luas hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat dengan luas minimal sebesar 0.25 ha dalam satu hamparan yang kompak (hamparan yang menyatu). Taman hutan raya, kebun raya, kebun binatang, hutan lindung, arboretum, dan bum perkemahan yang berada di wilayah kota atau kawasan perkotaan dapat diperhitungkan sebagai luasan kawasan yang berfungsi sebagai hutan kota. Hutan kota juga mempunyai beberapa fungsi seperti memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata alam, rekreasi, olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nutfah, dan budidaya hasil hutan bukan kayu. Hal-hal tersebut dapat dilakukan selama tidak mengganggu fungsi hutan kota.

h. Hutan lindung

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah

RTH bentang alam adalah ruang terbuka yang tidak dibatasi oleh suatu bangunan dan berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara;

tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; pengendali tata air; dan sarana estetika kota.

j. Cagar Alam

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sesuai fungsinya, kawasan cagar alam ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya.

k. Kebun Raya

Kebun raya adalah suatu area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian. Selain itu, kebun raya juga digunakan sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Dua buah bagian utama dari sebuah kebun raya adalah perpustakaan dan herbarium yang memiliki koleksi tumbuh-tumbuhan yang telah dikeringkan untuk keperluan pendidikan dan dokumentasi

l. Kebun binatang

Kebun binatang adalah tempat dimana hewan dipelihara dalam lingkungan buatan serta dipertunjukkan kepada publik. Selain menyuguhkan atraksi kepada pengunjung dan memiliki berbagai fasilitas rekreasi, kebun binatang juga mengadakan program-program pembiakan, penelitian, konservasi, dan pendidikan.

m. Pemakaman Umum

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti cadangan RTH, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan.

n. Lapangan Olah Raga

Lapangan olahraga merupakan lapangan yang dibangun untuk menampung berbagai aktifitas olahraga seperti sepak bola, voli, atletik, dan golf serta sarana-sarana penunjangnya. Fungsi lapangan olahraga adalah sebagai wadah olahraga, tempat bermain, pertemuan, sarana interaksi dan sosialisasi, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya.

o. Lapangan Upacara

Lapangan upacara merupakan lapangan yang dibangun untuk kegiatan upacara. Umumnya kegiatan ini dilakukan di halaman perkantoran yang cukup luas dan lapangan olah raga.

p. Parkir Terbuka

Area parkir merupakan unsur pendukung sistem sirkulasi kota yang dapat menambah kualitas visual lingkungan. Lahan parkir terbuka yang ada di perkantoran, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan lainnya hendaknya ditanami dengan pepohonan agar tercipta lingkungan yang sejuk dan nyaman.

q. Lahan Pertanian Perkotaan

Pertanian kota adalah kegiatan penanaman, pengolahan, dan distribusi pangan di wilayah perkotaan. Kegiatan ini tentunya membutuhkan lahan yang cukup luas. Oleh karena itu, lahan ini biasanya jarang ditemui di wilayah perkotaan yang cenderung memiliki lahan yang sudah terbangun. Hasil pertanian kota ini menyumbangkan jaminan dan keamanan pangan yaitu meningkatkan jumlah ketersediaan pangan masyarakat kota serta menyediakan sayuran dan buah-buahan segar bagi masyarakat kota. Selain itu, pertanian kota juga dapat menghasilkan tanaman hias dan menjadikan lahan-lahan terbengkalai kota menjadi indah. Dengan pemberdayaan masyarakat penggarap maka pertanian kota pun menjadi sarana pembangunan modal sosial.

r. Jalur Dibawah Tegangan Tinggi (SUTT Dan SUTET)

SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) adalah sistem penyaluran listrik yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. Daerah sekitarnya hendaklah tidak dijadikan daerah terbangun, tapi dijadikan RTH jalur hijau. RTH ini berfungsi sebagai pengamanan, pengendalian jaringan listrik tegangan tinggi, dan mempermudah dalam melakukan perawatan instalasi.

s. Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ Dan Rawa

Sempadan adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari sungai, danau, waduk, situ, pantai, dan mata air atau bahkan kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk

penyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, mengamankan aliran sungai, dan dikembangkan sebagai area penghijauan.

PP Nomor 26 Tahun 2008 menetapkan kriteria-kriteria sempadan sungai, yaitu:

- 1) daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- 2) daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- 3) daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

t. Jalur Pengaman Jalan, Median Jalan, Rel Kereta Api, Pipa Gas dan Pedestrian

Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kirikanan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman jalan terdiri dari RTH jalur pejalan kaki, taman pulo jalan yang terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan yang berada di sisi persimpangan jalan. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas. Beberapa fungsi jalur hijau jalan yaitu sebagai penyegar udara, peredam kebisingan, mengurangi pencemaran polusi kendaraan, perlindungan bagi pejalan kaki dari hujan dan sengatan matahari, pembentuk citra kota, dan mengurangi peningkatan

suhu udara. Selain itu, akar pepohonan dapat menyerap air hujan sebagai cadangan airtanah dan dapat menetralsir limbah yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan.

u. Kawasan Dan Jalur Hijau

Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan dan memiliki fungsi utama lindung atau budaya. RTH kawasan berbentuk suatu areal dan non-linear dan RTH jalur memiliki bentuk koridor dan linear. Jenis RTH berbentuk areal yaitu hutan (hutan kota, hutan lindung, dan hutan rekreasi), taman, lapangan olah raga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional (perdagangan, industri, permukiman, pertanian), kawasan khusus (hankam, perlindungan tata air, dan plasma nutfah). Sedangkan RTH berbentuk jalur yaitu koridor sungai, sempadan danau, sempadan pantai, tepi jalur jalan, tepi jalur kereta, dan sabuk hijau.

v. Daerah Penyangga (*Buffer Zone*) Lapangan Udara

Daerah penyangga adalah wilayah yang berfungsi untuk memelihara dua daerah atau lebih untuk beberapa alasan. Salah satu jenis daerah penyangga adalah daerah penyangga lapangan udara. Daerah penyangga ini berfungsi untuk peredam kebisingan, melindungi lingkungan, menjaga area permukiman dan komersial di sekitarnya apabila terjadi bencana, dan lainnya.

w. Taman Atap (*Roof Garden*)

Taman atap adalah taman yang memanfaatkan atap atau teras rumah atau gedung sebagai lokasi taman. Taman ini berfungsi untuk membuat

pemandangan lebih asri, teduh, sebagai insulator panas, menyerap gas polutan, mencegah radiasi ultraviolet dari matahari langsung masuk ke dalam rumah, dan meredam kebisingan. Taman atap ini juga mampu mendinginkan bangunan dan ruangan dibawahnya sehingga bisa lebih menghemat energi seperti pengurangan pemakaian AC. Tanaman yang sesuai adalah tanaman yang tidak terlalu besar dengan sistem perakaran yang mampu tumbuh pada lahan terbatas, tahan hembusan angin, dan tidak memerlukan banyak air.

Taman atap mempunyai dua fungsi, yaitu bersifat intensif, di mana kegiatan yang dilakukan didalamnya aktif dan variatif serta menampung banyak orang. Fungsi yang kedua bersifat ekstensif, yaitu mempunyai satu jenis kegiatan dan tidak melibatkan banyak orang atau bahkan tidak diperuntukkan untuk kegiatan manusia. Taman atap mempunyai pemandangan yang berbeda dengan taman konvensional.

6. Wewenang dan Pengolahan Ruang Terbuka Hijau

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang

terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Adapun

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau dapat dibagi menjadi:

- a. Kawasan hijau pertamanan kota.
- b. Kawasan hijau rekreasi kota
- c. Kawasan hijau hutan kota
- d. Kawasan hijau kegiatan olahraga
- e. Kawasan hijau pemakaman
- f. Kawasan hijau pertanian
- g. Kawasan hijau jalur hijau
- h. Kawasan hijau pekarangan.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 22 Kawasan Perkotaan, pengklasifikasikan Ruang Terbuka Hijau yang ada sesuai dengan Tipologi berikut :

- a. Berdasarkan fisik
Berdasarkan fisik, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi: 1) RTH alami adalah RTH yang terdiri dari habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional. 2) RTH non alami/binaan adalah RTH yang terdiri dari taman, lapangan olahraga, makam, dan jalur-jalur hijau jalan.
- b. Berdasarkan struktur ruang
Berdasarkan struktur ruang, RTH dapat dibedakan menjadi : 1) RTH dengan pola ekologis merupakan RTH yang memiliki pola mengelompok, memanjang, tersebar. 2) RTH dengan pola planologis merupakan RTH yang memiliki pola mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
- c. Berdasarkan segi kepemilikan
Berdasarkan segi kepemilikan, RTH dapat dibedakan menjadi : 1) RTH Publik 2) RTH Privat
- d. Berdasarkan fungsi
RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Ekologis

RTH berfungsi ekologis merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota untuk menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik. Secara ekologis, RTH dapat meningkatkan kualitas airtanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, dan sempadan sungai.

2) Fungsi Sosial Budaya

Secara sosial budaya, RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi social dan sarana rekreasi. Bentuk RTH yang berfungsi sosial budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olahraga, kebun raya, dan TPU.

3) Fungsi Arsitektural/Estetika

Secara arsitektural, RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota.

4) Fungsi Ekonomi

Sedangkan secara ekonomi melalui pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/perkebunan (urban agriculture) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

7. Strategi Pengelolaan RTH

Strategi pengembangan RTH kota yang berbasis infrastruktur hijau (infrastruktur ekologis) harus diintegrasikan dengan rencana tata ruang kota (RTRW) dan tercermin dalam struktur dan pola ruang kotanya. Sehingga jaringan RTH kota dengan berbagai jenis dan fungsinya menjadi sistem infrastruktur untuk keseimbangan ekosistem kota (Joga dan Ismaun, 2011:223)

Lebih lanjut (Joga dan Ismaun, 2011:221-243) mengatakan bahwa strategi yang dapat diterapkan untuk menuju RTH 30% diantaranya adalah:

a. Merencanakan rencana induk RTH dan melegalisasi perda RTH

Pemerintah Daerah dan DPRD perlu secepatnya menempatkan masalah RTH sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan yang berkelanjutan. Perlu secepatnya didorong lahirnya Perda tentang RTH dan Rencana Induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH

memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tegas. Beberapa contoh kebijakan yang mendorong pemenuhan RTH 30%. Antara lain :

- a. Penerapan KDH diwajibkan dalam setiap pengurusan IMB
 - b. Insentif diberikan kepada warga yang dengan sukarela menjadikan halaman atau perkarangan rumahnya menjadi bagian terpadu dengan RTH Kota. Lahan privat dapat pula dihibahkan untuk RTH.
 - c. Semua pengembang wajib menyediakan RTH minimal 20% dari kawasan yang dikembangkan
 - d. Insentif diberikan kepada pengembang yang membangun kawasan dengan konsep perumahan hijau (*green property*)
 - e. Insentif diberikan kepada pengembang yang membangun bangunan hijau, dapat terdiri dari atap hijau (*green roof*) dan dinding hijau (*Green wall, vertical garden*)
 - f. Pemerintah mendorong pembangunan kawasan komersil (CBD) di pusat kota arah vertikal.
- b. Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun/dipreservasi

Merupakan bagian dari penyusunan Perda RTRW. Dalam Perda RTRW harus ditentukan daerah-daerah yang diperkirakan sensitive terhadap perubahan harus harus dipreservasi atau dokonversi agar fungsi lingkungan tetap terjaga. Daerah yang perlu dipreservasi antara lain

- Habitat satwa liar
- Daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi
- Daerah genangan dan penampungan air (*water retention*)
- Daerah rawan longsor
- Tepian sungai dan tepian pantai sebagai pengaman ekologis
- Daerah-daerah yang memiliki nilai pemandangan tinggi

- c. Menghijaukan bangunan (*green roof/green wall*)

Keterbatasan lahan telah mendorong kreativitas arsitek dan arsitek lansekap untuk memulai memperkenalkan pembangunan taman atap (*Green roof, roof garden*) dan dinding (*green wall, vertical garden*) pada bangunan. Penghijauan bangunan terbukti mampu menurunkan suhu kota dan menyerap gas polutan.

- d. Menambah lahan RTH baru, perluasan RTH melalui pembelian lahan.

Pemerintah membeli lahan untuk memperbanyak pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya, hutan mangrove, dan situ atau danau buatan.

Contoh pembangunan lahan hijau baru:

- a) Pembebasan lahan untuk ruang evakuasi bencana di permukiman padat penduduk.
- b) Pembangunan taman-taman interaksi pada setiap RT/RW

- c) Program ini membebaskan lahan milik masyarakat (200-500m²) pada kantong permukiman padat untuk dikembangkan menjadi taman interkatif yang direncanakan 2 taman disetiap kelurahan.
- d) Pembangunan RTH baru dapat pula bekerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR
- e. Meningkatkan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting.

RTH yang telah ada ditingkatkan kualitasnya sehingga fungsi ekologisnya lebih optimal dan siklus karbon lebih meningkat, sebagai contoh:

- a) Refungsionalisasi RTH eksisting jalur hijau SPBU kembali menjadi taman.
- b) Restorasi kawasan hutan bakau
- c) Revitalisasi situ, danau, waduk, sebagai daerah resapan air
- d) Penanaman rumput pad ataman-taman lingkungan yang diperkeras (lapangan bulutangkis, lapangan basket, lahan parker) agar mempunyai daya serap air yang lebih besar.
- f. Mengakuisi RTH privat, menjadikan RTH kota

Akuisisi RTH privat menjadi RTH kota dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Penerapan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada lahan-lahan privat yang dimiliki masyarakat dan swasta diterapkan pada pengurusan izin mendirikan bangunan.
- b) Pemerintah daerah dapat mulai mendata dan menetapkan RTH privat perkarangan rumah, sekolah, perkantoran, hingga pengembang (kawasan terpadu, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, sebagai bagian dari RTH
- c) Pengembang diminta untuk memenuhi kewajiban penyediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Dalam pengembangan kawasan diisyaratkan koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 % berupa taman di kawasan pengembang.
- d) warga diajak berperan mengelola lahan hijau perkarangan melalui penanaman pohon rindang dan karpet hijau tanaman dan pembuatan lubang biopori.
- e) Insentif bagi warga yang lahannya bersedia diakuisisi berupa keringanan pajak PBB, pajak air tanah, pembayaran tagihan listrik maupun telepon.
- g. Mengembangkan koridor hijau kota.

Penanaman pohon besar secara masal untuk menciptakan koridor ruang hijau kota di sepanjang potensi ruang hijau, seperti:

- Jalur hijau
- Pedestrian
- Sempadan sugai
- Tepian badan air situ dan waduk
- Sempadan rel kereta api
- Saluran Umum Tegangan Tinggi (SUTT)
- Pantai

Koridor jalur hijau dikembangkan sebagai urban park *connector* yang menghubungkan RTh diseluruh kota, dilengkapi jalur sepeda dan pejalan kaki, menjadi jalur alternative transportasi kendaraan tidak bermotor dan jalur wisata kota ramah lingkungan.

h. Meningkatkan peran serta masyarakat/partisipasi publik.

Untuk mewujudkan RTH minimal 30% dari luas kota maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Untuk mengantisipasi perubahan lahan yaitu konversi lahan hijau atau alami menjadi lahan terbangun, maka perlu diterapkan KDH secara sadar oleh masyarakat dan pengembang. Bentuk-bentuk kegiatan antara lain:

- a) Penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
- b) Penyebaran fungsi dan manfaat RTH melalui media massa cetak dan elektronik (Green campaign)
- c) Pelibatan masyarakat dan swasta dalam program pengembang RTH
- d) Pelibatan Institusi pendidikan melalui program sekolah hijau dan kampus hijau
- e) Pemerintah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat yang telah berkontribusi nyata dalam membangun RTH.
- f) Pemerintah dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang telah menyediakan perkarangannya untuk “ daerah hijau” berupa keringanan pajak.
- g) Pemerintah juga dapat mengadakan program kemitraan dengan swasta terutama para pengembang dalam penyediaan RTH dengan program CSR, maupun PPP (Publik Private partnership)

E. Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Lingkungan strategis dunia yang berkembang dengan sangat pesat sejak berakhirnya Perang Dunia II telah mendorong bangsa-bangsa di dunia bersaing dengan ketat dalam mengejar dan mempertahankan kemakmurannya. Berbagai strategi pembangunan diterapkan untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bersamaan dengan itu tidak dapat dipungkiri bahwa sumberdaya alam baik di laut maupun di darat akan mengalami tekanan pemanfaatan yang berlebihan. Apabila pemanfaatan ini melampaui daya dukungnya, tentu akan menimbulkan masalah lingkungan baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun global.

(Salim,1993:184-185) melalui pendekatan ekologi mengemukakan hubungan antara konsep pembangunan berkelanjutan dan konsep berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional mungkin yang berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup, yaitu *eco-development*. Pendekatan ini tidak menolak diubah dan diolahnya sumber alam untuk pembangunan dan kesejahteraan manusia. Tetapi “kesejahteraan manusia” mengandung makna lebih luas, mencakup tidak hanya kesejahteraan materiil, pemenuhan kebutuhan generasi saatini, tetapi juga mencakup kesejahteraan nonfisik, mutu kualitas hidup dengan lingkungan hidup yang layak dihidupi (liveable environment) dan jaminan bahwa kesejahteraan terpelihara kesinambungannya bagi generasi mendatang.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Dalam pembangunan berkelanjutan minimal ada tiga aspek yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, dengan mengelola lingkungan dan sumberdaya alam secara efektif dan efisien dengan yang berkeadilan perimbangan modal masyarakat, pemerintah dan dunia usaha;
- b. Keberlanjutan sosial budaya, dengan pembentukan nilai – nilai sosial budaya baru serta peranan pembangunan yang berkelanjutan terhadap iklim politik dan stabilitasnya;
- c. Keberlanjutan kehidupan lingkungan (ekologi) manusia dan segala eksistensinya untuk keselarasan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan (Suweda, 2011).

Menurut (Keraf,2010), dalam menjamin agar ketiga aspek pembangunan diatas terpenuhi, ada dua prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang harus diperhatikan, yaitu :

- 1) Prinsip demokratis, yaitu menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat. Pembangunan merupakan implementasi aspirasi dan kehendak masyarakat demi kepentingan masyarakat, adanya partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan, akses informasi yang jujur dan terbuka serta akuntabilitas publik.
- 2) Prinsip keadilan, menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan produktif serta ikut dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. prinsip keadilan menuntut agar ada distribusi manfaat dan beban secara proporsional antara semua orang dan kelompok masyarakat.

F. Green City

Kota hijau (Green City) adalah kota yang sehat secara ekologis. Kota hijau harus dipahamisebagai kota yang memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi,mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatanlingkungan, dan menyinergikan lingkungan alami dan buatan.seperti yang diungkapkan (S.Ernawi,2012):

“Kota hijau masa depan (*future green cities*) dapat terwujud jika kota-kota yang saat ini tengah dalam masa inisiasi sebagai kota hijau dapat mengakomodasi prinsip-prinsip kota hijau, contohnya dengan diakomodasinya target pencapaian RTH sebesar 30% dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kotanya. Kota hijau yang kita cita-citakan ini adalah kota masa depan milik generasi penerus. Hal ini sejalandengan harapan semua masyarakat untuk mulai mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang”.

Di seluruh dunia, kota hijau atau *green city* telah menjadi model pengembangan perkotaan yang baru, baik di benua Amerika, Asia, Eropa, Australia, maupun Afrika. Fenomena yang sama juga dialami oleh Indonesia. Maka perlu di deklarasikan bahwa dampak perubahan iklim di Indonesia bukan hanya dihadapi melalui bidang kehutanandengan REDD+ atau pengembangan lahan gambut, tetapi sekarang juga melalui pengembangan kawasan seperti entitas perkotaan, dengan konsep *Green City*. Inimerupakan tantangan baru dan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia, terlebih karenalebih dari 52% penduduk nasional mendiami kawasan perkotaan. Indonesia saat ini fokus pada penanganan daerah perkotaan yang sangat rentan mengalami dampak perubahan iklim. Selain upaya-upaya mitigasi di bidang kehutan atau yang lebih dikenal dengan program REDD+, pengembangan gambut atau peatland management, saat ini telah terdapat upaya yang lebih struktural dalam bidang adaptasi perkotaan. Banyak fakta menggambarkan rentan dan sensitifnya daerah perkotaan dalam menghadapiperubahan iklim.

Green City merupakan salah satu konsep pendekatan perencanaan kota yang berkelanjutan. *Green City* juga dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan suatu

kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait atau *stakeholders*. (Direktorat jendral penataan ruang kementerian pekerjaan umum).

Diungkapkan (Manik,2009). Fenomena pemanasan bumi, degradasi kualitas lingkungan dan bencana lingkungan telah membangkitkan kesadaran dan tindakan bersama akan pentingnya menjaga keberlanjutan air bersih dan udara sehat di kota. Kota dengan berbagai aktivitasnya memerlukan udara sejuk, yang dapat terpenuhi, jika tersedia areal untuk hutan kota, ruang terbuka dan taman kota serta dilakukan penghijauan di pekarangan permukiman dan perkantoran. Akan tetapi, banyak kota yang hanya mengejar bangunan fisik sehingga menjadi gersang karena yang tumbuh adalah pohon-pohon tembok atau beton

Terdapat delapan atribut untuk mewujudkan kota hijau yang disampaikan (Imam S. Ernawi:2012) dalam buku Pandauan Program Pengembangan Kota Hijau. Yang pertama adalah perencanaan dan perancangan kota (*Green Planning and Design*), yang bertujuan meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan rancang kota yang lebih sensitif terhadap agenda hijau, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kemudian yang ke dua adalah pembangunan ruang terbuka hijau (*Green Open Space*) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH sesuai dengan karakteristik kota/kabupaten, dengan target RTH 30%. Selanjutnya yang ketiga adalah Green Community, yaitu pengembangan jaringan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang sehat. Yang ke

empata adalah pengurangan dan pengolahan limbah dan sampah (*Green Waste*), dengan menerapkan zero waste. Yangke lima adalah pengembangan system transportasi berkelanjutan (*Green Transportation*) yang mendorong warga untuk menggunakan transportasi publik ramah lingkungan, serta berjalan kaki dan bersepeda dalam jarak pendek. Yang keenam adalah peningkatan kualitas air (*Green Water*) dengan menerapkan konsep eko drainase dan *zero runoff*. Lalu yangke tujuh adalah *Green Energy*, yaitu pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, ke delapan, adalah *Green Building*, yaitu penerapan bangunan hijau yang hemat energi. *Green waste*, *green transportation*, *green water*, *green energy*, dan *green building* merupakan atribut yang sering kita sebut sebagai *green infrastructure*. Keseluruhan atribut kota hijau tersebut tidak berdiri sendiri, namun merupakan satu kesatuan yang integral, termasuk dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal sebagai dampak ikutan dari perwujudan masing-masing atribut. (Joga dan Ismaun, 2011) mengungkapkan kota sebagai pusat peradaban kehidupan dan kebudayaan manusia terus berbenah diri menuju kota hijau (*green city*)

Misi kota hijau sebenarnya tidak hanya sekedar ‘menghijaukan’ kota. Lebih dari itu, kota hijau dengan visinya yang lebih luas dan komprehensif, yaitu Kota yang Ramah Lingkungan, memiliki misi antara lain memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan Mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan baik secara lingkungan, sosial dan ekonomi secara seimbang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dengan metode penelitian akan didapatkan data dan informasi yang mendukung analisa dalam penelitian ini. Jadi metode penelitian merupakan pedoman atau cara dalam melakukan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis agar dapat memperoleh hasil yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumen resmi instansi terkait dan penelusuran online. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive* (*sengaja*) yaitu:

- 1) 3 Pejabat pemerintah terkait; Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu, BAPPEDA Kota Batu, Forum Komunitas Hijau Kota Batu.
- 2) 4 Warga masyarakat sekitar taman dan jalur hijau di kota Batu.

Sedangkan informan penelitian meliputi:

- a. Bapak Matali (Kepala Bidang Pertamanan dan PJU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu)
- b. Bapak Didit (Staf Ahli Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu)
- c. Ibu Reni (Bidang Program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu)
- d. Bapak Stefen (Ketua Forum Komunitas Hijau Kota Batu)
- e. Bapak Surya (Bidang Sarana dan Prasarana BAPPEDA kota Batu)
- f. (Bapak Dion, Bapak Epan, Bapak Giman dan Bapak Edo) Warga Masyarakat sekitar Taman dan Jalur Hijau Kota Batu .

Dimaksudkan untuk menggambarkan Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mewujudkan Green City di Kota Batu . Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya akan mendiskripsikan fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Karena di penelitian ini tidak akan di temukan analisis data yang bersifat statistik seperti penelitian kuantitatif.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Menurut (Sugiyono, 2012:15) metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang akan di teliti ini maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mewujudkan Green City
 - a. Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Batu.
 - b. Program Pembangunan Kota Hijau (P2HK) sebagai upaya mewujudkan Green City.
 - c. Strategi Pengelolaan RTH Taman dan Jalur Hijau untuk mewujudkan Green City
 - d. Analisis SWOT Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Batu.
 - e. Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Kota Hijau
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik dalam mewujudkan Green City.
 - a. Faktor pendukung: Regulasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik, Masyarakat yang paham akan pentingnya Green City
 - b. Faktor Penghambat: Anggaran Dana Program, Kerja sama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penentuan lokasi dan situs penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan terhadap proses pengambilan data. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mengetahui kejadian sebenarnya dari objek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Publik untuk mewujudkan Green City (Studi pada Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu) maka penelitian dilakukan di Kota Batu.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang tepat tentang berbagai fenomena pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Batu. Penelitian yang dilakukan di Kota Batu ini karena peneliti melihat adanya ketidaksesuaian pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Batu. Selain itu, alasan dari pemilihan lokasi dan situs penelitian tersebut karena Pemerintah Kota Batu dianggap memiliki data yang paling lengkap mengenai objek penelitian dimana terdapat Badan dan Dinas yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang diteliti. Dalam hal ini adalah ,Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu, FKH (Forum Komunitas Hijau), serta Badan dan Dinas lainnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan sebagainya,(Moleong,2012:157). Sumber data yang dimaksud:

1. Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh langsung di lapangan dari aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Batu. Sumber data primer yaitu :

- a. Kepala bidang Pertamanan dan PJU, staf ahli dan staf program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu bidang Pertamanan dan PJU.

- b. Staf bidang Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kota Batu.
- c. Ketua Forum Komunitas Hijau Kota Batu
- d. Dan juga dari kalangan masyarakat yang dapat dijadikan narasumber dan ada relevansinya dengan penelitian yang terlibat langsung dalam menjaga dan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh bukan dari pengamatan langsung tetapi dapat berupa dokumen, catatan arsip serta laporan-laporan resmi yang berhubungan dengan Strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Dengan demikian yang akan dijadikan sebagai sumber data sekunder adalah:

- a. Dokumen Formal maupun non formal yang dimiliki narasumber (masyarakat setempat) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu.
- b. Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Forum Komunitas Hijau Kota Batu yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik.
- c. Arsip-arsip yang berhubungan dengan upaya perencanaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kota Batu yang diperoleh dari Badan serta Dinas yang terkait.
- d. Selain dari pada itu dalam mendapatkan data, peneliti akan secara langsung melihat keadaan sarana prasarana Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di kota Batu.

- e. Data sekunder juga dapat bersumber dari perpustakaan Universitas Brawijaya serta situs-situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data guna melengkapi dan menunjang validitas data, penulis menggunakan beberapa teknik. Teknik pengumpulan data tersebut adalah:

1. Observasi (pengamatan) yaitu dengan cara mengamati secara langsung terhadap segala fenomena yang terjadi di lapangan sehingga mampu memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan focus dan tema penelitian
2. Interview (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan/tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten serta mampu memberikan keterangan tentang segala informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan. interview terdiri dari 8 informan terdiri dari 3 orang dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu, 1 orang dari BAPPEDA, 1 orang dari Forum Komunitas Hijau dan 4 warga masyarakat sekitar taman dan jalur hijau Kota Batu.
3. Dokumentasi yaitu data yang bersumber dari data-data yang tertulis, dokumen-dokumen, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan serta laporan resmi lainnya.

4. Fieldnote (catatan lapangan) yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber atau informan pada saat wawancara yang berupa catatan sederhana yang kemudian diolah menjadi data yang matang dan berguna.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian. Berkaitan dengan kegiatan penelitian tersebut maka instrument penelitian yang digunakan adalah

1. Peneliti

Dalam penelitian,peneliti adalah instrument utama yang berfungsi sebagai penggali data,baik itu melalui wawancara,obeservasi dari dokumen-dokumen yang tersedia

2. Interview guide (pedoman wawancara) yaitu pedoman yang digunakan peneliti dalam melakukan wawancara yang dapat berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden
3. Alat-alat tulis yang menunjang kegiatan pencatatan dan pengambilan data.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan dengan mennggunakan langkah yang tepat,yang sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan. Langkah-langkah analisis data menurut Milles & Huberman dalam Sugiyono (2012:338-345) adalah:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan penabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

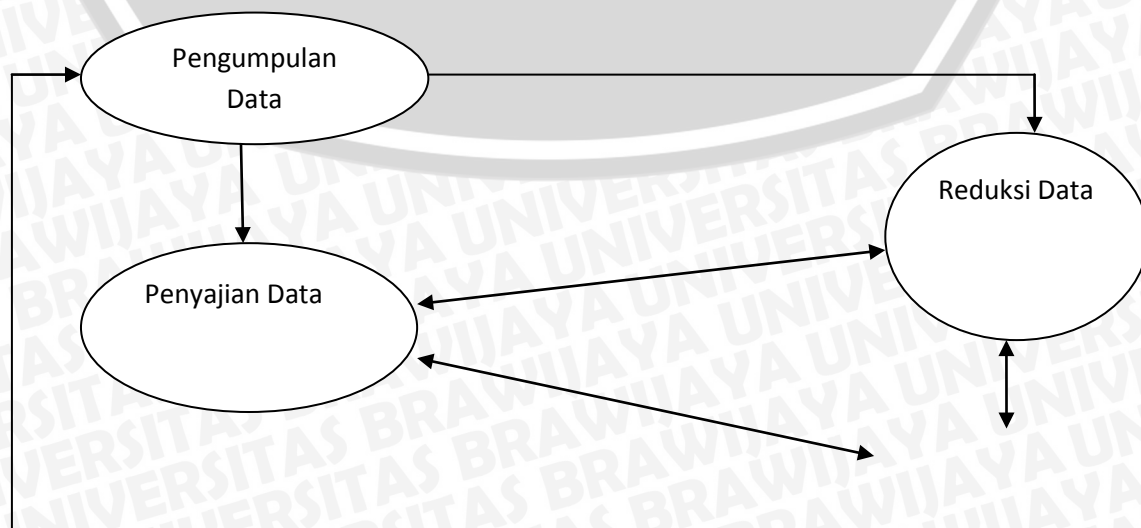
3. Penyajian Data

Penyajian data (display data) dimasukkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian- bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotetsis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

Gambar 1.Komponen-Komponen Analisis Data : Miles dan Huberman



Sumber Data: Miles dan Huberman (1983) yang dikutip dalam Sugiyono (2012:338)

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu

Secara astronomis, Kota Batu terletak pada posisi $122^{\circ}17'$ - $122^{\circ}57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'$ - $8^{\circ}26'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 19.908,72 Ha atau 0,42 % dari total luas Jawa Timur. Bentang wilayahnya berupa bukit, gunung, jurang terjal dan daerah dataran dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Secara administratif, Kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji yang terinci dari 20 Desa, 4 Kelurahan. 226 RW dan 1.059 RT. Dari wilayah seluas 19.908 Ha tersebut, terbagi Kecamatan Batu seluas 4.545,81 Ha, Kecamatan Junrejo seluas 2.565,02 Ha dan Kecamatan Bumiaji 12.797,89 Ha.

Kota Batu mempunyai 4 (empat) jenis tanah antara lain : (1) Andosol, berupa lahan yang paling subur, meliputi Kecamatan Batu (1.831,04 Ha), Kecamatan Junrejo (1.526,19 Ha) dan Kecamatan Bumiaji seluas (2.873,89 Ha).

(2) Kambisol, berupa tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu (889,31 Ha), Kecamatan Junrejo (741,25 Ha), Kecamatan Bumiaji seluas (1.395,81 Ha). (3) Alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu (239,86 Ha), Kecamatan Junrejo (199,93 Ha) dan Kecamatan Bumiaji seluas (376,48 Ha). (4) Latosol meliputi Kecamatan Batu seluas (260,34 Ha), kecamatan junrejo seluas 9217,00 Ha) dan Kecamatan Bumiaji seluas (408,61 Ha).

Sebagaimana layaknya daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kota Batu mengikuti putaran perubahan 2 (dua) iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada Tahun 2006, musim hujan dimulai pada bulan September diakhiri bulan Juni dengan kondisi cuaca relatif kering dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan jumlah curah hujan maupun hari hujan mengalami penurunan. Menurut sumber dari Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu, rata-rata curah hujan mencapai 97,5 mm/bulan dari hari hujan pertahun sebanyak 128 kali. Tingkat kelembaban Kota Batu hampir sama dengan rata-rata daerah lainnya di Jawa Timur, yaitu berkisar 30 % (minimum) pada bulan Oktober dan bulan Januari, sedangkan pada bulan Februari dan bulan Agustus tingkat kelembabannya sebesar 98 % (maksimum). Kecepatan angin mencapai 10,73 Km/jam.

Bentang Geografi Kota Batu berupa perbukitan dan pegunungan, dengan ketinggian (kurang lebih) 800 meter di atas permukaan laut dan berada di lingkungan gunung Panderman 92.010 m) dan Gunung Welirang atau Kemukus (3.156 m). Desa Oro-oro Ombo Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Tlekung dan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo serta hampir seluruh desa di

kecamatan Bumiaji, Bulukerto, Gunungsari, Punten, Tulungrejo, Sumergondo dan Desa Giripurno berelief terjal. Serdangkan desa/kelurahan lainnya relatif datar. Kondisi demikian, menjadikan Kota Batu berhawa sejuk dengan suhu udara berkisar antara 17-25° Celcius.

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah tentunya tetap mempertimbangkan filosofi pembangunan Kota Batu yaitu **"HAKARYO GUNO MAMAYU BUWONO"** merupakan sesanti yang bermakna **Berkarya Guna Membangun Negera** yang secara kontekstual tertera pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Hari Jadi dan Lambang Daerah Kota Batu. Filosofi tersebut sebagai perwujudan dari tekad pemerintah dan masyarakat Kota Batu yang senantiasa bekerja keras, pantang menyerah dan selalu menjaga keserasian hubungan antar manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan mengacu landasan filosofi itu, maka konteks tata kelola pemerintahan Kota Batu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Partisipatif, setiap warga Batu mempunyai hak untuk bersuara dalam proses pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang disalurkan melalui intermediasi institusi dan legitimasi lewat sistem perwakilan. Partisipasi tersebut, dibangun atas dasar kebebasan berbicara dan berpendapat untuk selanjutnya secara konstruktif diakomodasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, karena menyadari bahwa pemerintah dan pembangunan adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, maka rakyat harus dilibatkan

dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai kepada tahap pemeliharaan.

- b. Asas Transparansi, salah satu indikator pemerintahan yang baik adalah bersifat transparan terhadap rakyatnya, sehingga rakyat dapat mengetahui secara jelas setiap perumusan urgensi kebijakan publik, pelaksanaan sampai pada proses pertanggungjawaban. Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. transparansi disini, juga mengandung arti terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dinilai terhadap persoalan.
- c. Asas Kepastian / Aturan Hukum (*Rule of Law*), *Rule of Law* mengandung arti bahwa pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang sudah melembaga dan diketahui oleh masyarakat, serta memiliki kesempatan untuk dievaluasi. Upaya tersebut sangat penting untuk dilakukan, di era reformasi seperti ini karena tanpa keterlibatan dunia usaha dan masyarakat proses pembangunan perekonomian daerah nasional pertumbuhannya kurang maksimal.
- a. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Mengandung arti bahwa setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

harus tetap perpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, menciptakan keseimbangan dan keserasian serta pengawasan.

- b. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaku pembangunan.
- c. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan nilai-nilai, etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Asas akuntabilitas, adalah salah satu asas yang menyatukan bahwa setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sejalan dengan filosofi Kota Batu tersebut dan capaian hasil pembangunan selama 5 (Lima) tahun sebelumnya, yang kondisinya maka perlu adanya konsep-konsep sehingga pembangunan kedepan terarah dan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah periode 2012-2017. Visi dan Misi Pembangunan Daerah tersebut selain merupakan penjabaran dari Visi Walikota pada saat kampanye juga mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional, diharapkan arah pembangunan Kota Batu sinergi arah Pembangunan Nasional.

Periode tahun 2012-2017, Visi Pembangunan Kota Batu adalah :

**"KOTA BATU SENTRA PERTANIAN ORGANIK
BERBASIS KEPARIWASATAAN INTERNASIONAL".**

Periode tahun 2012, Misi pembangunan Kota Batu adalah:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama
2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

3. Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik
4. Meningkatkan Posisi Peran Dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional
5. Optimalisasi Pemerintahan Daerah
6. Peningkatan Kualitas Pendidik
7. Lembaga Pendidikan
8. Peningkatan Kualitas Kesehatan
9. Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah , Fasilitas Publik, Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas
10. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
11. Menciptakan Stabilitas Dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang Harmonis Dan Demokratis
12. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Dan UKM

Ditunjang Oleh Pendidikan Yang Tepatguna dan Berdaya Saing

a. Kota Batu Sebagai Kota Sentra Pariwisata

Berdasarkan kondisi alamnya, maka Kota Batu dijadikan sebagai Kota Sentra Wisata bukan tanpa dasar. Jika dicermati lebih mendalam, Kota Batu memiliki kekayaan dan potensi yang tidak oleh daerah-daerah lainnya khususnya di Propinsi Jawa Timur. Potensi tersebut juga dikembangkan melalui pariwisata artifisial, Wisata

Budaya dan Wisata Agronomi. Keadaan itulah yang membuat Kota Batu banyak diminati oleh wisatawan baik domestik maupun wisata manca negara. Namun

demikian, kekayaan dan potensi alam tersebut belum digarap secara optimal sehingga perlu mendapatkan perhatian secara serius semua pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, kiranya sudah cukup alasan yang sangat kuat untuk meningkatkan pososo Kota Batu menuju Sentra Pariwisata.

b. Berbasis Pertanian

Untuk mewujudkan Kota Batu sebagai Senjtra Pariwisata yang berdaya saing tinggi, maka perlu didukung sektor pertanian, khususnya tanaman hortikultura yang mempunyai spesifikasi tersendiri dan tidak dimiliki daerah lainnya. Didukung tanahnya yang subur, udara bersih, sejuk dan panorama yang indah semakin memperkuat daya tarik untuk mengembangkan sektor pertanian, yang pada gilirannya akan dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

c. Pemerintahan yang Kreatif, Inovatif dan Bersih

Untuk mewujudkan Kota Batu sebagai sentra Pariwisata, maka perlu didukung dengan manajemen pemerintah byang kreatif, inovatif dan bersih, artinya manajemen yang didasarkan atas konsep-konsep pembaharuan dan krteatifitas tinggi serta semangat kejujuran sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang bervariatif berwawasan perubahan yang positif.

Kreatif, artinya mampu untuk menciptakan gagasan/ide-ide baru yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan pembangunan Kota Batu, sehingga hasilnya (*output*) berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan semakin ketatnya persaingan antar daerah.

Inovatif, adalah suatu kemauan dan kemampuan untuk selalu melakukan perubahan dari yang ada menjadi lebih baik dari yang tidak ada menjadi ada serta berorientasi ke depan.

Bersih, dengan maksud terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, dalam arti "patuh" (*compliance*) kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kondisi demikian, akan memunculkan dan menambah wibawa serta meningkatkan kepercayaan(*trust*) masyarakat kepada aparaturnya pemerintahan sehingga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan semakin optimal).

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu.

Kota Batu yang terbentuk pada tahun 2001 ini adalah salah satu bentuk dari pemerintahan yang awal mulanya sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, diantaranya berupa pelimpahan wewenang dari Pusat kepada Daerah. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan pelaksanaan urusan wajib dalam perencanaan pembangunan di Kota Batu, khususnya terkait dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan, maka dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu. Oleh karena itu sebuah daerah yang menerapkan sistem desentralisasi atau otonomi daerah ini membentuk sebuah badan perencanaan yang mengatur segala bentuk perencanaan pembangunan. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 41 Tahun 2007, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu perencanaan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan instansi pemerintah yang mengatur perencanaan pembangunan daerah dan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selain itu hal ini juga menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, BAPPEDA perlu membentuk sebuah struktur organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

a. Visi-Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu

1. Visi BAPPEDA Kota Batu

Visi BAPPEDA Kota Batu Tahun 2012-2017 adalah "Terwujudnya Perencanaan yang Terpadu, Terukur, Partisipatif, dan Berkelanjutan".

2. Misi BAPPEDA Kota Batu

Dalam rangka mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Pengembangan BAPPEDA pada tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, tepat waktu, dan partisipatif berbasis keunggulan lokal;

- b) Mengembangkan kapasitas organisasi perencanaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan bersih;
- c) Meningkatkan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- d) Peningkatan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi seluruh stakeholder Kota Batu dalam Perencanaan Daerah;
- e) Peningkatan pengendalian pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan dengan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RTRW Kota Batu dan RDTRK.

b. Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Batu

Adapun tugas dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota BATu berdasarkan Rencana Kerja BAPPEDA tahun anggaran 2012, sebagai berikut:

a) Tugas pokok BAPPEDA Kota Batu

BAPPEDA Kota Batu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

b) Fungsi BAPPEDA Kota Batu

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPEDA Kota Batu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Bidang-Bidang Kegiatan BAPPEDA Kota Batu

1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Batu

BAPPEDA sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Batu terdiri dari :

- a) Kepala Badan
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sekretaris
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c) Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Kepala Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
 3. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- d) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

3. Sub Bidang Sosial Budaya

e) Bidang Perencanaan Ekonomi, terdiri dari:

1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
2. Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian
3. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

f) Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

1. Kepala Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan
2. Sub Bidang Data dan Pelaporan
3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

3. Gambaran Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu

a. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a) Perumusan, penyusunan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang ciptakarya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan PJU serta Pemadam Kebakaran (PMK);
- b) Penyusunan dokumen anggaran;
- c) Penyelenggaraan urusan di bidang ciptakarya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan PJU serta Pemadam Kebakaran dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;

- d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ciptakarya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan PJU serta PMK;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pembangunan di bidang keciptakaryaan, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan PJU serta Pemadam Kebakaran diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait ;
- f) Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi;

b. Tugas dan Fungsi Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang tata bangunan dan perumahan, permukiman, penyehatan lingkungan dan air minum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang;
- b) Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pembangunan permukiman;
- c) Pelaksanaan, pembinaan dan pengaturan serta pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman;
- d) Pelaksanaan, pembinaan dan pengaturan serta pengendalian pembangunan sarana air minum, sanitasi dan drainase di perkotaan dan pedesaan;

- e) Pelaksanaan, pembinaan dan pengaturan serta verifikasi teknis bangunan gedung pemerintah;
- f) Pengelolaan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi;
- g) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h) Pelaksanaan dan bantuan teknis perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan serta sarana dan prasarana lingkungan;
- i) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan dan permukiman;
- j) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis tentang pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana air bersih serta penyehatan lingkungan;
- k) Pengaturan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman;
- l) Pelayanan informasi pembangunan perumahan dan permukiman;
- m) Pembinaan atas pengaturan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana air bersih, sampah, air limbah serta pemberian rekomendasi izin prinsip tata ruang dan izin mendirikan bangunan (IMB);
- n) Pembinaan atas pengaturan, pengawasan pengelolaan, penataan pembangunan perumahan dan bangunan umum di lingkungan perumahan baru serta melaksanakan bantuan teknis pembangunan lingkungan permukiman;

- o) Pelaksanaan pembinaan atas pengaturan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung rumah negara, bangunan umum beserta lingkungannya;
- p) Pelaksanaan pengkajian, penelitian mengenai permohonan ijin prinsip tata ruang dan rekomendasi ijin mendirikan bangunan;
- q) Pelaksanaan pemberian bantuan tenaga teknis dalam pembangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya pada lingkup bangunan yang menjadi kewenangan kota;
- r) Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan konservasi serta revitalisasi pemanfaatan bangunan gedung;
- s) Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan peran serta pelaku pembangunan di bidang teknik pembangunan permukiman;
- t) Pelaksanaan pembinaan teknis atas ketertiban dan keselamatan bangunan umum di daerah;
- u) Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi, konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah;
- v) Pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan evaluasi di bidang teknik pembangunan permukiman;
- w) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan program dan kegiatan bidang;
- x) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi;

c. Tugas dan Fungsi Bidang Tata Ruang

Bidang tata ruang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi bidang perumahan, penyehatan lingkungan permukiman dan air bersih, tata ruang dan tata bangunan serta teknologi dan jasa konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang;

- a) Penyusunan kebijakan teknis bidang perumahan, penyehatan lingkungan permukiman dan air bersih, tata bangunan dan teknologi serta jasa konstruksi dan tata ruang;
- b) Pelayanan informasi penataan ruang;
- c) Pelaksanaan pembinaan, pemanfaatan, serta pengawasan teknologi dan pengendalian tata ruang;
- d) pengelolaan kebijaksanaan teknis pemetaan dalam rangka penataan ruang;
- e) Pelaksanaan pemantauan dan penyuluhan di bidang penataan ruang;
- f) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

d. Tugas dan Fungsi Bidang Kebersihan

Bidang Kebersihan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi, melaksanakan, mengendalikan program dan kegiatan bidang kebersihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang;
- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan di bidang kebersihan;
- c) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan serta operasional kegiatan penampungan, pengangkutan, pemanfaatan dan pembuangan sampah serta limbah;
- d) Pengendalian kebersihan lingkungan pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan limbah;
- e) Penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan serta Tempat Pengolahan Akhir (TPA);
- f) Pelaksanaan sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan;
- g) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana kebersihan;
- h) Pelaksanaan penarikan dan penyetoran retribusi kebersihan lingkungan;
- i) Pemantauan dan pengevaluasian serta pelaporan pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan kebersihan;
- j) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
- k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

e. Tugas dan Fungsi Bidang Pertamanan dan PJU

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaksanakan, mengendalikan program dan kegiatan bidang pertamanan dan penerangan jalan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang;
- b) Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan serta pengembangan di bidang pertamanan, keindahan kota, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan serta pengembangan di bidang Pertamanan, keindahan kota permukiman dan penerangan jalan umum;
- d) Pelaksanaan pembinaan dan penggerakan partisipasi masyarakat di bidang
- e) Pertamanan, keindahan kota, pemakaman dan penerangan jalan umum pengelolaan administrasi keuangan, retribusi dan pungutan lain yang sah;

- f) Pelaksana pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang Pertamanan, keindahan kota, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- g) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

f. Tugas dan Fungsi UPT Pemadam Kebakaran

Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pemadam kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan bangunan permukiman penduduk;
- b) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yang meliputi pengendalian penjaralan api, pencarian sumber api, pemadaman api dan penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
- c) pelaksanaan pembinaan kesiapsiagaan semua unsur pasukan pemadam kebakaran;
- d) pelaksanaan pemantauan lokasi-lokasi rawan kebakaran dan pelaksanaan pencegahan bahaya kebakaran;
- e) pelayanan kepada masyarakat untuk pemadam kebakaran dan pemberian rekomendasi terhadap penempatan dan penggunaan alat-alat pemadam kebakaran;

- f) pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan alat pemadam kebakaran pada kantor pemerintah dan swasta;
- g) pelaksanaan penyuluhan, penerangan, pengarahan, pembinaan, bimbingan, serta motivasi kepada masyarakat dalam menanggulangi dan atau mencegah bahaya kebakaran;
- h) penyusunan standarisasi penanggulangan bahaya kebakaran;
- i) penyiapan mobil PMK beserta peralatan pemadam kebakaran lainnya;
- j) pelaksanaan inventarisasi mobil PMK beserta peralatan pemadam kebakaran lainnya sebelum dan setelah tindakan pemadam kebakaran;
- k) pemeliharaan mobil PMK, sarana dan prasarana pemadam kebakaran lainnya;
- l) pelaksanaan pengecekan rutin sarana dan prasarana pendukung lainnya sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- m) pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- n) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Gambaran Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum merupakan bagian dari Pemerintah Kota Batu dengan fungsinya sebagai Bidang yang menangani masalah-masalah maupun setiap kebutuhan dan kepentingan yang menyangkut bidang pelayanan pertamanan, pemakaman maupun penerangan jalan umum.

a. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) ada 2 seksi,
yaitu :

1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman

Seksi Pertamanan dan Pemakaman memiliki Tugas Merencanakan, mengelola, membina, memantau dan mengendalikan serta mengevaluasi pemanfaatan kawasan pertamanan dan pemakaman, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana program kegiatan seksi
- b) Pendataan dan pemetaan lokasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, taman kota, dan pemakaman
- c) Pemeliharaan dan perawatan tanaman pada jalan daerah, ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, taman kota dan pemakaman.
- d) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKT), taman kota dan pemakaman
- e) Pelaksanaan analisis permasalahan pemanfaatan kawasan makam dan taman
- f) Pendataan dan inventarisasi barang milik daerah berupa taman dan makam beserta kelengkapannya
- g) Pelaksanaan teknis operasional penagihan restribusi daerah pada seksi pertamanan dan pemakaman
- h) Pendataan jumlah wajib restribusi dan beserta penerimaan restribusi seksi pertamanan dan pemakaman, serta administrasi restribusi

- i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum sesuai tugas dan fungsinya

2.Seksi Keindahan Kota dan Penerangan Jalan Umum (PJU)

- a) Menyusun Kegiatan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala PJU
- b) Menyusun Kegiatan Pengadaan Dan Pembangunan PJU
- c) Melakukan Pendataan Dan Pemetaan Lokasi Kebutuhan PJU
- d) Melaksanakan Analisis Permasalahan Pemanfaatan Pju Dan Titik Keindahan Kota
- e) Melaksanakan Fasilitasi Pembangunan Dan Pengembangan PJU Dan Titik Strategis Keindahan Kota
- f) Melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah Dan Peralatan PJU
- g) Melakukan Pembinaan Teknis PJU Pada Masyarakat
- h) Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan PJU
- i) Memproses Administrasi Pemeliharaan Rutin/Berkala PJU

b. Tujuan Pembangunan Bidang Pertamanan dan PJU

- a) Terwujudnya RTH yang estetik fungsional secara optimal sesuai dengan kebutuhan kota Batu;
- b) Terciptanya penataan ruang terbuka hijau kota Batu yang nyaman dan asri sesuai dengan fungsi estetika kota;
- c) Terciptanya penataan dan pengelolaan PJU yang hemat energy dan Lampu Hias Taman Kota sebagai elemen estetika kota;

- d) Terselenggaranya model kemitraan yang harmonis dengan kelompok masyarakat yang optimal;
- e) Terwujudnya penataan pengelolaan TPU sesuai peruntukannya.

c. Sasaran Pembangunan Bidang Pertamanan dan PJU

- i. Melaksanakan RTH secara optimal sesuai dengan peruntukannya;
- ii. Melaksanakan penataan taman-taman kawasan lainnya yang berfungsi sebagai pengendalian polusi dan menciptakan iklim mikro;
- iii. Melaksanakan penghijauan kota sebagai pengendali konservasi tanah dan air;
- iv. Melaksanakan penataan dan pengelolaan TPU yang sesuai dengan peruntukannya;
- v. Melaksanakan penataan pengelolaan reklame dan PJU sebagai elemen estetika kota;
- vi. Melaksanakan model kemitraan dengan kelompok masyarakat potensial.

d. Visi Bidang Pertamanan dan PJU

Sesuai dengan Visi Pembangunan Kota Batu TAHUN 2012-2017 adalah **“KOTA BATU SENTRA PERTANIAN ORGANIK BERBASIS KEPARIWISATAAN INTERNASIONAL”**, maka Visi Pembangunan Bidang Pertamanan dan PJU yaitu **“TERCIPTANYA KOTA BATU SEBAGAI KOTA WISATA INTERNASIONAL YANG INDAH DAN DINAMIS BERWAWASAN LINGKUNGAN”**.

e. Misi Pembangunan Bidang Pertamanan dan PJU

Misi Pembangunan dari Bidang Pertamanan dan PJU sesuai dengan Misi Kota Batu Tahun 2012-2017 adalah Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas

f. Kondisi bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU)

1. Data Taman yang dikelola oleh Bidang Pertamanan dan PJU

- a. Alun-alun Kota Batu
- b. Taman Hutan Kota Bondas
- c. Taman An Nuur
- d. Taman Tugu Adipura
- e. Taman Median Jalan Diponegoro
- f. Taman Ganesha
- g. Taman Kasiman
- h. Taman Median Jalan Dewi Sartika
- i. Taman Median Jalan Patimura
- j. Taman Diran
- k. Taman Imam Bonjol
- l. Taman Median Jalan Sultan Agung
- m. Taman Jalan Mawar
- n. Taman Jalan Wilis
- o. Taman Gabes
- p. Taman Tugu Batas Kota Dadaprejo
- q. Taman Tugu Batas Kota Pendem
- r. Taman Tugu Batas Kota Sebaluh/Pujon
- s. Taman Halaman Depan Kantor Walikota Batu
- t. Taman Halaman Belakang Kantor Walikota Batu

2. Data Pemakaman yang ditangani oleh Bidang Pertamanan dan PJU

- a. Makam Cina Beji
- b. Makam Kristen Gg. Karate

3. Data Penerangan Jalan yang ditangani oleh Bidang Pertamanan dan PJU sampai dengan Tahun 2014

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| a. PJU Terpasang Tahun 2002 – 2014 | : 2847 titik |
| PJU | |
| b. PJU Armatur Konvensional | : 2431 titik |
| PJU | |
| c. PJU Armatur LED | : 356 titik PJU |
| d. PJU Tenaga Surya | : 60 titik PJU |

4. Kendaraan Operasional Bidang Pertamanan dan PJU

- a. Pick up Operasional (Ford Ranger) : 1 unit
- b. Truck Tangki Air untuk menyiram taman : 2 unit
- c. Truck Tangga Hidrolis Telescopic : 2 unit
- d. Kendaraan Roda 3 Pengangkut sampah : 1 unit
- e. Sepeda Motor Pengawas Taman dan PJU : 4 unit

5. Sarana dan Prasarana Pendukung Bidang Pertamanan dan PJU

- a. PC Komputer : 4 unit
- b. Laptop : 1 unit
- c. Mesin Pemotong Rumput : 4 unit
- d. Gergaji Mesin : 1 unit
- e. Alat Ukur (Tang Amphere) : 3 unit
- f. Alat Ukur (Meteran Rol) : 2 unit
- g. Toollkits : 1 set
- h. Sabuk Pengaman : 1 unit

B. Penyajian Data

2. Strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mewujudkan *Green City*

a. Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Batu

Kota Batu adalah kota utama dalam pengembangan wisata di Jawa Timur.

Penataan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan kota berwawasan ekowisata di kota Batu dapat dijadikan contoh (model) bagi kota lainnya. Selain wisata keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangatlah penting bagi masyarakat kota Batu. Tidak hanya itu, RTH juga bisa menjadi daerah serapan yang mampu meminimalisasi potensi banjir. Selain berusaha memperluas ruang hijau publik, kesadaran masyarakat untuk mempertahankan maupun menambah ruang hijau privat pun akan diupayakan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Didit sebagai

Staf ahli Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang pertamanan dan PJU.memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pemkot batu bakal memetakan rencana ke depan terkait penanganan kawasan hijau tersebut. Luasan 30 persen rth, terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat. Nantinya kita berharap, hal tersebut harus menjadi komitmen bersama, baik pemerintah maupun masyarakat””(Hasil wawancara hari Kamis,11 September 2014 jam 08.38 di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu)

Saat ini, pemkot Batu masih memetakan sebaran ruang hijau yang masih eksis sekaligus strategi untuk mempertahankan maupun meningkatkan luasan lahan RTH publik.Sepeti yang dijelaskan pada table 1.2 mengenai Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Batu tahun 2010-2014

Tabel 1.2 Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik BerupaTaman dan Jalur Hijau Batu Tahun 2010-2014

Tahun	Luas RTH Publik Berupa Taman dan Jalur Hijau (m2)	%	Belum tercukupi
2010	24.290,00	2,6	27,4%
2011	533,00	0,03	27,37%
2012	7960,00	0,17	27,2%
2013	40.120,00	4,8	22,4%
2014	10.000,00	0,19	22,21%
Total	82.923,00	7,79	

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2014

Luas RTH publik Kota Batu 2010 sampai tahun 2014 adalah sebesar 82.923 m2 dari luas kota Batu 197.908 ha seperti yang terlihat dalam table 1.2 Kota Batu belum bisa memenuhi target RTH sebesar 30% (target RTRW kota Batu 2010-2030) dan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 dimana RTH yang harus tersedia adalah sebesar 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat,se sedangkan Tahun 2014 Kota Batu baru memenuhi RTH Publik sebesar 7,79 %. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota bidang Pertamanan dan PJU masih terus berusaha melakukan

penambahan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Batu. Salah satunya dengan terus membangun tamankota dan penambahan jalur hijau

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Matali sebagai Kepala bidang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU.meberikan pernyataan sebagai berikut:

“Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu sebenarnya sudah berusaha membebaskan lahan mas di beberapa wilayah kota Batu untuk dijadikan RTH publik, namun hal itu susah terwujud dikarenakan mahalnya harga tanah di kota Batu dan jumlah anggaran yang tidak cukup untuk membebaskan lahan tersebut..sehingga Progres RTH kota Batu menjadi sangat lambat”(Hasil wawancara hari Kamis,11 September 2014 jam 08.30 di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu)

Untuk itu, penyediaan RTH membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Batu mengingat saat ini penyediaan RTH di Kota batu belum mencapai target.Usaha-usaha untuk itu pun harus terus didukung.Misalnya usaha percepatan pembebasan tanah yang semuanya diperuntukkan untuk RTH, yang dicanangkan oleh walikota Batu.

Di tengah ketersediaan lahan yang terbatas di Kota Batu, yang memang menjadi kendala utama dalam peningkatan RTH, sangat diperlukan peran dan kerja sama yang baik dari pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menyadari pentingnya RTH dan bersama-sama pula berperan aktif berusaha mewujudkan target ideal RTH di Kota Batu. Mewujudkan Kota yang ramah lingkungan dan menjadikannya Kota Hijau harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya Pemkot kota Batu maupun pemerintah pusat, namun semua warga Kota Batu, sebagai sebuah komunitas harus dapat berkerja sama untuk mewujudkan Kota Hijau.

Hasil data terbaru yang dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU data RTH publik berupa taman dan Jalur hijau pada tahun 2010-2014 diperoleh bahwa luas RTH sampai tahun 2014 sekitar 7,79% sehingga untuk mencapai target luas RTH dalam RTRW masih kekurangan 22,21%.dapat dilihat dalam table 1.3 Data pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik berupa Taman dan jalur Hijau tahun 2010-2014

Tabel 1.3 Data Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik berupa Taman dan jalur Hijau 2010-2014

Tahun 2010		
No	Taman	Luas (M2)
1	Sultan Agung	12.406,00
2	Imam Bonjol	318,00
3	Tugu Apel	75,00
4	An-Nur	264,00
5	Tugu Adipura	26,00
6	Ganesha	90,00
7	Kasiman	369,00
8	Gerbang Pendem	315,00
9	Gerbang Dadaprejo	306,00
10	Gabes	254,00
11	Dewi Sartika	553,00
12	Alun-Alun	8992,00
13	JL Mawar	82,00
14	JL Patimura	240,00
	Jumlah	24.290,00
Tahun 2011		
No	Taman	Luas(M2)
1	Median Alun-Alun	128,00
2	Taman Diran Atas	85,00
3	Taman Batas Kota Payung	320,00
	Jumlah	533,00
Tahun 2012		
No	Taman	Luas(M2)
1	TMP Suropati	5.000,00
2	TPA Tlekung	2.640,00
3	Taman Batas Kota Payung	320,00
	Jumlah	7960,00

Tahun 2013		
No	Taman	Luas(M2)
1	Makam Cina	35.000,00
2	Taman Batas Kota Girpurno	120,00
3	Taman Wilis	5000,00
	Jumlah	40.120,00
Tahun 2014		
No	Taman	Luas(M2)
1	Taman Kenanga	10.000,00

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2014

Pemkot Kota Batu terus berupaya menambah taman dan jalur hijau di seluruh wilayah Kota Batu tetapi pada tahun 2014 taman dan Jalur Hijau yang sudah dibangun baru Taman Kenanga seluas 10.000 m² yang dibangun di desa Bulukerto menggunakan dana Program P2KH (Program Pembangunan Kota Hijau) dinas Pekerjaan Umum pusat sebesar 900juta sedangkan tahun 2010 Pemkot Batu berhasil membangun 14 Taman dan Jalur Hijau seluas total 24290 m² yang tersebar di wilayah kota Batu.

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030, pengelolaan RTH berada di kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang terdiri dari 4 bidang Cipta karya, Bidang Tata Ruang, Bidang Kebersihan, Bidang pertamanan dan PJU, 4 bidang tersebut dipimpin satu oleh kepala dinas yang dibantu oleh sekretaris kepala dinas.

Masalah utama dalam pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan RTH di kota Batu adalah keterbatasan jumlah SDM khususnya petugas lapang mengingat jumlah RTH publik dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi yang di oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Disamping itu keterbatasan jumlah SDM, masalah penataan ruang Ruang Terbuka Hijau terkendala sarana dan

prasarana pemeliharaan.kedua kendala tersebut juga terkendala oleh sumber anggaran Ruang Terbuka Hijau oleh pemerintah kota Batu.

b. Program Pembangunan Kota Hijau (P2HK) sebagai upaya mewujudkan *Green City*

P2KH merupakan program kolaborasi antara pemerintah kota/kabupaten dengan komunitas hijaunya sebagai pelaku utama. Program ini dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan mendapat bantuan teknis dan insentif dari pemerintah pusat.Pada tahap awal, prakarsa P2KH ini difokuskan pada 3 atribut kota hijau yaitu green planning and design, green open space dan green community. Pada tahap berikutnya, penanganan program dapat diperluas ruang lingkupnya pada 5 atribut kota hijau yang lain yaitu green transportation, green waste, green water, green energy dan green building.seperti yang di gambarkan pada table 1.4 mengenai tahapan program Kota Hijau

Tabel 1.4 Tahapan Program Pengembangan Kota Hijaukota Batu

2010	2014	2020
1. Green Planning Design	4. Green Building,	7. Green water,
2. Green Open space,	5. Green Waste,	8. Green transportation
3. Green Community	6. Green Energy	

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu 2014

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2010-2014 sudah ada 6 atribut yang sudah berjalan dalam program P2KH di kota Batu diantaranya yaitu green planning and design, green open space dan green community Green Building, Green Waste,

Green Energy. Salah satu alasan diadakan program P2KH adalah semakin berkembang pesatnya pembangunan didalam perkotaan. Hal ini ditandai makin maraknya pembangunan fasilitas fisik, seperti gedung bertingkat, kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, jalan, jembatan dan prasarana lain. Sayangnya perkembangan fisik tersebut kurang memperhatikan penghijauan.

Skenario pelaksanaan P2KH dibagi dalam empat tahapan. Yaitu tahap inisiasi, tahap implementasi, tahap replikasi, dan tahap institusionalisasi lintas sektor. Skenario ini, berlangsung untuk jenjang 2011-2014, dengan proyek awal di 60 kota/kabupaten dan diharapkan bisa di implementasikan di seluruh Indonesia pada 2014. Sebagai kota yang terpilih dalam P2KH, Kota Batu mendapat bantuan sebesar Rp1,5 miliar untuk tahap awal. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Rizky bagian Bidang Sarana dan Prasaran BAPEDDA. meberikan pernyataan sebagai berikut:

“Sasaran dalam program P2KH adalah terwujudnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30% (terdiri dari RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%) dengan delapan atribut kota hijau, yaitu Green Planning and Design, Green Openspace, Green Energi, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transpotation, dan Green Community dan untuk mengimplementasikannya pemkot batu diberi dana 1.5 milar”(Hasil wawancara hari Kamis, 11 September 2014 jam 01.30 di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu)

Gambar 1.1 8 Atribut Program Pengembangan Kota Hijau Kota Batu



Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu 2014

Dari 8 (delapan) atribut tersebut, Green Community menjadi salah satu

atribut yang penting, karena keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat yang utamanya dijaring melalui forum-forum komunitas, akan menjadi motor penggerak utama gerakan hijau di kota/kawasan perkotaan serta menjamin keberlanjutan program Kota Hijau di masa yang akan datang, secara bertahap dan berkelanjutan, Pemerintahan Kota Batu berusaha untuk mewujudkan Kota Hijau dengan delapan atributnya, yaitu:

1. Green Planning and Design (Perencanaan dan perancangan yang mendukung agenda hijau) : Dalam RTRW Tahun 2010-2030, KLHS Kota Batu memperhatikan ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau serta koridor hijau.
2. Green Open Space (Penambahan luasan RTH secara kuantitas menuju RTH 30%) : Dengan penambahan Taman Publik seperti : Taman Puspa Wilis, Taman Bulukerto, Taman Kota Stadion Barantas, Pembangunan Median lanjutan Sultan Agung, Taman Monumen Pesawat.
3. Green Energi (Hemat energy dan Energy terbarukan): Menerapkan dan memanfaatkan sumber energi yang ramah lingkungan atau energi baru seperti : Penggunaan Lampu Solar Cell untuk Penerangan Jalan Umum dan Taman Wilis, Penggunaan Microhydro di sungai brantas.
4. Green Water (reduce, reuse, recycle, recharge, recovery) : Dengan penerapan zero run off di taman publik dan perkantoran, menyiapkan PDAM siap minum di taman kota, pengendalian air limbah dan pencemaran terhadap air sungai.
5. Green Waste (reduce, reuse, recycle, refuse, repair): Pengelolaan sampah dengan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui Tempat Pembuangan Sampah Terbadu (TPST) yang tersebar di berbagai kecamatan, Bank-bank sampah serta pemberdayaan kelompok masyarakat dalam bentuk keterampilan daur ulang sampah (produk atau karya yang dibuat dapat dilihat pada acara festival daur ulang yang pernah diadakan adalah) Green Festival dan Pameran Produk Daur Ulang pada tanggal 23 November 2014 di alun-alun Kota Batu.

6. Green Building (Sertifikasi Bangunan Hijau): Pemerintahan Kota Batu telah memulai menerapkan konsep ramah lingkungan dengan meminimalisir penggunaan kayu sebagai bahan bangunan pada beberapa bangunan gedung dan akan terus dikembangkan pada masa yang akan datang.
7. Green Transportation (Memotivasi gaya hidup hijau, Sistem transportasi hijau, Manajemen lalu lintas, Mengurai simpul kemacetan) : Dengan merencanakan dan menerapkan transportasi yang berkelanjutan, membuat jalur khusus sepeda, jalur khusus pejalan kaki dan penataan pedestrian pada pintu masuk perbatasan Kota batu dan Malang.
8. Green Community (Membangun kepedulian masyarakat terhadap RTH dan Kota Hijau) : Meningkatkan partisipasi masyarakat atau komunitas untuk mewujudkan Kota Hijau yang saat ini tergabung dalam Komunitas-Komunitas Lingkungan dan FKMPL (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan)

Sumber : Forum Komunitas Hijau Batu 2014

Program Pengembangan Kota Hijau di Kota Batu memasuki tahap kedua setelah pelaksanaan di tahun 2012. Berdasarkan pelaksanaan di tahun 2012 tersebut, P2KH Kota Batu telah menyelesaikan pembangunan taman kota Wilis yang dulunya adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan pada tahun 2014 program P2KH sedang membangun taman bulukerto, Pemerintah Kota Batu melalui tim swakelola P2KH mencoba melaksanakan Program Pengembangan Kota Hijau dengan pelaksanaan dengan sosialisasi P2KH terhadap Forum Komunitas Hijau Kota Batu. Sosialisasi P2KH Kota Batu telah dilaksanakan oleh tim swakelola P2KH melalui 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Sosialisasi P2KH melalui program bersih-bersih jalur hijau dan taman kota yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2012
2. Acara Festival Daur Ulang yang dilaksanakan tanggal 23 November 2014. Acara sosialisasi ini dilaksanakan Forum Komunitas Hijau Kota Batu ditunjukan untuk masyarakat kota Batu lebih peduli dengan lingkungan.

Dengan telah terlaksananya sosialisasi P2KH kota Batu yang dilaksanakan dalam 2 kegiatan tersebut, maka diharapkan P2KH Kota Batu dapat lebih dikenal oleh masyarakat Kota Batu. Selain itu sebagai program pengembangan kota Hijau yang telah dikembangkan dapat terintegrasikan dan disadari pentingnya oleh stakeholder utamanya dari SKPD terkait sehingga akan semakin banyak program-program atribut hijau lainnya yang dikembangkan dan mendukung seluruh aspek pembangunan sehingga dapat mewujudkan *Green City* di kota Batu. Terdapat beberapa manfaat dan tujuan Kota Batu mengikuti Program P2KH dijelaskan dalam Tabel 1.5

Tabel.1.5 Tujuan dan Manfaat Kota Batu mengikuti program P2KH

TUJUAN DALAM P2KH	KEIKUTSERTAAN DALAM P2KH
Terwujudnya kota yang ramah lingkungan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui partisipatif	1. Dapat menciptakan lingkungan yang sehat 2. Dapat mewujudkan pencapaian sasaran RTH publik 20% sebagai salah satu atribut kota hijau, dan sekaligus meningkatkan partisipasi, wawasan, dan kesadaran komunitas 3. Menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap program RTH 4. Mendorong kreatifitas dari komunitas hijau 5. Meningkatkan partisipasi dari stakeholdert di kota Batu 6. Meningkatkan peran aktif dan kepedulian dari masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pengelolaan RTH 7. Meningkatkan kemitraan/peran swasta dalam pembangunan RTH 8. Terwujudnya meningkatkan peran Kota Batu sebagai kawasan penyangga sungai Brantas.

Sumber : Bappeda Kota Batu 2014

Namun, bukan tidak ada kendala dalam mewujudkan *Green City* di Kota Batu.ada beberapa permasalahan terkait dengan implementasi konsep dalam Program Pengembangan Kota Hijua.Kendala tersebut antara lain,kecenderungan perilaku masyarakat yang kontraproduktif dan destruktif, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya aspek lingkungan sehingga peran masyarakat dalam perwujudannya Kota Hijau masih tergolong rendah. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Desy bagian Program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Peningkatan jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu dan perkembangan kawasan perkotaan yang cenderung terus meningkat serta alihfungsi kawasan pertanian subur di pinggiran kota lalu meningkatnya ketergantungan pada kendaraan bermotor juga turut menjadi kendala besar bagi terlaksananya rintisan Program Pengembangan Kota Hijau ini”(Hasil wawancara hari Kamis,11 September 2014 jam 09.30 di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu)

Selain itu pada aspek ekonomi dan spasial, P2KH kota Batu menghadapi tantangan, yaitu tingginya pendanaan serta terbatasnya lahan dalam mewujudkan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas kota kota Batu yang 60% adalah Hutan atau Pegunungan membuat Pemerintahan Kota Batu harus membebaskan lahan milik warga untuk mencukupi Ruang Terbuka Hijau.Sebelumnya,Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selalu berupaya menambah RTH publik terus dilakukan. Pembebasan lahan, sebagai konsekuensi pembuatan RTH sejauh ini memang belum maksimal terlaksana.Seperti yang diutarakan Bapak Didit bagian staf ahli Dinas Cipta Karya dan Tata ruang meberikan pernyataan sebagai berikut:

“Dalam upaya merealisasikan Kota Hijau ini sebenarnya dibutuhkan dana yang cukup banyak, agar 8 atribut Kota hijau dapat terlaksana dan semakin menarik warga untuk hidup sehat,dana tersebut nantinya juga digunakan untuk merawat dan megelola taman yang sudah dibangun agar tetap terlihat bersih, selain itu sempitnya lahan kota batu membuat pemkot

berusaha membeli lahan-lahan milik warga untuk dijadikan RTH”(Hasil wawancara hari Selasa,16 September 2014 jam 09.30 di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu)

Dalam aspek tata kelola, P2KH Kota Batu menghadapi masalah yaitu masih rendahnya kerjasama dan koordinasi antar sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai leading sektor dalam team swakelola program P2HK, Bappeda tidak mempunyai kewenangan untuk membebaskan lahan untuk RTH tetapi Bappeda bekerja sama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, KLH, Dinas pertanian dan FKH untuk mewujudkan Green City.

c. Strategi Pengelolaan RTH Taman dan Jalur Hijau untuk mewujudkan Green City

Strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu melibatkan keputusan keputusan yang simultan. Sasaran jangka panjang dalam keberhasilan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Batu berkaitan dengan pelaksanaan secara kelembagaan, dengan demikian strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Batu yang mendukung strategi pengelolaan RTH Kota.

Masyarakat dan pemerintah, harus ikut berperan serta didalam menyelamatkan lingkungan melalui suatu gerakan pelopor lingkungan, dan membuat strategi mengenai lingkungan sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penghijauan pada lingkungan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Matali Kepala bidang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang pertamanan dan PJU. memberikan pernyataan sebagai berikut:

”Kita selalu membuat terobosan dalam upaya meningkatkan strategi pengelolaan RTH melalui alternatif pendekatan yang komprehensif dari

aspek keruangan (spasial), kelembagaan dan masyarakat sebagai pengguna dan mendapatkan manfaat dari RTH yang mempunyai fungsi ekologis, sosial dan estetika dalam rangka mengimplementasikan kebijakan RTH”(Hasil wawancara hari Kamis,11 September 2014 jam 09.30 di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu)

Startegi pengeloan RTH sebenarnya diharapkan didukung oleh aspek masyarakat, keruangan dan kelembagaan sehingga dapat membantu target pembangunan RTH publik sebesar 20% di kota Batu. Kegiatan pengeloan yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, meliputi : penyiraman, pemangkasan, pembersihan, maupun pergantian tanaman yang rusak atau mati, penyulaman, dan penanaman kembali. Mengingat pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau tersebut, maka diperlukan pengelolaan yang inovatif dan berkelanjutan. Sehingga kedepannya diharapkan Pemerintah Kota Batu senantiasa melakukan inovasi serta intensifikasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Didit staf ahli Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang pertamanan dan PJU. memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan dinas cipta karya dan tata ruang dalam pemeliharaan rth publik yang dikelola, antara lain kegiatan harian, bulanan dan tahunan salah satu kegiatannya adalah penyiraman, pemangkasan, pembersihan, maupun pergantian tanaman yang rusak atau mati, penyulaman, dan penanaman kembali”(Hasil wawancara hari Kamis,11 September 2014 jam 09.30 di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu)

Usaha pengelolaan RTH publik kota batu harus mengacu pada pemikiran bagaimana mengendalikan dan mengoptimalkan RTH publik yang telah ada berdasarkan kekayaan keanekaragaman hayati, terlebih mengingat RTH Kota Batu dapat menjadi sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat, dalam kaitannya meningkatkan kualitas perkotaan dan fungsi-fungsi penunjangnya

(ekonomi, sosial, estetika) sehingga setiap unit RTH Kota Batu dapat dioptimalkan demi menjaga, memelihara dan menciptakan ekosistem lingkungan kota berdasarkan azas manfaat, efektif dan efisien.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan RTH pemerintah kota Batu bersama dengan pihak terkait membuat suatu program antara lain : lomba penataan lingkungan antar kelurahan yang dimaksudkan untuk melihat sejauh mana ketertiban/respon masyarakat terhadap lingkungan. Taman lingkungan tidak harus dalam satu kawasan taman, namun dapat berupa dekorasi taman yang tertata di sepanjang jalan kampung dengan menggunakan tanaman dalam pot. Selain penyebaran tanaman melalui program “Gerakan Sejuta Pohon” merupakan gerakan yang direncanakan oleh Pemerintah dalam rangka menghidupkan perkotaan. Gerakan ini masih sedikit sekali pelaksanaannya. Oleh sebab itu pelaksanaannya perlu dioptimalkan.

Realisasi RTH di Kota Batu, sama dengan kota-kota besar di Indonesia lainnya, yaitu kendala sulitnya ruang bagi RTH. Kesulitan ruang diperkotaan seringkali disebabkan menjamurnya perumahan baru karena tingginya tingkat urbanisasi, keberadaan sektor informal, akibat peningkatan kepadatan penduduk yang sangat cepat, atau pentingnya tujuan pembangunan berkelanjutan yang lain, sehingga banyak areal RTH alih fungsi menjadi gunalahan yang lain. Seperti yang terlihat pada Gambar 1.2 dijelaskan bagaimana usaha membangun RTH oleh Dinas Cipta Kaya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu Tahun 2014 .

Gambar 1.2 Usaha membangun RTH kota Batu 2014



Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2014

Pemerintah Kota Batu terus berupaya memenuhi kuota 30% total luas RTH Publik yang dibutuhkan, antara lain dengan menyosialisasikan kepada masyarakat agar menyisihkan pekarangannya untuk RTH. Demikian halnya pada pengembang perumahan agar dapat menyiapkan RTH pada lokasi perumahan

yang dibangunnya. Selain itu ada langkah-langkah Strategis yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu untuk mencapai 30% Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan RTRW 2010-2030 adalah :

1. Menyusun rencana induk RTH dan Melegalisasi Perda RTH
2. Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun/Dipreservasi
3. Menghijaukan bangunan (Green Roof/ Gree wall)
4. Menambah lahan baru RTH
5. Meningkatkan kualitas RTH
6. Mengakusisi RTH privat
7. Mengembangkan Koridor hijau
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dan partisipasi publik

. Sangat terbatasnya ketersediaan ruang bagi RTH di perkotaan, seperti di Kota Batu juga disebabkan harga tanah yang tinggi, kurangnya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan pelaksanaan regulasi perundangan-undangan yang kurang memperhatikan pentingnya RTH bagi kenyamanan hidup masyarakat didalam kota besar. Hal ini memicu perubahan penggunaan guna ruang kota untuk tujuan pembangunan yang lain, sehingga terjadi ketidak seimbangan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mengurangi ketidak seimbangan realisasi pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota Batu, harus dapat melaksanakan tata guna ruang dan lahan dengan tegas dan konsisten untuk mencapai RTH yang sudah direncanakan pada RTRW 2010-2030.

d. Analisis SWOT pengelolaan RTH Publik di Kota Batu

Pengelolaan RTH Publik taman dan jalur hijau memiliki fungsi sebagai penetralisir racun yang dikeluarkan dari asap kendaraan yang berbahaya bagi pernafasan manusia serta untuk mendinginkan polusi udara.

Perbedaan jalur hijau ini meliputi:

- a. Untuk skala kota meliputi RTH jalur arteri, jalur utilitas kota serta jalur sungai
- b. Skala bagian kota meliputi jalur kolektor dan utilitas kawasan.
- c. Skala lingkungan permukiman meliputi jalur jalan dan utilitas lingkungan.

Pengelolaan jalur hijau adalah dengan mendayagunakan dan melengkapi penataan yang telah ada saat ini dengan memperkaya ragam jenis, bentuk dan aspek seni artistik hijau kota melalui penyempurnaan elemen tanaman, variasi warna, bentuk dan penambahan ornament pelengkap lainnya. Sehingga pengelolaan ini bertujuan untuk menjaga kesan hijau kota di sepanjang koridor jalan. Sementara itu keberadaan tanaman tidak mengganggu sarana dan aktivitas lain seperti rambu-rambu lalu lintas dan menghalangi pengguna jalan. Konsep ini dilakukan dengan jenis vegetasi tanaman yang tidak merusak trotoar, berfungsi sebagai peneduh, pengarah, peredam kebisingan dan menambah estetika. Jenis vegetasi untuk RTH jalur hijau meliputi:

- a. Tanaman dengan percabangan 2m diatas tanah.
- b. Bentuk percabangan tidak merunduk
- c. Bermassa daun padat dari perbanyak biji.
- d. Ditanam secara berbaris dan tidak mudah tumbang.

Berdasarkan kajian dan analisis lapangan setidaknya terdapat beberapa RTH jalur hijau di Kawasan Perkotaan Batu yang direncanakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Pertamanan dan PJU untuk melengkapi RTH jalur hijau yang sudah ada:

1. Pulau Jalan dan Median Jalan

Taman pulau jalan adalah RTH terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan, sedangkan median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman. Direncanakan pulau jalan ini sepanjang dibuat di sepanjang Gapura Selamat datang sampai Alun-alun kota Batu.

2. Jalur Pejalan Kaki

Ruang Pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan kanan sepanjang jalan kota dan taman. RTH jalur pejalan kaki di kawasan perkotaan direncanakan dibangun di sekitar kawasan Alun-Alun Kota Batu.

Selain itu terdapat tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Jalur Hijau di kawasan perkotaan Batu. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Didit sebagai Staf ahli Pertamanan dan PJU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kurangnya atau tidak adanya aktifitas memantau dan menjaga kawasan jalur hijau yang menjadi kawasan yang kumuh, kondisi ini yang membuat fungsi awal jalur hijau jadi tidak terwujud, selain itu sulitnya anggaran dana yang keluar tahun 2015 nanti karena adanya program prioritas satu atap yang sedang dibangun bangun Pemkot Kota Batu. Sehingga berdampak pada sumber anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu” (Hasil wawancara hari Kamis, 11 September 2014 jam 08.30 di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu)

Dalam rangka pengembangan pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, maka dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman). Analisis SWOT diawali dengan mengidentifikasi faktor internal Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu sebagai kekuatan dan kelemahan, dan faktor

eksternal Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu sebagai peluang dan ancaman. Faktor internal dalam analisis ini adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan RTH Kota dan pengendaliannya masih di dalam kemampuan pemerintah kota, dan faktor eksternal dalam analisis ini adalah yang berhubungan tidak langsung dengan RTH Kota dan pengendaliannya sudah di luar kemampuan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu bidang Pertamanan dan PJU.

Tujuan dilakukannya Analisis SWOT ini adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Batu, dengan memunculkan alternatif-alternatif strategi berdasarkan aspek fisik, fungsional dan kelembagaan. Aspek fisik yang dibahas meliputi luasan dan sebaran RTH serta kondisi fisik RTH, aspek fungsional meliputi pemanfaatan dari RTH Kota dan Aspek kelembagaan meliputi legalitas, kapasitas pengelolaan, dan pembiayaan..Analisis strategi ini diawali dengan mengetahui potensi dan persoalan pengelolaan di RTH Kota Batu. Berikut ini ditampilkan Persoalan dan Potensi Pengelolaan RTH Kota Batu oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota bidang Pertamanan dan PJU, sebelum melakukan analisis SWOT Batu pada Tabel 1.6

Tabel 1.6 Persoalan dan Potensi RTH Publik Kota Batu Tahun 2014

Aspek	Persoalaan	Potensi
Fisik	1. Keterbatasan lahan RTH 2. Perkerasan lahan RTH 3. Terdapat variasi kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan RTH 4. Terdapat variasi kualitas dan kuantitas pada fasilitas pendukung RTH 5. Luas RTH yang belum optimal	3. Pembebasan lahan untuk RTH 4. Volume RTH berpotensi untuk ditingkatkan 5. Sebaran RTH cukup merata 6. Lokasi RTH yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya
Fungsional	1. Terjadi perubahan fungsi RTH pada lokasi RTH yang besar dan strategis berupa munculnya PKL, gepeng dan rumah liar. 2. Pemanfaatan fungsi RTH yang belum maksimal 3. Pelayanan Pemakaman yang belum optimal	1. Fungsi RTH pada umumnya sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan 3. Lahan pemakaman sebagai fungsi RTH
Kelengkapan	1. Kemampuan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu dalam pengelolaan sangat terbatas 4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional 5. Kurangnya SDM yang berkompeten di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu - Kurangnya dana pengelolaan RTH dari pemerintah Kota Batu 6. Kurang jelasnya pembagian beban antar instansi pemerintah terkait dengan pihak lain yang membantu dalam pengelolaan RTH 7. Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu dalam pengelolaan RTH belum optimal 8. Kontribusi masyarakat hanya terdapat pada taman-taman lingkungan	1. Adanya kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan RTH

Sumber :Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2014 (Data diolah oleh peneliti)

Dari hasil persoalan dan potensi RTH Kota Batu bahwa telah dijelaskan secara rinci dan menjadi program prioritas di masa mendatang dimana Kota Batu diarahkan menjadi Kota ekowisata, dimana elemen taman atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat dibutuhkan tersedia secara proporsional. Diharapkan hingga tahun 2030 peruntukannya lahannya dapat dicapai 30% berupa ruang terbuka hijau yang terdiri atas 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Matali Kepala Bidang Pertamanan dan PJU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.meberikan pernyataan sebagai berikut:

“Analisis pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan dan perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan fungsi dan manfaat dari ruang terbuka hijau itu sendiri. Sehingga kota mempunyai kualitas lingkungan yang baik dan memiliki daya dukung yang tinggi, sehingga dapat menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan permukiman yang asri dan sehat”(Hasil wawancara hari Kamis,11 September 2014 jam 09.30 di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu)

Pelaksanaan analisis pembangunan di Kota Batu belum berjalan dengan cukup baik, demikian tingkat capaian kinerjanya belum cukup optimal sesuai dengan target yang diharapkan.Seharusnya tidak dimungkinkan pengalihan tata guna ruang atau lahan RTH menjadi yang lain karena kepentingan ekonomi atau lainnya. Pemerintah Kota Batu juga harus bisalebih jeli untuk menggunakan area yang memungkinkan digunakan menjadi RTH, misalnya bantaran sungai, bibir saluran drainage kota dan mempertahankan ruang kota dengan tata guna lahan sebagai RTH.

d. Monitoring dan Evaluasi Pogram Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Batu

Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan rencana pembangunan dan pengelolaan sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan/monitoring. Apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan atau persoalan-persoalan dapat diketahui sampai beberapa jauh penyimpangan atau masalah tersebut, dibandingkan dengan perkiraan semula. Lebih penting daripada itu ialah mengetahui apa sebabnya. Kemudian perlu diambil langkah-langkah kebijakan yang sesuai.

Monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan secara berkala dan teratur agar Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik kota batu mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau perlu dilakukan secara terpadu oleh pihak dinas Cipta karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU yang bertanggung jawab atas pemeliharaan taman dan jalur hijau di kota Batu. Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan setiap kegiatan, yang dilakukan secara berkala di setiap tingkatan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dimaksudkan untuk memastikan bahwa penggunaan input, jadwal kerja, hasil yang ditargetkan dan tindakan lainnya yang diperlukan berjalan sesuai dengan rencana. seperti yang diutarakan oleh ibu Reni Sub bagian program dan pelaporan Dinas Cipta Karya Bidang Pertamanan dan PJU, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Hasil dari pengelolaan kerja ruang terbuka hijau setiap akhir tahun dinas cipta karya diwajibkan membuat laporan kerja yang digunakan untuk laporankan hasil pertanggung jawaban dari hasil program perencanaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau untuk diberikan kepada kepala dinas cipta karya dan tata ruang dan diteruskan ke wali kota. Monitoring juga dilakukan oleh pihak pengawas program dengan cara kita bekerja sama dengan pihak perencana untuk melakukan pemantuan ruang terbuka hijau yang sudah dibangun”(Hasil wawancara hari Kamis,11 September 2014 jam 09.30 di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu)

Pengawas program dan pihak perencanabekerja dalam bentuk satu tim, yang melaksanakan pemantauan terhadap taman-taman yang dibangun oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Unsurnya meliputi koordinator lapangan, penyuluh kebersihan, petugas kebersihan, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan program pengembangan kota hijau masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku utama, sedangkan Pemerintah berperan memberikan fasilitasi dan pendampingan sehingga mendapatkan keberhasilan yang lebih optimal. Seperti yang di utarakan Bapak Dion warga di sekitar taman wilis. memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan RTH. Masyarakat diharapkan dapat membantu memperlancar dan mengawasi setiap pembangunan RTH di Kota Batu sekiranya nanti ada yang salah dalam pembangunan bisa langsung kita laporkan langsung ke dinas cipta karya”(Hasil wawancara hari Kamis, 11 September 2014 jam 12.30 di rumah warga sekitar taman wilis)

Monitoring pada ruang terbuka hijau juga dilakukan hingga masyarakat, dimana masyarakat dapat membantu dan menjaga keberadaan ruang terbuka hijau publik.. Seperti yang diutarakan oleh salah satu warga Kelurahan Sisir yang rumahnya dekat dengan taman wilis, Bapak Giman memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Biasanya masyarakat sinisel selalu membantu mengawasi taman wilis biar tidak ada yang merusak atau mencorat-corek taman, soalnya banyak anak sekolah yang nongkrong dan pacaran kalau datang kesini jadi saya dan tetangga selalu mengawasi siapa tau ada yang berbuat kejahatan disini kalau". (Hasil wawancara hari Rabu, 17 September 2014 jam 12.30 di rumah warga sekitar Taman Wilis)

Monitoring mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas pembangunan menjaga keberadaan dari Ruang Terbuka Hijau yang telah dibangun.

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efektivitas, manfaat, dan dampak dari kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik, dan obyektif. Evaluasi ini diperlukan untuk menyempurnakan kegiatan yang sedang berjalan (on going evaluation), melihat hasil akhir kegiatan (terminal evaluation), dan juga untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan (ex post evaluation). Laporan berkala dan laporan insidentil dari walikota kepada gubernur dan pemerintah pusat serta dari gubernur ke pemerintah pusat perlu dilakukan. Kegiatan yang perlu dilaporkan adalah keragaman dan permasalahan yang perlu dukungan pemecahannya dari tingkat administrasi yang lebih tinggi, baik pada tahap pengenalan, persiapan, maupun pelaksanaan kegiatan.

2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu dalam startegi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

a. Faktor Pendukung

1. Regulasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Batu sudah dicantumkan dalam RTRW Kota Batu 2010-2030, sehingga pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah Kota Batu. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Batu mendapatkan dukungan dari Walikota Batu dengan visi-misi Kota Batu yang sekarang yaitu dengan menjadikan Kota Batu sebagai Kota Agropolitan yang secara tidak langsung juga menambah Ruang Terbuka Hijau Publik. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Surya Sub Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda, memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Walikota Batu mulai tahun 2007 sudah membuat peraturan tentang ruang terbuka hijau publik, yang diatur dalam RTRW kota batu.bappeda selaku leading sektor P2KH berharap kota batu dapat menerapkan program-program yang sudah di rencanakan dan mewujudkan kota batu menjadi green city sehingga mampu membuat warga kota batu hidup sehat dan menarik wisatawan'. ".(Hasil wawancara Selasa, 16 September 2014 jam 08.37 di kantor BAPPEDA kota Batu)

Sesuai visi-misi Walikota Batu badan perencanaan pembangunan daerah Kota Batu ditunjuk sebagai penanggung jawab atas program pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu. Badan perencanaan pembangunan daerah Kota Kota sebagai penyusun program yang akan digunakan sebagai pendukung Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).

2. Masyarakat yang paham akan pentingnya *Green City*

Pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tidak bisa lepas dari faktor masyarakat kota Batu sendiri yang harus mendukung Program Pembangunan Kota Hijau, masyarakat merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan P2HK. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Matali kepala bidang pertamanan dan PJU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kota Batu sangat tepat sekali untuk program P2KH karena keadaan wilayah geografis kota batu dan mayoritas penduduk adalah petani, dengan begitu banyak masyarakat kota Batu yang mendukung kegiatan P2KH. Karena masyarakat Batu sendiri juga mulai sadar dengan perubahan cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini terjadi di karenakan oleh global warming yang mana merupakan ulah manusia yang tidak peduli akan lingkungan ".(Hasil wawancara hari Selasa 16 September 2014 jam 08.37 di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kota Batu)

Melihat begitu banyak potensi yang dimiliki Kota Batu sehingga pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik faktor sumber daya manusia juga dirasa cukup penting masyarakat sehingga meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap lingkungan. Sehingga menarik wisatawan lokal yang datang ke Kota Batu.,

sehingga usaha kecil dan menengah milik masyarakat di kawasan Kota Batu dapat berkembang. Seperti diutarakan Bapak Epan sebagai warga sekitar taman wilis, memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Sumber daya manusia atau masyarakat di sekitar kawasan taman yang mendapatkan program P2HK merupakan faktor utama yang digunakan sebagai penggerak masyarakat yang peduli lingkungan, karena dengan adanya pemberdayaan masyarakat di sekitar taman P2HK secara tidak langsung masyarakat di sekitar kawasan akan antusias dalam pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik kota batu".(Hasil wawancara hari Rabu, 17 September 2014 jam 12.30 di rumah warga sekitar Taman Wilis)

Pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Batu diharapkan memiliki sarana dan prasarana untuk mewujudkan *Green City* yaitu memiliki fasilitas seperti layaknya kota yang peduli lingkungan. Fasilitasnya yang selalu mendukung kebijakan lingkungan yang tidak kalah dengan kota modern, dimana berbagai sarana seperti *car free day* (CFD), sistem drainase yang hemat air, taman yang bersih, polusi udara yang minim, Akan juga terbangunya Kota Hijau nantinya juga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar kota Batu. Seperti yang diutarakan bapak Edo sebagai warga sekitar Taman wilis, memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Pelaksanaan P2KH ini tidak semata-mata dipandang sebagai proyek, melainkan sebagai gerakan moral, menjalankannya pun memerlukan rasa atau hati karena kita akan menyentuh lingkungan yang hidup sehingga perlu kesungguhan sikap dalam melakukannya".(Hasil wawancara hari Rabu, 17 September 2014 jam 12.30 di rumah warga sekitar Taman Wilis)

Program dan komitmen masyarakat sebagai langkah awal dalam mewujudkan Kota Hijau.

b. Faktor Penghambat

1. Anggaran Dana Program

Pada prinsipnya pembiayaan Program Pengembangan Kota Hijau dibiayai oleh Dinas Pekerjaan Umum Pusat, Pembiayaan pemerintah (APBN/APBD) lebih diarahkan untuk membiayai sarana dan prasarana yang bersifat publik (seperti peningkatan/ pembuatan jalur hijau, taman kota, sanitasi, pengolahan sampah, dan lain-lain) dan kegiatan-kegiatan strategis seperti penelitian, pelatihan, membantu memecahkan masalah, promosi, dan lain-lain. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Surya bagian sarana dan prasarana Bappeda, memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Masalah anggaran pemerintah Kota Batu untuk menunjang ruang terbuka hijau masih kurang, dengan anggaran yang masih minim kinerja setiap anggota SKPD tidak bisa melakukan pembangunan atau pengelolaan secara rutin dan pemberian penyuluhan P2KH tidak bisa diberikan secara maksimal". (Hasil wawancara hari Selasa, 16 September 2014 jam 08.33 di kantor BAPEDDA kota Batu)

Keterbatasan anggaran adalah salah satu yang dihadapi Pemerintah Kota Batu khususnya SKPD dalam Program Pengembangan Kota Hijau. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik pada hakikatnya merupakan kebutuhan yang mendesak yang harus segera dipenuhi pemerintah pusat. Kebutuhan mendesak ini menyangkut hal-hal yang bersifat strategis untuk masing-masing aspek pengembangan kawasan. Fasilitas ini diawali dengan adanya komitmen antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

2. Kerja Sama Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan program dari Dinas Pekerjaan Umum Pusat untuk perwujudan RTH 30 % dari luas wilayah

kota (komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat) dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Oleh Karena itu maka perwujudan RTH perkotaan bukan sebatas kegiatan yang bersifat beautifikasi atau justru mengurangi luasan RTH eksisting, tetapi lebih kearah perwujudan Kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kota Batu merupakan daerah yang tepat untuk P2KH karena keadaan geografis di Kota Batu yang sangatlah mendukung. Tetapi dilihat dari keadaan kondisi geografis yang mendukung tetapi ada faktor yang menghambat dalam pembangunan RTH publik di Kota Batu.

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Suryabagian Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda, memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kendala yang dihadapi pemerintah Kota Batu khususnya Bappeda Kota Batu adalah: 1) kurang koordinasi antara SKPD untuk keberhasilan program P2HK 2) kurang dukungan dari pemerintah kota seperti dukungan anggaran yang tidak memadai, sehingga keberhasilan program ini belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan". (Hasil wawancara hari Selasa, 16 September 2014 jam 08.37 di kantor BAPEDDA kota Batu)

Melihat kendala dari internal pemerintah Kota Batu. Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kurang koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah yang belum memiliki rasa tanggung jawab atas tercapainya program pembangunan kota hijau. Dan selanjutnya masalah pendanaan yang kurang dari anggaran yang telah ditetapkan merupakan salah satu faktor penghambat yang terbesar untuk keberhasilan dari program pengelolaan ruang terbuka hijau publik dan P2KH.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik juga memiliki hambatan dalam mencapai keberhasilan program yang akan dilakukan. Sama halnya dengan program P2KH, penyuluhan terhadap masyarakat dirasa masih kurang. Seperti yang diutarakan olehibu Renibagian program, dan pelaporan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota batu, memberikan pernyataan sebagai berikut:

"kurang terjalinya kerja sama/koordinasi antar SKPD lainnya dan kurang perhatian dari masyarakat untuk ikut serta dalam program P2HK. Itulah yang menjadi penghambat dalam pembangunan dan pengelolaan RTH publik. Biasanya masyarakat disana tidak mengikuti atau belum menerapkan apa yang telah disosialisasikan pemerintah, masyarakat masih ada yang belum sadar akan penting mewujudkan kota hijau". (Hasil wawancara hari Selasa,16 September 2014 jam 08.37 di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kota Batu)

Setiap adanya program dalam pembangunan pasti ada hambatan, yang nantinya merupakan menjadi suatu tantangan untuk mencapai keberhasilan.

C. Pembahasan

1. Strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau untuk mewujudkan *Green City*

a. Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Batu

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau dalam era sekarang tidak hanya sebagai pelengkap kota melainkan sebagai kebutuhan manusia untuk mengantisipasi perubahan lingkungan, seperti yang diungkapkan Jaya (2000), bahwa Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai penyeimbang ekosistem kota, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan dan

kesejahteraan masyarakat. RTH harus dipandang sebagai elemen strategi dalam perencanaan lingkungan, bukan sebagai sisa dari pengembangan lingkungan, tetapi lebih sebagai area konservasi untuk melindungi keseimbangan alam dan ekosistem. dalam hal ini Kota Batu saat ini sangat menyadari pentingnya keberadaan RTH dapat dilihat di lapangan perkembangan RTH kota Batu mengalami perkembangan terutama taman dan jalur hijau, selain untuk mengejar target ketersediaan RTH sebesar 30% sesuai dengan UU no 26 Tahun 2006, pembangunan RTH publik juga lebih terkonsep dan terkontrol, dimana dilakukan pengoptimalan pada lahan yang peruntukannya sebagai RTH. Saat ini perkembangan RTH pun diupayakan merata pada hampir semua wilayah kota Batu untuk memecah pusat keramaian di pusat kota. Hal tersebut dipertegas pula dengan rancangan RTRW 2010-2030 Pemerintahan Kota Batu terkait program RTH pada sasaran yang dibuat yaitu optimalisasi fungsi RTH yang seharusnya dikembangkan seluas kurang lebih 5.972,61 Ha terdiri atas :

- a. Rencana pengembangan ruang terbuka hijau yang telah ada meliputi: taman kota, makam, sepadan sungai dan SUTT dengan luas kurang lebih 1.777,70 ha;
- b. Rencana pengembangan Ruang terbuka hijau privat 10%;
- c. Rencana pengembangan Rencana ruang terbuka hijau publik 20 % .

Peningkatan RTH publik khususnya taman dan jalur hijau juga terlihat pada capaian luas RTH yang dikelola Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang pertamanan dan PJU dimana sejak tahun 2010 luas taman dan jalur hijau kota terus mengalami peningkatan walaupun sedikit dimana tahun 2010 hingga 2014 luas taman dan jalur hijau 82.923 m².

Selain meningkatkan jumlah keberadaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Batu ada beberapa komponen yang harus diperhatikan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu seperti yang diungkapkan Fahrentino (2003) menjelaskan komponen-komponen pengaturan yang harus diperhatikan dalam penyediaan dan pengelolaan RTH adalah pengaturan teknis dan pengaturan penyelenggaraan.

1. Pengaturan teknis meliputi bentuk-bentuk, standar kebutuhan, dan alokasi lahan RTH kota.
2. Pengaturan penyelenggaraan meliputi pengelolaan RTH (perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian), kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat.

Komponen-komponen tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar dalam keberadaan Ruang Terbuka Hijau. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh lapangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU dalam memperhatikan komponen dalam ruang terbuka hijau.

1. Pengaturan teknis meliputi bentuk-bentuk ruang terbuka hijau publik, standar kebutuhan dan alokasi lahan ruang terbuka hijau sudah mulai di perhatikan dengan dibangunnya Taman Kenanga di Desa Bulukerto yang sasaran lokasinya bukan hanya di pusat perkotaan dan keramaian, tapi di sekitar kawasan sumber air Umur Gemulo yang terletak di Dusun Cangar, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji. Ruang Terbuka Hijau Publik Taman Kenanga dibangun diatas lahan milik Pemkot Batu seluas Satu Hektar dengan anggaran sekitar 900 juta dari Program Pembangunan Kota Hijau (P2HK). Pembangunan Taman Kenanga menambah keberadaan Ruang

Terbuka Hijau Publik berupa Taman dan jalur Hijau di Kota Batu, sebelumnya telah dibangun Taman Hutan Kota Bondas di kawasan Stadion Brantas, Taman Wilis di Kelurahan Sisir, Taman Kali Lanang di Desa Pandanrejo dan Taman Ngasiman di Kelurahan Ngaglik.

2. Pengaturan penyelenggaraan meliputi pengelolaan RTH (perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian), kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu masih belum maksimal dalam hal pembiayaan karena minimnya anggaran yang dikeluarkan Pemkot Batu tiap tahun dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik dan belum dapat memanfaatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ruang terbuka hijau publik taman dan jalur hijau di kota Batu terlihat masih banyak aksi *vandalisme* (merusak sarana publik) pencurian lampu taman dan merusak tanaman di area ruang terbuka hijau publik kota Batu. Sedangkan dalam (perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian) Dinas Cipta karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu sudah berusaha maksimal dengan membuat rencana kerja tiap tahun untuk menambah dan mengelolah ruang terbuka hijau publik berupa taman dan jalur hijau di kota Batu.

Persebaran taman dan jalur hijau diupayakan menyebar ke seluruh wilayah kota Batu mulai Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, Kecamatan Bumiaji semua memiliki taman dan jalur hijau kota untuk menyeimbangkan pembangunan yang berlangsung dengan lingkungannya. Perkembangan taman dan jalur hijau ditandai dengan dilakukannya perahlifungsian beberapa bangunan yang dijadikan RTH publik dan pembangunan taman baru di areal yang padat penduduk, langkah yang

diambil pemerintah kota untuk menambah lahan RTH publik adalah dengan meralihfungsikan peruntukan lahan yang sebelumnya diatas lahan tersebut berdiri bangunan kemudian dijadikan menjadi lahan RTH publik. Dan dari usaha pemerintah tersebut 1 TPA yang ada di dekat pemukiman warga kelurahan sisir dapat dialihfungsikan menjadi RTH publik dengan dibangun taman wilis sedangkan untuk pembangunan taman baru diareal padat penduduk pemkot Batu sudah membangun taman di desa Bulukerto.

Jadi jika dilihat perkembangan RTH publik khusus yang dikelola oleh dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu terus mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Dari segi kuantitas, terdapat beberapa taman dan jalur hijau baru di Kota Batu yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kota Batu, yang dulunya pembangunan dilakukan di pusat-pusat kota Batu kini menyebar hingga di daerah pinggiran kota sehingga setiap Kecamatan di Kota Batu dapat memenuhi kebutuhan RTHnya dan sesuai dengan arahan UU No 26 tahun 2007 dimana setiap kota memenuhi RTH sebesar 30% maka Kota Batu mampu menyediakan RTH 30% dari berbagai jenis RTH yang ada yang salah satunya berupa taman dan jalur hijau kota. Dan secara kualitas pun taman dan jalur hijau semakin meningkat dan hasilnya dapat dilihat saat ini taman alun-alun dan taman kota yang semakin banyak pengunjungnya. Diharapkan masyarakat kota Batu khususnya untuk terus menjaga kebersihan dan keindahan RTH publik yang telah dibangun. Saat ini pemerintah Kota Batu melalui pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan pengelolaan taman dan jalur hijau dengan baik, dalam beberapa waktu

ini perkembangannya secara teknis mengarah pada taman dan jalur hijau yang lebih terkonsep dan terkontrol.

b. Program Pembangunan Kota Hijau (P2HK) sebagai upaya mewujudkan *Green City*

Kebijakan atau program yang akan dilaksanakan baik program secara tertulis atau lisan harus ada landasannya dalam pengerjaannya. Sebagaimana dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang sebagai pegangan dalam menghasilkan menyusun kebijakan pembangunan. Pengembangan Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) di Kota Batu juga perlu membutuhkan kebijakan atau program pendukung untuk mewujudkan *Green City*, seperti yang diungkapkan Tjokroamidjojo (1995:58) suatu kebijaksanaan atau *policy* mungkin perlu didukung oleh program-program pembangunan. Oleh karena itu setiap pembangunan perlu didukung oleh program-program kerja untuk dijadikan penunjang dari pembangunan. Berdasarkan itu pemerintah Kota Batu melalui badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ditunjuk menjadi leading sektordalam Pengembangan Program Pembangunan Kota Hijau (P2HK) di Kota Batu, dengan team swakelola yang sudah dibentuk, BAPPEDA ditunjuk sebagai penyusun rencana kerja Pengembangan Program Pembangunan Kota Hijau (P2HK).

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sebagai program kolaboratif antara pemerintah kota/kabupaten merupakan langkah nyata sebagai wujud dan kegiatan yang berorientasi aksi yang inovatif. P2KH merupakan inisiatif

pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Pekerjaan Umum untuk mewujudkan kota hijau secara inklusif dan komprehensif untuk mewujudkan 8 (delapan) atribut kota hijau, yang meliputi:

- 1) perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan.
- 2) Ketersediaan ruang terbuka hijau.
- 3) konsumsi energi yang efisien.
- 4) pengelolaan air yang efektif.
- 5) pengelolaan limbah dengan prinsip 3R.
- 6) bangunan hemat energi atau bangunan hijau.
- 7) penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan.
- 8) peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau.

Dalam pelaksanaannya di lapangan program P2KH kota Batu sudah menyelesaikan pembangunan taman kota wilis pada tahun 2012 yang dulunya adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada tahun 2013 berubah menjadi taman kota dan pada tahun 2014 program P2KH sudah membangun taman kenanga di desa Bulukerto. Selain itu team swakelola juga sudah melaksanakan program-program sosialisasi yang mendukung program P2KH untuk mewujudkan *Green City* atau Kota Hijau.

Green City merupakan salah satu konsep pendekatan perencanaan kota yang berkelanjutan. *Green City* juga dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1

ayat 3 yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berdasarkan data di lapangan keinginan mewujudkan *Green City* di kota Batu masih harus dilandasi dengan keyakinan masyarakat kota Batu, selain itu masyarakat juga harus menjaga hubungan baik antara sesama manusia serta lingkungan sehingga konsep *Green City* dapat terwujud di kota Batu. Adapun keinginan mewujudkan *Green City* di Kota Batu harus serta merta didukung secara konkret melalui kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) kota Batu.

Jadi dengan demikian dapat dikatakan pembangunan ruang terbuka hijau dijalankan pemerintah Kota Batu sesuai dengan teori yang telah ada, yaitu adanya program yang untuk menunjang akan pembangunan ruang terbuka hijau. P2HK sendiri merupakan program yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum pemerintah pusat yang melalui BAPPEDA kota Batu. Yang dimana P2HK dijadikan program untuk mensukseskan pembangunan Ruang Terbuka Hijau untuk mewujudkan *Green City*.

c. Strategi Pengelolaan RTH Publik untuk mewujudkan *Green City*

Untuk mewujudkan strategi pembangunan *Green city* di kota Batu maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UU No 26 tahun 2007 bahwa setiap kota harus mampu menyediakan RTH sebesar 30% dari luas kota dimana 20% merupakan RTH publik dan 10% merupakan RTH privat. Dan salah

salah satu jenis RTH yang dapat menunjang pembangunan *Green city* adalah RTH jenis taman dan jalur hijau di perkotaan, RTH tersebut mampu menjadi pengendali dalam penataan ruang dan mampu menekan pencemaran udara di Kota Batu. Menurut (Joga dan Ismaun 2011:223) strategi pengembangan RTH kota yang berbasis infrastruktur hijau (infrastruktur ekologis) harus diintegrasikan dengan rencana tata ruang kota (RTRW) dan tercermin dalam struktur dan pola ruang kotanya. Sehingga jaringan RTH kota dengan berbagai jenis dan fungsinya menjadi sistem infrastruktur untuk keseimbangan ekosistem kota Berdasarkan tabel data yang diperoleh dilapangan, Pemerintah Kota Batu terus berupaya memenuhi kuota 30% total luas RTH Publik yang dibutuhkan, selain dengan adanya program P2KH, membuat strategi dengan melihat persoalan dan Potensi RTH Publik di kota Batu juga dapat membantu kegiatan pengelolaan Taman dan Jalur Hijau di Kota Batu. Pemkot Batu juga sudah menyosialisasikan kepada masyarakat kecamatan Bumiaji, kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo agar menyisihkan pekarangannya untuk RTH. Demikian halnya pada pengembangan perumahan agar dapat menyiapkan RTH pada lokasi perumahan yang dibangunnya. Selain itu Pemerintah Kota Batu, sekarang juga sudah berupaya melaksanakan tata guna ruang dan lahan dengan tegas dan konsisten untuk mencapai RTH yang sudah direncanakan pada RTRW 2010-2030 agar terwujudnya *Green City*.

Lebih lanjut (Joga dan Ismaun 2011:221-243) mengatakan bahwa strategi yang dapat diterapkan untuk menuju RTH 30% diantaranya adalah:

1. Merencanakan rencana induk RTH dan melegalisasi perda RTH

Pemerintah Daerah dan DPRD perlu secepatnya menempatkan masalah RTH sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan yang berkelanjutan. Perlu secepatnya didorong lahirnya Perda tentang RTH dan Rencana Induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tegas. Beberapa contoh kebijakan yang mendorong pemenuhan RTH 30%. Antara lain :

- a) Penerapan KDH diwajibkan dalam setiap pengurusan IMB
- b) Insentif diberikan kepada warga yang dengan sukarela menjadikan halaman atau perkarangan rumahnya menjadi bagian terpadu dengan RTH Kota. Lahan privat dapat pula dihibahkan untuk RTH.
- c) Semua pengembang wajib menyediakan RTH minimal 20% dari kawasan yang dikembangkan
- d) Insentif diberikan kepada pengembang yang membangun kawasan dengan konsep perumahan hijau (*green property*)
- e) Insentif diberikan kepada pengembang yang membangun bangunan hijau, dapat terdiri dari atap hijau (*green roof*) dan dinding hijau (*Green wall, vertical garden*)
- f) Pemerintah mendorong pembangunan kawasan komersil (CBD) di pusat kota arah vertikal.

2. Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun/dipreservasi

Merupakan bagian dari penyusunan Perda RTRW. Dalam Perda RTRW harus ditentukan daerah-daerah yang diperkirakan sensitive terhadap perubahan harus harus dipreservasi atau dikonversi agar fungsi lingkungan tetap terjaga. Daerah yang perlu dipreservasi antara lain

- Habitat satwa liar
- Daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi
- Daerah genangan dan penampungan air (water retention)
- Daerah rawan longsor
- Tepian sungai dan tepian pantai sebagai pengaman ekologis
- Daerah-daerah yang memiliki nilai pemandangan tinggi

3. Menghijaukan bangunan (green roof/green wall)

Keterbatasan lahan telah mendorong kreativitas arsitek dan arsitek langkap untuk memulai memperkenalkan pembangunan taman atap (Green roof, roof garden) dan dinding (green wall, vertical garden) pada bangunan. Penghijauan bangunan terbukti mampu menurunkan suhu kota dan menyerap gas polutan.

4. Menambah lahan RTH baru, perluasan RTH melalui pembelian lahan.

Pemerintah membeli lahan untuk memperbanyak pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya, hutan mangrove, dan situ atau danau buatan.

5. Meningkatkan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting.

RTH yang telah ada ditingkatkan kualitasnya sehingga fungsi ekologisnya lebih optimal dan siklus karbon lebih meningkat, sebagai contoh:

- a) Refungsionalisasi RTH eksisting jalur hijau SPBU kembali menjadi taman.
- b) Restorasi kawasan hutan bakau
- c) Revitalisasi situ, danau, waduk, sebagai daerah resapan air

- d) Penanaman rumput pada taman-taman lingkungan yang diperkeras (lapangan bulutangkis, lapangan basket, lahan parker) agar mempunyai daya serap air yang lebih besar.

6. Mengakuisi RTH privat, menjadikan RTH kota

Akuisisi RTH privat menjadi RTH kota dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Penerapan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada lahan-lahan privat yang dimiliki masyarakat dan swasta diterapkan pada pengurusan izin mendirikan bangunan.
- b) Pemerintah daerah dapat mulai mendata dan menetapkan RTH privat perkarangan rumah, sekolah, perkantoran, hingga pengembang (kawasan terpadu, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, sebagai bagian dari RTH
- c) Pengembang diminta untuk memenuhi kewajiban penyediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Dalam pengembangan kawasan diisyaratkan koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 % berupa taman di kawasan pengembang.
- d) warga diajak berperan mengelola lahan hijau pekarangan melalui penanaman pohon rindang dan karpet hijau tanaman dan pembuatan lubang biopori.
- e) Insentif bagi warga yang lahannya bersedia diakuisisi berupa keringan pajak PBB, pajak air tanah, pembayaran tagihan listrik maupun telepon.

7. Mengembangkan koridor hijau kota.

Penanaman pohon besar secara masal untuk menciptakan koridor ruang hijau kota di sepanjang potensi ruang hijau, seperti:

- Jalur hijau
- Pedestrian
- Sempadan sugai
- Tepian badan air situ dan waduk
- Sempadan rel kereta api
- Saluran Umum Tegangan Tinggi (SUTT)
- Pantai

Koridor jalur hijau dikembangkan sebagai urban park *connector* yang menghubungkan RTh diseluruh kota, dilengkapi jalur sepeda dan pejalan kaki, menjadi jalur alternative transportasi kendaraan tidak bermotor dan jalur wisata kota ramah lingkungan.

8. Meningkatkan peran serta masyarakat/partisipasi publik.

Untuk mewujudkan RTH minimal 30% dari luas kota maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Untuk mengantisipasi perubahan lahan yaitu konversi lahan hijau atau alami menjadi lahan terbangun, maka perlu diterapkan KDH secara sadar oleh masyarakat dan pengembang. Bentuk- bentuk kegiatan antara lain:

- a) Penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
- b) Penyebaran fungsi dan manfaat RTH melalui media massa cetak dan elektronik (Green campaign)
- c) Pelibatan masyarakat dan swasta dalam program pengembangan RTH
- d) Pelibatan Institusi pendidikan melalui program sekolah hijau dan kampus hijau

- e) Pemerintah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat yang telah berkontribusi nyata dalam membangun RTH.
- f) Pemerintah dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang telah menyediakan perkarangannya untuk “ daerah hijau” berupa keringanan pajak.
- g) Pemerintah juga dapat mengadakan program kemitraan dengan swasta terutama para pengembang dalam penyediaan RTH dengan program CSR, maupun PPP (Publik Private partnership)

Dalam melaksanakan startegi RTH Joga (2011:221-243) pemkot kota Batu sudah memiliki beberapa kebijakan dan kegiatan yang mendukung tercapainya RTH 30 % tetapi ada juga kebijakan yang dikeluarkan pemkot Batu bertolak belakang dengan startegi RTH.antara lain :

1. Merencanakan rencana induk RTH dan melegalisasi perda RTH

Pemkot Batu Batu sudah memiliki rencana induk RTH yang dituangkan dalam RTRW kota Batu tahun 2010-2030 pasal 39 dan beberapa kebijakan yang mendukung keberlangsungan kawasan RTH.tetapi dalam kenyataan beberapa tahun ini ada beberapa kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan RTRW yang dilanggar pemkot batu mengenai IMB.salah satu contohnya adalah mengenai ijin Jambuwuluk Resort yang berada pada kawasan hutan kota Batu dan berada pada kemiringan 40 derajat dimana sangat membahayakan bagi kawasan songgoriti.selain itu ada sengketa hotel Rayja karena akan dibangun dibawah mata air gemulo.

2. Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun/dipreservasi

Sudah dijelaskan sebelumnya pemkot Batu sudah memiliki perda RTRW 2010-2030 yang mengatur mengenai daerah konservasi meliputi kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung, kawasan cagar alam tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kegiatan yang melanggar kebijakan yang sudah dibuat sendiri oleh pemkot Batu.

3. Menghijaukan bangunan (*green roof/green wall*)

Dalam hal menghijaukan bangunan pemkot batu belum memiliki bangunan yang mengadaptasi bangunan yang pro lingkungan tetapi Kota Batu memiliki wahana wisata Eco Green Park yang dapat mengedukasi masyarakat kota Batu agar sadar akan pentingnya lingkungan.

4. Menambah lahan RTH baru, perluasan RTH melalui pembelian lahan.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Batu sudah berupaya menambah perluasan lahan RTH dengan membeli lahan masyarakat tetapi terkendala anggaran yang sedikit, untuk mensiasatinya pemkot Batu melakukan perubahan fungsi lahan yang kurang bermanfaat dijadikan lahan RTH baru dan lebih bermanfaat. contohnya taman wilis dikelurahan Sisir yang dulunya adalah tempat pembuangan sampah akhir (TPA)

5. Meningkatkan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting.

Pemkot Batu dalam hal ini sudah berupaya pada tahun 2012 merivitalisasi alun-alun kota batu menjadi taman kota yang selain menjadi pusat wisata juga memiliki tanaman yang memiliki fungsi penyerapan karbondioksida di pusat

kota selain itu pemkot batu juga sudah merivitalisasi beberapa jalur hijau di kota Batu.

6. Mengakuisi RTH privat,menjadikan RTH kota.

Dalam hal ini Pemkot Batu belum ada kerja sama mengenai RTH privat dijadikan RTH Kota.tetapi pemkot kota Batu sudah berupaya dengan mengajak masyarakat yang memiliki RTH privat untuk menjaga dan mengelolah dengan baik melalui program P2KH.

7. Mengembangkan koridor hijau kota.

Upaya yang dilakukan pemkot Batu adalah dengan menambah jalur hijau di pusat kota dan pintu masuk kota batu dari kota malang.diharapkan selain menjadi penyerap karbon dioksida koridor hijau menarik wisatawan yang peduli dengan lingkungan.

8. Meningkatkan peran serta masyarakat/partisipasi publik.

Untuk meningkatkan peran masyarakat pemkot Batu memiliki beberapa kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat,antara lain:

- a) Penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat kota Batu melalui program P2KH.
- b) Penyebaran fungsi dan manfaat RTH melalui festival daur ulang yang diadakan di alun-alun kota Batu pada tanggal 23 November 2014.

Selain Strategi RTH taman dan jalur hijau memiliki peran dalam pembangunan *Green city* kota Batu, dengan penataan dan pengelolaan taman dan jalur hijau yang baik maka penghijauan di kota Batu akan semakin dirasakan oleh masyarakat yang ada dikota Batu sendiri merasa nyaman. *Green City* dikenal

sebagai kota ekologis. Kota yang secara ekologis juga dapat dikatakan kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Kota sehat juga merupakan suatu kondisi dari suatu kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Seperti yang diungkapkan (S.Ernawi:2012) *Green city* atau Kota hijau masa depan (*future green cities*) dapat terwujud jika kota-kota yang saat ini tengah dalam masa inisiasi sebagai kota hijau dapat mengakomodasi prinsip-prinsip kota hijau, contohnya dengan diakomodasinya target pencapaian RTH sebesar 30% dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kotanya. Kota hijau yang kita cita-citakan ini adalah kota masa depan milik generasi penerus. Hal ini sejalan dengan yang terjadi di lapangan, semua masyarakat kota Batu mulai mewujudkan ruang yang aman, nyaman, di sekitar taman wilis dan bulukerto untuk dapat mewujudkannya kota hijau, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (stakeholders) antara lain Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, FKH dan Dinas Pertanian agar bekerja sama mendukung program P2KH dan RTRW kota Batu.

Agar strategi tersebut dapat berjalan optimal maka diperlukan pula komitmen dari dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Pertamanan dan PJU untuk melaksanakan usaha membangun RTH Kota Batu yang sudah direncanakan dan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan pihak dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Pertamanan dan PJU memiliki komitmen yang kuat

dalam melaksanakan tugasnya serta SDM yang berkualitas dan sarana prasarana yang menunjang dalam pengelolaan RTH taman dan jalur hijau.

Untuk menunjang strategi yang dilakukan Cipta Karya dan Tata Ruang bidang pertamanan dan PJU diperlukan strategi secara mendalam baik secara internal maupun eksternal. Menurut Menurut Wechsler dan Backoff sebagaimana dikutip oleh Heene (2010:62) penerapan strategi organisasi publik pada akhirnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang sesuai dalam pelaksanaan program RTH dan pertamanan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kepemimpinan

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu bidang Pertamanan dan PJU memiliki pemimpin yang bertanggung jawab untuk memimpin dinas dalam pelaksanaan tugas dinas yang dalam hal ini adalah pelaksanaan program RTH dan pertamanan kota sehingga mampu memotivasi timnya untuk melaksanakan program tersebut secara maksimal.

b. Kapasitas organisasi

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu bidang Pertamanan dan PJU memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pembangunan dan pengelolaan RTH taman dan jalur hijau.

c. Kesepakatan internal mengenai wewenang yang berlaku

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu bidang Pertamanan dan PJU memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan program RTH dan pertamanan kota

- d. Ruang kebebasan yang tersedia melalui pelimpahan pengendalian oleh atasan.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu bidang Pertamanan dan PJU memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program RTH dan pertamanan serta memiliki inovasi dalam pembangunan dan pengelolaan RTH taman dan jalur hijau

- e. Bonafiditas dari sumber-sumber keuangan.
sumber keuangan diperoleh dari dana APBD dalam pelaksanaan program.

- f. Keragaman akan wewenang
dalam program RTH dan pertamanan kota pihak dinas memiliki kewenangan dalam pembangunan dan pengelolaan sesuai dengan arah pembangunan Kota Batu yang tercantum dalam RTRW kota Batu Tahun 2010-2030.

- g. Perkembangan teknologi dan jasa.
pembangunan taman yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi dan peningkatan pelayanan terhadap pertamanan yang dilakukan pihak dinas.

2. Faktor Eksternal

- a. Sarana yang tersedia
pihak dinas terus berupaya dalam melengkapi sarana penunjang dalam pembangunan dan pengelolaan dan meningkatkan fasilitas sarana pada taman kota Batu.

- b. Persyaratan yang diminta stakeholder.

pihak dinas menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam perencanaan pembangunan maupun pengelolaan RTH kota. Dalam pembangunan 3 bulan pertama menjadi tanggung jawab dari pengembang, setelahnya menjadi tanggung jawab pihak dinas.

- c. Pengaruh dari berbagai agenda politik.
- d. adanya perubahan mendadak dari pemerintah pusat maupun arahan pembangunan kota yang menyangkut area RTH.
- e. Dukungan publik terhadap organisasi dan aktivitasnya.

partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan RTH meningkat dengan diadakannya lomba lingkungan dan adanya sosialisasi yang dilakukan pihak dinas dan FKH (Forum Komintas Hijau) dalam upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya taman dan jalur hijau untuk mewujudkan *Green City* di kota Batu, dan juga keterlibatan masyarakat dalam perumusan pembangunan taman di wilayahnya agar sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut.

- f. Badan hukum dalam organisasi.

Instansi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu memiliki dasar hukum pembentukan lembaga yang mengatur berjalannya instansi tersebut.

Jadi dengan demikian dapat dikatakan strategi yang dilakukan pemerintah Kota Batu melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang belum sesuai atau kurang dengan penjelasan teori yang telah dijelaskan diatas. Dengan adanya strategi yang disusun dengan sistematis dan

terprogram dapat menginformasikan kepada masyarakat secara luas tentang strategi pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Batu.

d. Analisis SWOT pengelolaan RTH taman dan jalur hijau di Kota Batu

Analisis SWOT dibutuhkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU dalam rangka membantumewujudkan Green City melalui program P2HK yang sedang berjalan saat ini. Analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman) menurut Jogiyanto (2005:46), digunakan untuk menilai kekuatan-kelemahan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Berdasarkan di lapangan Analisis Dinas Cipta Karya dan Tata bidang Pertamanan dan PJU kota Batu belum melibatkan keputusan-keputusan yang simultan. Sasaran jangka panjang dalam keberhasilan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Batu masih berkaitan dengan pelaksanaan secara kelembagaan, dengan demikian strategi berdasarkan table penyajian data belum bisa menilai kekuatan dan kelemahan dari sumber daya yang dimiliki Dinas Cipta Karya dan Tata bidang Pertamanan dan PJU.

Kekuatan/kelemahan internal, digabungkan dengan peluang/ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan. Berikut ini merupakan penjelasan dari SWOT (David, Fred R., 2006:47) yaitu :

1. Kekuatan (Strenghts)

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh organisasi yang diharapkan dapat dilayani. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran dapat meruoakan sumber dari kelemahan organisasi.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecendrungan – kecendrungan penting merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi organisasi.

4. Ancaman (Threats)

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan organisasi.

Metode analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yg paling dasar, yg berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari 4 sisi yg berbeda. Hasil analisa biasanya adalah arahan/rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dgn benar, analisis SWOT akan membantu untuk melihat sisi-sisi yg terlupakan atau tidak terlihat selama ini oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu.

Sebelum menentukan strategi pengelolaan RTH Publik Kota oleh Dinas Cipta Karya dan Tata bidang Pertamanan dan PJU kota Batu berdasarkan analisis SWOT, perlu kiranya dilihat suatu pedoman untuk menyeleksi strategi pengelolaan RTH Kota ke arah mana tujuan yang akan dicapai dalam perumusannya, hal ini dimaksudkan bahwa penentuan strategi pengelolaan ini memiliki pemikiran dasar yang dilandasi oleh ketentuan utama dalam perumusan dan proses seleksi. Setelah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal pengelolaan RTH Kota, selanjutnya dilakukan perumusan strategi pengelolaan dengan menggunakan analisis SWOT yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 1.7 Matriks analisis SWOT pengelolaan RTH publik Kota Batu Tahun 2014 berikut:

Table 1.7 Matriks Analisis SWOT Pengelolaan RTH Publik Kota Batu Tahun 2014

Eksternal Internal	Peluang (O): 1.Partisipasi masyarakat 2.pihak swasta 3.teknologi informasi dapat mengefektifkan pelayanan informasi	Tantangan (T): 1.Semakin banyak wisatawan yang datang ke kota Batu 2.Perubahan Tata Ruang 3.Perkembangan teknologi informasi dan pertumbuhan gedung.
Kekuatan (S): 1.Kepemimpinan yang baik dinas cipta karya dan tata ruang bidang pertamanan pju 2.Sumber daya manusia ahli di bidang ruang terbuka hijau 3. ada keinginan untuk mempublikasikan program P2HK lewat jaringan	Strategi S-O: h) S1-O2: Dengan Kepemimpinan yang baik dapat menarik pihak swasta untuk membantu memberikan dana CSR pada pembangunan RTH. i) S1-O1: meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan penyuluhan terkait P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) untuk mewujudkan <i>Green City</i> dan pentingnya menjaga ruang terbuka hijau yang ada di Kota Batu	Strategi S-T: e) S1-T3 : merumuskan aturan pemberian sanksi bagi yang menyalahgunakan ruang terbuka hijau. f) S1-T2 : merumuskan aturan kebutuhan ruang terbuka hijau taman dan jalur hijau kota g) S2-T3 : memanfaatkan SDM yang ahli dalam bidang ruang terbuka hijau untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang terbaru

Kelemahan (W): 1. Terbatasnya anggaran 2. Sumber daya manusia yang mengawasi lapangan 3. Belum ada penyimpanan data base	Strategi W-O: d. W1-O2: menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan ruang terbuka hijau taman dan pengelolaan terhadap ruang terbuka hijau tersebut e. W2-O1: memanfaatkan sumber daya manusia untuk membantu mengawasi pembangunan RTH publik.	Strategi W-T: e. W1-T1: memperoleh banyak pendapatan APBD dari banyaknya wisatawan yang datang ke kota Batu. f. W3-T1: membuat prosedur penanganan data informasi untuk informasi pada masyarakat
--	---	--

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kota Batu 2014 (Data diolah oleh peneliti)

Dari Tabel matriks SWOT diatas diperoleh strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO (Strength and Opportunity).

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar – besarnya.

- a. S1-O2: Dengan Kepemimpinan yang baik dapat menarik pihak swasta untuk membantu memberikan dana CSR pada pembangunan RTH.
- b. S1-O1: meningkatkan partisipasi masyarakat masyarakat dengan memberikan penyuluhan terkait P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) untuk mewujudkan *Green City* dan pentingnya menjaga ruang terbuka hijau yang ada di Kota Batu

2. Strategi ST (Strength and Threats). Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

- a. S1-T3 : merumuskan aturan pemberian sanksi bagi yang menyalahgunakan ruang terbuka hijau.
- b. S1-T2 : merumuskan aturan kebutuhan ruang terbuka hijau taman dan jalur hijau kota
- c. S2-T3 : memanfaatkan SDM yang ahli dalam bidang ruang terbuka hijau untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang terbaru

3. **Strategi WO (Weakness and Opportunity).** Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

- a. W1-O2: menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan ruang terbuka hijau taman dan pengelolaan terhadap ruang terbuka hijau tersebut
- b. W2-O1: memanfaatkan sumber daya manusia untuk membantu mengawasi pembangunan RTH publik.

4. **Strategi WT (Weakness and Threats).** Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

- a. W1-T1: memperoleh banyak pendapatan APBD dari banyaknya wisatawan yang datang ke kota Batu.
- b. W3-T1: membuat prosedur penanganan data informasi untuk informasi pada masyarakat

Analisis SWOT dapat digunakan dengan berbagai cara untuk meningkatkan analisis dalam usaha penetapan strategi. Umumnya yang sering digunakan adalah sebagai kerangka / panduan sistematis dalam diskusi untuk membahas kondisi alternatif dasar yang mungkin menjadi pertimbangan perusahaan. Menurut Ferrel

dan Harline (2005), fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman).

Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan.

Jadi dari hasil table analisis SWOT dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, maka pembangunan infrastruktur dan sarana kota merupakan faktor yang penting dalam pembangunan skala prioritas Kota Batu, termasuk pembangunan dan pengelolaan RTH sebagai sarana publik. RTH selain mempunyai fungsi sebagai penyeimbang ekosistem kota yaitu fungsi ekologis, juga mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan merupakan *image/ciri* suatu kota sehingga baik dalam penataan maupun pengelolaannya harus dapat mencerminkan fungsi-fungsi tersebut, agar terbentuk kota yang representatif dan mempunyai ciri khas yang dapat dibanggakan, sesuai dengan julukan "Batu Kota Ekowisata". Berkaitan dengan fungsi-fungsi tersebut, maka perlu ada upaya-upaya untuk terus membangun RTH, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang dapat meningkatkan "nilai jual" Kota Batu.

e. Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Batu.

Pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau publik di Kota Batu perlu dilakukan secara kontinyu, perode, didukung oleh

peningkatan sistem pelaporan dari staf pengolah yang baik. Apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan atau masalah yang terjadi dilapangan yang nantinya akan dilaporkan pada pimpinan tertinggi. Monitoring dan evaluasi dikerjakan secara berkala dan teratur agar pembangunan dapat tercapai tujuanya. Menurut Handoko (1999:25) Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan didalam termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpanga-penyimpangan yang mungkin terjadi. Dengan adanya pengawasan berjalanya program dapat dapat berjalan sesuai arah pembangunan.

Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan program yang dikerjakan oleh Dinas Cipta Karya dan tata Ruang Kota Batu. Pelaksanaan pengeloaan Ruang Terbuka Hijau Publik perlu mendapatkan pengawasan oleh pemerintah Kota Batu, oleh sebab itu dengan adanya Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) maka diperlukanya tim kerja yang bertugas untuk mengawasi jalanya Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH).Oleh sebab itu dibentuk team swakelola yang terdiri dari team bappeda,dinas cipta karya,Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Dinas Pertanian, Forum Komunitas Hijau (FKH) yang dimana mempunyai tugas bertanggung jawab kepada Walikota Kota Batu. Setelah melakukan pengawasan P2KH.Team swakelola melakukan evaluasi dari pengembangan kawasan P2KH yang telah berjalan.Evaluasi ini diperlukan untuk menyempurnakan kegiatan yang sedang berjalan, melihat hasil akhir kegiatan, dan juga mengetahui dampak dari suatu kegiatan. Seperti diungkapkan Menurut Tjokroamidjojo (1995:196) evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang

dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dianalisis dan pelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang. Dengan melakukan evaluasi dapat mengetahui kekurangan dalam pembangunan yang akan dikerjakan dipembangunan selanjutnya. Hasil dari program kerja P2KH setiap akhir tahun BAPPEDA diwajibkan membuat laporan kerja yang digunakan untuk laporkan hasil pertanggung jawaban dari hasil program pengembangan kawasan agropolitan untuk diberikan kepada wali kota.

Jadi dengan demikian dari teori yang telah dikemukakan dan hasil wawancara dilapangan atas, sudah sesuai dengan teori pembangunan. Dengan melakukan pengawasan dan evaluasi dapat mengetahui hasil dari pengelolaan ruang terbuka hijau sudah sesuai dengan arahan Walikota Batu. Sehingga dengan evaluasi dapat mengetahui keberhasilan dari pengelolaan ruang terbuka hijau publik Kota Batu.

2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang bidang Pertamanan dan PJU kota Batu dalam startegi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

a. Faktor Pendukung

Setiap adanya pembangunan pasti ada faktor yang mendukung untuk pembangunan yang akan dilaksanakan. Pogram Pembangunan Kota Hijau (P2KH) dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Batu yang terdiri sangat terbantu atas dukungan dari regulasi pemerintahan kota Batu atas pengembangan RTH public dan sedikit masyarakat yang paham akan pentingnya kebutuhan RTH publik untuk mewujudkan Kota Hijau. Adanya faktor pendukung dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan bagian terpenting dalam

strategi pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Batu. Seperti yang diungkapkan Rosdiana (2013:25-26) unsur-unsur esensial dalam faktor pendukung yaitu SDM dan kelembagaan yang berperan dalam keberhasilan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik unsur SDM yang berperan ada empat unsur kelompok sasaran yaitu:

- a. Unsur masyarakat merupakan unsur utama atau unsur penggerak
- b. Unsur birokrat, para birokrat harus mampu mereposisikan dirinya sebagai eksekutor pembangunan
- c. Unsur swasta, para perusahaan diperkotaan harus mau berperan dalam mendukung Program Pembangunan Kota Hijau.
- d. Unsur pendukung, unsur pendukung ini terdiri dari: para cerdik pandai, pemuka masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, universitas dan LSM.

Melihat adanya unsur pendukung dalam pembangunan ruang terbuka hijau. Dengan keberhasilan pengembangan dan pengeloaan ruang terbuka publik di Kota Batu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya kota sehat melalui P2KH yang dikelola Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Kota Batu sangat tepat sekali untuk program pembangunan kota hijau karena keadaan geografis yang telah ada di kota Batu, kebiasaan warga batu yang masih banyak bercocok tanam juga sangat mendukung keberadaan rth publik kota batu. Sedangkan Sumber daya manusia atau masyarakat di kota Batu merupakan faktor utama yang digunakan sebagai penggerak pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik. Kota Batu memiliki potensi dalam pengembangan kawasan RTH sehingga dapat meningkatkan pariwisata di Kota Batu.

Jadi dengan demikian faktor pendukung yang telah ada untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Batu sudah sesuai dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya telah sudah sesuai dengan hasil wawancara dilapangan. Yaitu unsur-unsur keberhasilan pembangunan ruang terbuka hijau yaitu unsur sumber daya manusia yang ada di kawasan ruang terbuka hijau atau masyarakat kota Batu sangat mendukung untukpembangunan ruang terbuka hijau karena mayoritas masyarakat kota Batu bekerja bercocok tanam sehingga sangat prihatin dengan gencarnya pembangunan hotel dan perumahan yang bisa merusak lingkungan warga. Masalah kebijakan yang telah dibuat Pemerintah Kota Batu sudah sesuai dengan arah dari pembangunan ruang terbuka hijau.

b. Faktor Penghambat

Setiap pembangunan pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambat, dengan adanya dua faktor tersebut pasti didalam pembangunan.Strategi pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Batu mempunyai penghambat dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau diantaranya Anggran dana Program kerja sama antar satuan kerja perangkat daerah sama seperti yang diungkapkan Bryson (2007:227-228) ada empat tantangan yang perlu dihadapi dalam pembangunan yaitu:

- a. Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen.
- b. Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi *good currency*.
- c. Masalah struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan.
- d. Masalah institusional adalah pelaksanaan kepemimpinan transformatif.

Dengan melihat tantangan atau penghambat dalam pembangunan sama seperti dalam strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota Batu juga mempunyai hambatan dalam membangun Ruang Terbuka Hijau. Sama halnya dengan Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) juga memiliki kendala juga seperti dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat kota Batu. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber kendala yang dihadapi pemerintah Kota Baru khususnya BAPPEDA Kota Batu adalah: 1) kurang koordinasi antara SKPD untuk keberhasilan Program Pembangunan Kota Hijau 2) kurang dukungan dari pemerintah kota seperti dukungan anggaran yang memadai, sehingga keberhasilan program ini belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan 3) kurang perhatian dari masyarakat untuk ikut serta dalam Program Pembangunan Kota Hijau. Sedangkan masyarakat kota Batu tidak mengikuti atau belum menerapkan apa yang telah disosialisasikan pemerintah.

Jadi dengan demikian kendala yang dihadapi dalam Strategi pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Batu mengalami kendala utama masalah koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah yang belum terjalin. Seperti teori yang telah dijelaskan di atas, kendala yang dihadapi dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Batu sama dengan kendala yang dijelaskan pada teori pembangunan. Tidak dapat dihindari tentang koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah masih belum terjalin antara stakeholder, masalah anggaran yang dikelurkan pemerintah Kota Batu masih menjadi kendala dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Batu dan masalah kurang perhatian dari masyarakat atas program yang dijalankan pemerintah Kota Batu masih kurang dapat respon dari masyarakat.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu bidang Pertamanan dan PJU dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk mewujudkan *Green City* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mewujudkan *Green City*

- a. Strategi pengelolaan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu bidang Pertamanan dan PJU saat ini dalam pelaksanaannya belum berjalan baik dengan melibatkan

masyarakat, pihak swasta dan dengan belum optimalisasi pada ruang terbuka hijau yang ada di Kota Batu.

- b. Masyarakat tidak ikut serta dilibatkan dalam perumusan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau untuk merumuskan konsep ruang terbuka hijau taman yang ada di wilayahnya sehingga dapat tidak diketahui taman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan masyarakat tidak ikut memiliki dan menjaga taman dan penghijauan di wilayahnya.
- c. Pihak swasta kurang berperan dalam bantuan pembangunan taman kota dan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan taman.
- d. Dalam penetapan strategi pengelolaan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu bidang Pertamanan dan PJU dilakukan dengan menganalisis lingkungan strategis dengan menggunakan analisis SWOT dan diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Kekuatan (*Strength*) :
 - a) Kepemimpinan yang baik dalam Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu bidang Pertamanan dan PJU yang mampu memotivasi dan menggerakkan bawahannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
 - b) Memiliki sumberdaya manusia yang berkomitmen, berkompotensi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kualitas ruang terbuka

hijau yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu bidang Pertamanan dan PJU terus meningkat.

- Kelemahan (*Weakness*) :

- a) Terbatasnya anggaran dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh dinas yang berasal dari APBD.
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu bidang Pertamanan dan PJU dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang perkembangannya meningkat.

- Peluang (*Opportunities*) :

- a) Adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait pentingnya *Green City*.
- b) Pihak swasta mulai sadar akan pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau.

- Ancaman (*Threats*) :

- a) Belum adanya perda baru yang mengatur mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Batu, khususnya yang mengatur mengenai kebutuhan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu bidang Pertamanan dan PJU yaitu taman dan jalur hijau.
- b) Perubahan yang mungkin terjadi pada arahan penataan ruang Batu yang menyangkut perubahan pada penggunaan lahan ruang terbuka hijau.

e. Pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik perlu mendapatkan pengawasan oleh pemerintah Kota Batu, oleh sebab itu dengan adanya Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) maka diperlukannya tim kerja yang bertugas untuk mengawasi jalannya Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH).

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Batu. Dapat disebutkan faktor Regulasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik dan masyarakat yang paham akan pentingnya Green City sebagai faktor pendukung dalam strategi pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Batu. Sedangkan faktor penghambat pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Batu meliputi, Anggaran Dana Program dan Kerja sama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang masih kurang maksimal.

2. Saran

Berdasarkan gambaran strategi pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Batu . Ada beberapa saran yang bisa disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mewujudkan Green City.
 - a. Pemerintah Kota Batu perlu meningkatkan anggaran pembangunan untuk pemeliharaan dan pengelolaan RTH publik di Kota Batu.
 - b. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kota Batu perlu meningkatkan kualitas strategi pengelolaan RTH untuk mencapai 30% dengan,
 - 1) Merencanakan rencana induk RTH dan melegalisasi perda RTH.
 - 2) Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun/dipreservasi
 - 3) Menghijaukan bangunan (green roof/green wall)

- 4) Menambah lahan RTH baru, perluasan RTH melalui pembelian lahan
- 5) Meningkatkan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting.
- 6) Mengakuisi RTH privat, menjadikan RTH kota
- 7) Mengembangkan koridor hijau kota.
- 8) Meningkatkan peran serta masyarakat/partisipasi publik.

c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang perlu menambah dan meningkatkan kualitas tenaga lapang untuk pengawas, pemeliharaan dan pengelola RTH publik dengan bekerja sama dengan swasta atau masyarakat.

d. Pemerintah Kota Batu perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar stakeholder, di lingkungan Pemerintah Kota Batu, antar dinas, kecamatan, agar penataan RTH dapat terintegrasi dengan program-program pembangunan lainnya sehingga mempermudah startegi pengeloaan RTH di kota Batu.

e. Team swakelola atau ketua program harus bertanggung jawab atas kinerjanya dengan cara pembuatan dokumen laporan kerja yang nantinya akan dipertanggung jawabkan secara langsung kepada Walikota Batu sehingga dapat dinilai kinerja team swakelola yang telah diberi tugas sesuai bagianya masing-masing apakah sudah sesuai dengan target program yang dilaksanakan di lapangan.

3. Faktor Pendukung : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota harus menjaga kepercayaan pemkot Batu dengan terus mengembangkan

keberadaan ruang terbuka hijau dikota Batu karena pemkot Batu telah membuat regulasi mengenai Ruang Terbuka Hijau yang jelas dalam RTRW 2010-2030. selain itu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Pertamanan dan PJU Kota Batu harus meningkatkan lagi kegiatan program pengembangan ruang terbuka hijau agar masyarakat kota Batu semakin banyak yang paham akan pentingnya *Green City*.

Faktor Penghambat : Pemkot Kota Batu lebih peduli dengan keberadaan ruang terbuka hijau di kota Batu dengan lebih mengutamakan anggaran ruang terbuka hijau. Pemkot Batu juga harus mempermudah kerjasama antara stakeholder yang membidangi ruang terbuka hijau agar mempermudah pengelolaan ruang terbuka hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Bovaird, Tony (Dieditoleh Tony Bovaird dan ElkeLöffler) . 2003. *Strategic Management in Public Sector Organizations (dalam buku Public Management and Governance)*. NewYork:Routledge.
- Budihardjo, Eko, 1991, *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Bandung :Alumni.
- Bryson, John. M. 2001. *Strategic Planning for Publik and Non Profit Organization*, M Mifatahuddin (penerjemah) *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Bryant dan White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, CetakanPertama, AlihBahasaRusyanto L. Simatupang, Jakarta:LP3ES.
- Dan Schendledan Charles Higgns .1985 *Pengambil Keputusan Stratejik.Untuk organisasi public dan Organisasi Non Profit*. Jakarta:Grasindo.
- David, Fred R., 2006. *Manajemen Strategis*. Edisi Sepuluh, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Erly Suandy, 2001, *Perencanaan Pajak*. Jakarta:Salemba Empat.

- Fahrentino, J.J. 2003. *Perumusan Materi Pokok Peraturan Perundang-Undangan tentang Kawasan Hijau Kota*. Bandung. ITB.
- Ferrel, O.C and D, Harline. 2005. *Marketing Strategy*. Thomson Corporation, South Western.
- Green, Arnold W. 1959. *Recreation, Leisure, and Politics*. New York.
- Handoko T. Hani 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Henee, Aime. Sebastian Desmidt. Faisal Afif. Ismeth Abdullah. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Imam S .Ernawi. 2012. *Buletin Pandauan Program Pengembagan Kota Hijau*. Jakarta: Buletin Penataan Ruang.
- Jaya NS .2000. *Penginderaan Jauh Satelit Untuk Kehutanan.: Laboratorium Inventarisasi Hutan, Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Bogor : Institut Pertanian Bogor*.
- Joga, Nirwono., dan Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30%! Resolusi Kota hijau*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jogiyanto, 2005, *Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Keraf, A Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Kompas.
- Manik, K.E.S. 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Moles. Mathew B dan A Michael Huberman 1992. *Analisis data kualitatif*. Buku Sumber tentang metode-metode baru diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Rangkuti, Freddy. 2000. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Riyadi dan Bratakusumah, Dedy. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Mengali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Rosdiana, Haula. 2013. *Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Pembangunan Agropolitan*. Jakarta: UI Press

Salim, Emil. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik*, Jakarta: Gramedia Press.

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: CV Mandar Maju

Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suryono, Agus. 2004, *Pengantar Teori Pembangunan*, Malang, Universitas Negeri Malang, UM Press.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES

_____, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: PT Toko Buku Gunung Agung.

Jurnal dan Artikel

Sukmana, Oman. 2007. *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan Malang*, (Online) (<http://www.umm.ac.id/pengelolaan-ruang-terbuka-hijau.pdf>) diakses pada tanggal 14 September 2014

Suweda, I Wayan. 2011. *Penataan Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Berotonomi*. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol. 15, No. 2, Juli 2011. Denpasar

Direktorat jenderal penataan ruang kementerian pekerjaan umum.
(<http://werdhapura.penataanruang.net/component/content/article/12-umumic/178-green-city>) diakses pada 15 february 2015

Akbari, dkk. 2011. (<https://sites.google.com/site/tamanbandung/fun-facts/untuk-apa-rth>) diakses pada tanggal 14 September 2014

Himpunan Mahasiswa Jurnalistik. 2013. (<http://hmjfngetop.blogspot.com/2013/11/ta-ta-kota-green-zone-yang-terkikis-oleh.html>) Diakses pada 14 September 2014

Ir. Sukawi, MT. 2009. (<http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/11702809.pdf>) diakses pada tanggal 20 Juli 2014

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional

Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota

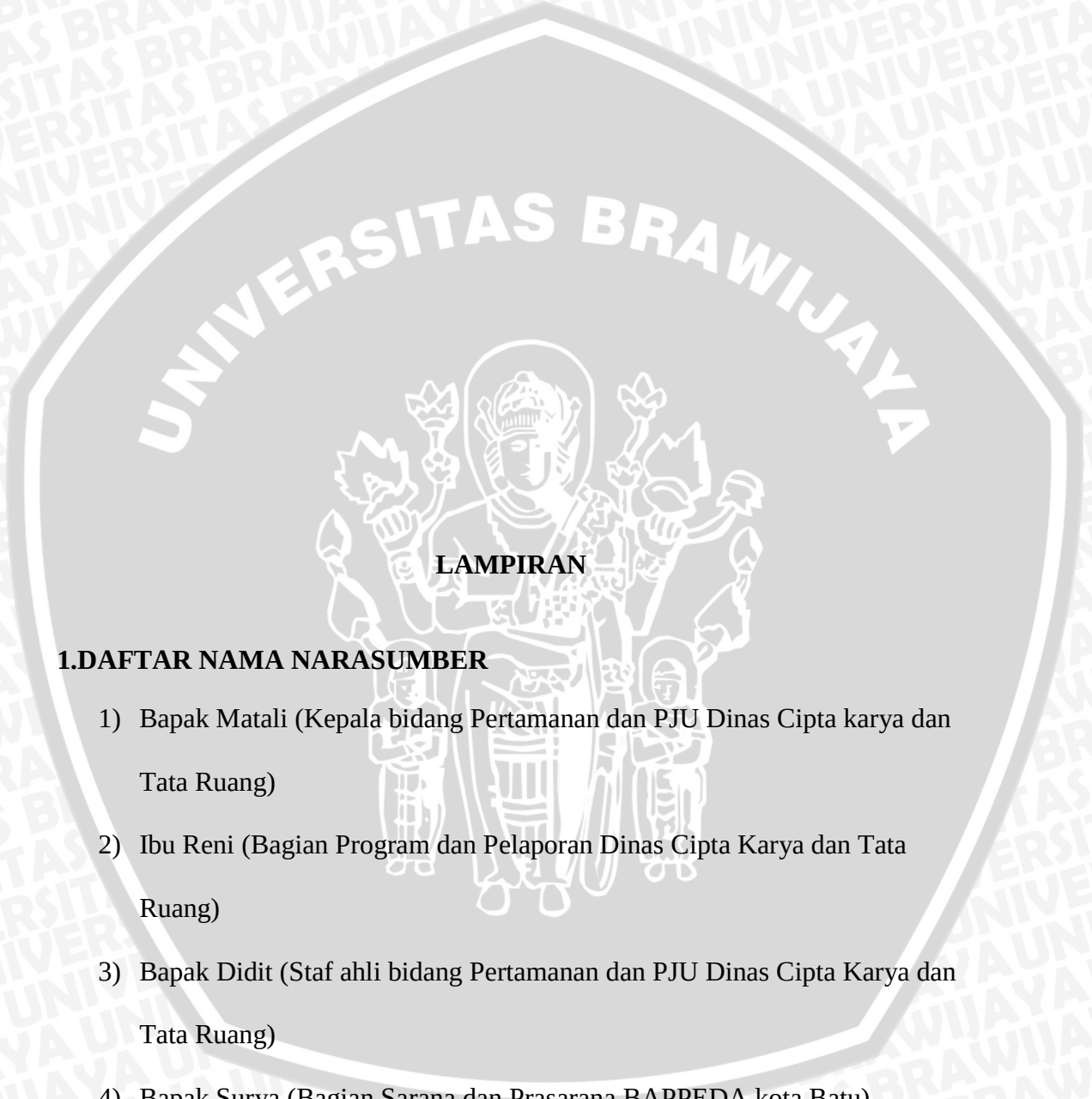
Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Jakarta, Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Departemen Pekerjaan Umum.

Skripsi

Novita, Asti Amelia, 2008 Evaluasi Tata Guna Lahan Ruang Terbuka Hijau dalam perencanaan pembangunan wilayah perkotaan: Studi pada badan perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung. Skripsi sarjana, Fakultas Ilmu Administrasi Malang

The logo of Universitas Brawijaya is a large, light gray shield shape. Inside the shield, the text "UNIVERSITAS BRAWIJAYA" is written in a semi-circle at the top. Below the text is a stylized illustration of a figure with multiple arms, holding various objects, and two smaller figures at the bottom. The background of the entire page is a repeating pattern of the text "UNIVERSITAS BRAWIJAYA" in a light gray, diagonal orientation.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN

1.DAFTAR NAMA NARASUMBER

- 1) Bapak Matali (Kepala bidang Pertamanan dan PJU Dinas Cipta karya dan Tata Ruang)
- 2) Ibu Reni (Bagian Program dan Pelaporan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)
- 3) Bapak Didit (Staf ahli bidang Pertamanan dan PJU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)
- 4) Bapak Surya (Bagian Sarana dan Prasarana BAPPEDA kota Batu)
- 5) Bapak Steve (Ketua Forum Komunitas Hijau Kota Batu)
- 6) Bapak Giman (Masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Wilis)
- 7) Bapak Edo (Masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Wilis)

- 8) Bapak Epan (Masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Bulukerto)
- 9) Bapak Dion (Masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Bulukerto)

2. PEDOMAN WAWANCARA

- a. Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu
 - 1) Program apa dapat mendukung ketersediaan RTH dan green city taman dan jalur hijau di kota Batu ?
 - 2) Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang pertamanan dan PJU dalam proses pengelolaan RTH di kota Batu ?
 - 3) Bagaimana proses Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang pertamanan dan PJU dalam membuat rencana program pengelolaan RTH di kota Batu?
 - 4) Faktor pendukung dan penghambat dalam lingkungan internal Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang pertamanan dan PJU?

- 5) Faktor pendukung dan penghambat dalam lingkungan eksternal Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang pertamanan dan PJU?
- 6) Daerah mana yang menjadi perhatian khusus Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang pertamanan dan PJU dalam ketersediaan RTH?
- 7) Bagaimana monitoring dan evaluasi kegiatan program ketersediaan RTH Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang pertamanan dan PJU?
- 8) Apakah ada inovasi dari setiap program kegiatan ketersediaan RTH Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bidang pertamanan dan PJU?

b. Kantor BAPPEDA kota Batu

- 1) Syarat daerah yang berhak mendapatkan program P2HK?
- 2) Bagaimana struktur tugas program P2HK di kota Batu?
- 3) Faktor pendukung dan penghambat program P2HK yang dihadapi BAPPEDA kota Batu?

c. Bapak Steve (Kepala Forum Komunitas Hijau Kota Batu)

- 1) Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan FKH untuk membantu program FKH?
- 2) Bagaimana proses FKH bekerjasama dengan team swakelola program P2KH?
- 3) Faktor pendukung dan penghambat FKH kota Batu dalam mewujudkan Green City?

d. Masyarakat yang tinggal di sekitar taman Wilis dan taman Bulukerto.

- 1) Bagaimana peran masyarakat sekitar taman dalam menjaga kebersihan dan keberadaan taman dan jalur hijau tetap terjaga?

- 2) Bagaimana cara masyarakat berperan dalam proses monitoring kegiatan program P2HK?
- 3) Apakah penting peran masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi program P2HK?

3. SURAT PENGANTAR PENELITIAN DARI BAKESBANGPOL KOTA BATU UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN DI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 05 November 2014 Nomor : 14226/UN10.3/PG/2014 Perihal Ijin Penelitian bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : BRYAN MAULANA
NIM : 105030600111014
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas/Universitas : FIA/Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. M.T. Haryono 163 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Green City Kota Batu
Data Yang Dicari : - Jumlah RTH Kota Batu
- Jumlah pertumbuhan hotel
Lokasi : 1. Bappeda Kota Batu
2. Dinas PU, Cikartarung Kota Batu
3. KLH Kota Batu
Peserta : -
Waktu : 07 November 2014 s/d 06 Februari 2015

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BATU

Drs. ARSAN ABDULLAH LUMBU

Pembina Tingkat I

NIP. 19600810 198509 1 004

Tembusan :

Yth. Sdr. Dekan FIA Universitas Brawijaya Malang

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4.SURAT KETERANGAN RISET DARI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 14/226 /UN 10.3/10/2014
Lampiran : -
Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batu

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan penelitian bagi mahasiswa :

Nama : Bryan Maulana
Alamat : Jl. Merak TK no 119 Rewwin/Waru/Sidoarjo
NIM : 105030600111014
Jurusan : Administrasi Publik
Minat : Perencanaan Pembangunan
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk mewujudkan Green City Kota Batu
Waktu : 3 (tiga) bulan, 7November s/d 6Februari2014
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. FOTO DOKUMENTASI



KONDISI TAMAN WILIS KOTA BATU



WAWANCARA DENGAN SALAH SATU STAF DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATU

 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KOTA BATU 	
Pekerjaan	: IMPLEMENTASI FISIK KOTA HIJAU BATU
Lokasi	: Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
Nama Unit Kerja	: Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Nama Satuan Kerja	: SNVT Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota Hijau
Nama Sub Satuan Kerja / PPK	: PPK Kota Batu
Waktu	: 90 Hari
Nilai kontrak	: Rp. 939,634,000
Nomor Kontrak	: 602.1/03/PPK-P2KH/IFKHB/2014
Kontraktor Pelaksana	: CV. Malabar Giga Mulya

DATA PROYEK KEGIATAN PROGRAM P2KH DI DESA BULUKERTO KOTA BATU



PROSES KEGIATAN PEMBANGUNAN PROGRAM P2KH DI DESA
BULUKERTO

